

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2025



BUPATI BANGGAI
Ir. H. AMIRUDIN.,SP.,MP.,MM



WAKIL BUPATI BANGGAI
Drs. H. FURQANUDIN MASULILI.,MM



Cakupan Peserta JKN 99,83 P Banggai Raih UHC Awards Ke

Jajad 4 Min Boco Informasi Kabupaten Banggai
Januari 29, 2026





PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI INSPEKTORAT DAERAH

Jalan K.H. Samanhudi Nomor 4, Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah 94711
Pos-el itkabbanggai@yahoo.co.id

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banggai untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Banggai.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Luwuk, 27 Maret 2026

Pt. INSPEKTUR



SYAIFULLAH MAMBUHU, S.STP.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banggai Tahun 2025 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banggai Tahun 2025 ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2025. Laporan kinerja ini adalah merupakan tahun keempat atas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai selama tahun 2025 yang diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2025. Laporan kinerja ini sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Banggai tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Kami menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banggai Tahun 2025. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banggai Tahun 2025

ini diharapkan dapat terjadi peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai secara keseluruhan dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, serta bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2025 dan dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di tahun yang akan datang.

Luwuk, Maret 2026



Ir. H. AMIRUDIN, SP., MP.,MM

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Banggai telah berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banggai Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Banggai pada tahun 2025 memiliki 10 (sepuluh) sasaran strategis dengan total 17 (tujuh belas) indikator kinerja, dan 17 target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi menunjukkan bahwa dari 10 sasaran strategis dengan 17 indikator kinerja utama, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Target dengan capaian realisasi diatas 100% sebanyak 4 target;
2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 3 target ; dan
3. Target dengan capaian realisasi dibawah 100% sebanyak 10 target

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Misi 1				
Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Produktif, dan Sejahtera				
Tujuan Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera				
Sasaran Strategis 1				
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,10	73,44	100,47
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	46,5	76,96*	165,51
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,22%	3,07	61,71
4	Angka Kemiskinan	5,43%	6,23	85,27
5	Gini Rasio	0,282	0,316*	87,94
Misi 2				
Menciptakan Kemandirian Ekonomi yang Produktif dan Berdaya Saing Melalui Pemanfaatan Teknologi				
Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Agar Mandiri, Produktif Dan Berdaya Saing melalui Pemanfaatan Teknologi, Berbasis Potensi Sumber Daya Alam dan Keunggulan Lokal				

Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Perdagangan, Industri Rumah Tangga, Perdagangan, Koperasi dan UMKM serta Pertumbuhan Wirausaha Baru				
1	Kontribusi Usaha Perdagangan, Koperasi, UMKM dan IKM terhadap PDRB	5,2%	5,17	99,42%
Sasaran 2 Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Perdesaan				
1	Persentase Desa Maju Berdasarkan IDM	72,50%	47,08%	64,94%
Misi 3 Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur Serta Penanggulangan Bencana				
Tujuan Percepatan Penyediaan dan Pemerataan Infrastruktur serta Penanggulangan Bencana				
Sasaran 1 Tersedianya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas, Layak dan Merata Untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Konektivitas				
1	Persentase Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Wilayah Dalam Kondisi Baik	78,00%	76,57%	98,17%
Sasaran 2 Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana				
1	Indeks Ketahanan Daerah	Rendah	Rendah	100%
Misi 4 Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan yang Berbasis Lingkungan				
Tujuan Peningkatan Perekonomian Daerah melalui Peningkatan Investasi dan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan				
Sasaran 1 Meningkatnya Investasi dan Pengelolaan Potensi Pertanian, perikanan dan Kelautan serta Pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah				
1	Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan dan pertambangan Terhadap PDRB	35,30%	45,44	128,73
2	Indeks Ketahanan Pangan	89,53	76,35	85,28
Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan pengendalian Dampak Perubahan Iklim untuk Kesejahteraan Rakyat				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	82,818	86,60	104,56
Misi 5 Pengembangan Pariwisata dan BUdaya Serta Nilai Keagamaan				
Tujuan Peningkatan Pariwisata Daerah				
Sasaran 1 Meningkatnya Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah				
1	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	2,92%	0,33	11,30
Tujuan Peningkatan Kebudayaan Babasalan serta Moderasi Beragama				
Sasaran 1 Meningkatnya Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Daerah Melalui Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Babasalan serta Moderasi Beragama				
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	54,26	27,74	51,12

Misi 6				
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan dan Akuntabel				
Tujuan Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi di Kabupaten Banggai, untuk Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel				
Sasaran 1				
Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Inovasi Daerah dan Nilai SAKIP				
1	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB*	100,00
2	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100,00
3	Nilai SAKIP	AA	BB	83,20

Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 3.049.552.476.412,03 atau 91,96% dari pagu Rp. 3.316.105.440.115,00.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banggai yang menggambarkan capaian kinerja pada tahun 2025, dan diharapkan untuk capaian kinerja di tahun-tahun mendatang dapat terus meningkat dalam upaya mendukung pencapaian Visi Kabupaten Banggai.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	xii
Daftar Grafik	xiii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Gambaran Umum Daerah	I-1
1.3 Organisasi	I-7
1.4 Isu-Isu Strategis	I-12
1.5 Sistematika Laporan	I-12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
2.1 Rencana Strategis	II-1
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	II-10
2.3 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026	II-27
2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)	II-31
2.5 Perjanjian Kinerja	II-32
2.6 Rencana Kerja dan Anggaran	II-34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1 Pengukuran Kinerja	III-1
3.2 Analisis Capaian Kinerja	III-5
3.3 Realisasi Anggaran	III-146
BAB IV PENUTUP	IV-1
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
1.1	Jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Banggai	I-3
1.2	Jumlah penduduk (ribu) Kab.Banggai Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2025	I-5
1.3	Jumlah Penduduk Kabupaten Banggai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025	I-6
1.4	Jumlah Penduduk Kab. Banggai Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2025	I-6
1.5	Kondisi ASN berdasarkan golongan ruang Tahun 2025	I-10
1.6	Kondisi ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025	I-10
1.7	Kondisi ASN berdasarkan Jenis Jabatan Tahun 2025	I-11
2.1	Target Pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati Banggai Terpilih Sesuai Periode RPJMD Tahun 2021 – 2026	II-5
2.2	Keterkaitan Pokok – Pokok Visi dengan Misi RPJMD Kabupaten Banggai Periode 2021-2026	II-7
2.3	Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah 2021-2026	II-8
2.4	Strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah 2021-2026	II-11
2.5	Arah kebijakan umum pembangunan daerah kabupaten banggai tahun 2021-2026	II-25
2.6	Indikator kinerja utama Pemerintah kabupaten banggai	II-31
2.7	Perjanjian Kinerja tahun 2024	II-33
3.1	Kriteria Penilaian Pencapaian Kinerja	III-1
3.2	Pencapaian indikator kinerja tahun 2025	III-3
3.3	Rekap pencapaian indikator sasaran	III-4
3.4	Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025	III-5
3.5	Penyebab Kematian Ibu Tahun 2022 s.d 2025	III-7
3.6	Penyebab Kematian Bayi Tahun 2022 s.d 2025	III-9
3.7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Provinsi di Sulawesi Tengah Menurut Dimensi Penyusunnya Tahun 2024	III-12
3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD 2021-2026	III-13
3.9	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2025	III-15
3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD 2021-2026	III-17
3.11	Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Kabupaten Banggai, Agustus 2023 - Agustus 2025	III-19
3.12	Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Banggai, 2020-2025 (Agustus) (orang)	III-19
3.13	Karakteristik Pengangguran di Kabupaten Banggai, Agustus 2023-Agustus 2025	III-20

3.14	Penduduk Usia 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Banggai, 2025	III-22
3.15	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD 2021-2026	III-22
3.16	Perbandingan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi, Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, Agustus 2023 - Agustus 2025	III-22
3.17	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Banggai, Maret 2022 – Maret 2025	III-27
3.18	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD 2021-2026	III-27
3.19	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, Maret 2025	III-27
3.20	Garis Kemiskinan dan Perubahannya, Maret 2023 - Maret 2025	III-28
3.21	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Banggai, Maret 2023 - Maret 2025	III-28
3.22	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD 2021-2026	III-32
3.23	Program dan Anggaran Yang Mendukung Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera”	III-34
3.24	Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025	III-35
3.25	Daftar Eksportir SKA Kabupaten Banggai Tahun 2025	III-36
3.26	Jumlah Usaha Kecil di Kabupaten Banggai Berdasarkan Jenis Industri Tahun 2025	III-37
3.27	Jumlah Koperasi di Kabupaten Banggai, Tahun 2025	III-38
3.28	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD 2021-2026	III-42
3.29	Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2025 Yang Mendukung sasaran Meningkatkan Kualitas Perdagangan, Industri Rumah Tangga, Koperasi dan UMKM serta Pertumbuhan Wirausaha Baru	III-43
3.30	Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025	III-44
3.31	Status Desa berdasarkan IDM di Kabupaten Banggai Tahun 2025	III-44
3.32	Status Perkembangan berdasarkan Status IDM Kabupaten Banggai, 2022-2025	III-46
3.33	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD 2021-2026	III-46
3.34	Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2025 Yang Mendukung sasaran Persentase Desa Maju Berdasarkan IDM	III-48
3.35	Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025	III-49
3.36	Capaian Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Wilayah dalam kondisi baik Tahun 2025	III-49
3.37	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir dan target Akhir RPJMD 2021-2026	III-54

3.38	Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2025 Yang Mendukung sasaran Tersedianya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas, Layak dan Merata Untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Konektivitas	III-56
3.39	Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025	III-57
3.40	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD 2021-2026	III-58
3.41	Nilai IKD dan IRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	III-59
3.42	Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Banggai, Tahun 2025	III-60
3.43	Program yang mendukung sasaran Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah Melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	III-65
3.44	Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025	III-66
3.45	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Banggai, 2021–2025	III-67
3.46	Potensi Sektor Pertanian dan Perikanan di Kabupaten Banggai	III-68
3.47	Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan Tahun 2025	III-68
3.48	Produksi Tanaman Buah-Buahan Tahunan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Banggai (kuintal) Tahun 2025	III-70
3.49	Jumlah Produksi olahan hasil perikanan, perikanan tangkap, perikanan budidaya Tahun 2025	III-78
3.50	Jumlah Rumah Tangga Pembudidaya dan Pembudidaya Ikan	III-80
3.51	Jumlah RTP Menurut Kategori Teknologi yang digunakan	III-81
3.52	Produksi Perikanan Budidaya	III-81
3.53	Pembenihan Perikanan Tahun 2025	III-82
3.54	UPI Sertifikasi SJMKHP/HACCP	III-84
3.55	UMKM dan POKLAHSAR	III-84
3.56	Data Ekspor Upi Tahun 2025	III-85
3.57	Perbandingan realisasi indikator kinerja tahun 2025 dengan target Akhir RPJMD 2021-2026	III-89
3.58	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Berdasarkan Aspek Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Pemanfaatan	III-90
3.59	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Kabupaten Banggai Tahun 2025	III-91
3.60	Angka Kecukupan Energi dan Protein Kabupaten Banggai Tahun 2025	III-91
3.61	Cadangan Pangan Kabupaten Banggai Tahun 2025	III-92
3.62	Rasio Jumlah Penduduk per Tenaga Kesehatan terhadap Tingkat Kepadatan Penduduk	III-101
3.63	Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks BB/U, TB/U dan BB/TB Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Banggai Tahun 2025	III-103
3.64	Indeks Ketahanan Pangan di Wilayah Sulawesi Tengah Tahun	III-106

	2025	
3.65	Program yang mendukung sasaran “Meningkatnya Investasi dan Pengelolaan Potensi Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah”	III-107
3.66	Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025	III-108
3.67	Komponen Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Tahun 2025	III-109
3.68	Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Terakhir dan Target Akhir RPJMD 2021-2026	III-111
3.69	Program yang mendukung sasaran meningkatnya kualitas tata ruang, lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan rakyat	III-113
3.70	Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025	III-114
3.71	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Domestik Menurut Bulan di Kabupaten Banggai, Tahun 2025	III-115
3.72	Jumlah Rumah Makan/Restoran menurut Kecamatan di Kabupaten Banggai Tahun 2022-2025	III-117
3.73	Jumlah Akomodasi Penginapan menurut Kecamatan di Kabupaten Banggai Tahun 2022- 2025	III-118
3.74	Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Terakhir dan Target Akhir RPJMD 2021-2026	III-119
3.75	Program yang mendukung sasaran Meningkatkan Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah	III-122
3.76	Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025	III-122
3.77	Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Terakhir dan Target Akhir RPJMD 2021-2026	III-123
3.78	Jumlah penduduk/pengunjung perpustakaan tahun 2025	III-124
3.79	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Tahun 2025	III-124
3.80	Program yang mendukung sasaran Meningkatkan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Daerah Melalui Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Babasalan serta Moderasi Beragama	III-126
3.81	Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025	III-127
3.82	Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Terakhir dan Target Akhir RPJMD 2021-2026	III-127
3.83	Kategori Indeks Inovasi Daerah	III-131
3.84	Indeks Inovasi Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	III-132
3.85	Komponen Penilaian SAKIP Tahun 2024 dan Tahun 2025	III-137
3.86	Program yang mendukung sasaran Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Inovasi Daerah dan Nilai SAKIP Kabupaten Banggai	III-142
3.87	Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Kabupaten Banggai Tahun 2025	III-145
3.88	Realisasi Pendapatan Daerah	III-146

3.89	Pendapatan Pajak Daerah	III-147
3.90	Pendapatan Retribusi Daerah	III-148
3.91	Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	III-148
3.92	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	III-148
3.93	Pendapatan Transfer	III-149
3.94	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	III-149
3.95	Pendapatan Transfer Antar Daerah	III-150
3.96	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	III-150
3.97	Belanja Pegawai	III-151
3.98	Belanja Barang dan Jasa	III-151
3.99	Belanja Subsidi	III-152
3.100	Belanja Hibah	III-152
3.101	Belanja Bantuan Sosial	III-152
3.102	Belanja Modal	III-153
3.103	Belanja Tidak Terduga	III-153
3.104	Belanja Transfer	III-153
3.105	Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025	III-153

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
1.1	Peta wilayah Administrasi Kabupaten Banggai	I-2
2.1	Tema pembangunan daerah kabupaten banggai tahun 2021-2026	II-27
2.2	Prioritas Pembnagunan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026	II-27
3.1	Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Banggai, Agustus 2025	III-20
3.2	Pelaku Usaha berdasarkan Sektor Usaha di Kabupaten Banggai Tahun 2025	III-38
3.3	Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2025	III-60
3.4	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Pembudidaya di Kabupaten Banggai (%) Tahun 2025	III-77
3.5	Produksi Perikanan Menurut Jenis Ikan (ton), 2025	III-79

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Judul Grafik	Halaman
1.1	Luas (km ²) Wilayah Kecamatan di Kabupaten Banggai	I-3
1.2	Presentase Jumlah ASN Berdasarkan Golongan	I-11
1.3	Presentase Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan	I-12
3.1	Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Banggai Tahun 2022-2025	III-6
3.2	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) Kabupaten Banggai Tahun 2021-2025	III-7
3.3	Angka Kematian Bayi (per 10.000 kelahiran hidup) Kabupaten Banggai Tahun 2021-2025	III-8
3.4	Perkembangan HLS dan RLS Kabupaten Banggai, Tahun 2022-2025	III-10
3.5	Perkembangan Pengeluaran Riil Per kapita Kabupaten Banggai Tahun 2021-2024 (Ribu rupiah/orang/tahun)	III-11
3.6	Perbandingan Realisasi indikator IPM Kabupaten Banggai Tahun 2025 Dengan Beberapa Tahun Terakhir	III-12
3.7	Perbandingan realisasi indikator IPM Kabupaten Banggai dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, serta Nasional Tahun 2025	III-13
3.8	Perbandingan realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir	III-16
3.9	Perbandingan realisasi IDG Kabupaten Banggai dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, serta Nasional Tahun 2024	III-17
3.10	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Agustus 2023–Agustus 2025	III-21
3.11	Perbandingan Realisasi TPT Kabupaten Banggai dengan Nasional, Agustus 2025	III-23
3.12	Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Banggai, Tahun 2022-2024	III-32
3.13	Perbandingan Realisasi Gini Rasio Menurut Provinsi, Kabupaten/Kota di Sulawesi	III-32
3.14	Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Banggai Tahun 2024 dengan Gini Rasio Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional September 2025	III-33
3.15	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kontribusi Usaha Perdagangan, Koperasi, UMKM dan IKM terhadap PDRB Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Terakhir	III-39
3.16	Perbandingan Kontribusi usaha perdagangan, koperasi, UMKM dan IKM terhadap PDRB Kabupaten Banggai dengan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	III-42
3.17	Status Desa Maju berdasarkan IDM Kabupaten Banggai terhadap Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2025	III-47

3.18	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Terakhir	III-58
3.19	Perbandingan realisasi indikator kinerja Kontribusi Sektor Pertanian, perikanan dan pertambangan terhadap PDRB tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir	III-67
3.20	Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Banggai (ton) Tahun 2025	III-73
3.21	Produksi Perikanan Tangkap (ton/tahun) Tahun 2022 – 2025	III-78
3.22	Pertumbuhan produksi Pengolahan Hasil Perikanan	III-86
3.23	Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan, dan Pertambangan Terhadap PDRB di Kabupaten Banggai dengan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025	III-89
3.24	Perbandingan Skor PPH Konsumsi Kabupaten Banggai dengan Target Nasional. 2022-2025	III-93
3.25	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banggai, 2022-2025	III-94
3.26	Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Banggai Tahun 2021-2024 (Rp/Kapita)	III-95
3.27	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan di Kabupaten Banggai, 2022-2025	III-96
3.28	Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan di Kabupaten Banggai, 2022-2025	III-97
3.29	Perkembangan Umur Harapan Hidup Saat Lahir Kabupaten Banggai, 2022—2025	III-104
3.30	Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten, 2022-2025	III-105
3.31	KLH Kabupaten Banggai dan Nasional Tahun 2025	III-111
3.32	Perbandingan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Kabupaten Banggai dengan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	III-120
3.33	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai, 2023-2024	III-128
3.34	Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Banggai dengan Provinsi/Kab/Kota se Sulawesi Tengah tahun 2023,2024	III-130
3.35	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2023-2025	III-141

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, serta berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2025 merupakan tahun keempat atas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026.

1.2. GAMBARAN UMUM DAERAH

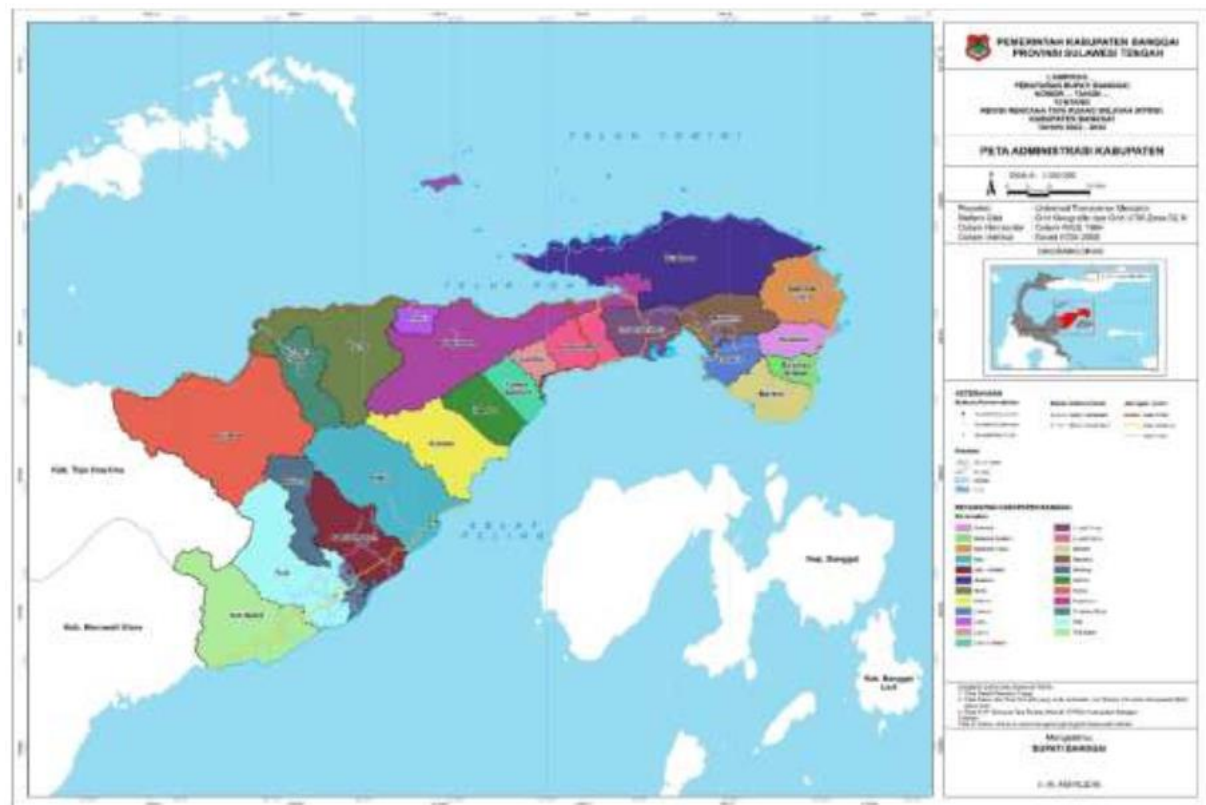
Kabupaten Banggai adalah salah satu Kabupaten yang terbentuk sejak awal pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tanggal 1 April 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi. Selanjutnya, sebagian wilayah Kabupaten Banggai dimekarkan menjadi Kabupaten Banggai Kepulauan dan Banggai Laut. Kabupaten Banggai Kepulauan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000. Kabupaten Banggai Laut dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut.

1.2.1. Aspek Geografi dan demografi

1.2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Gambar 1.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Banggai

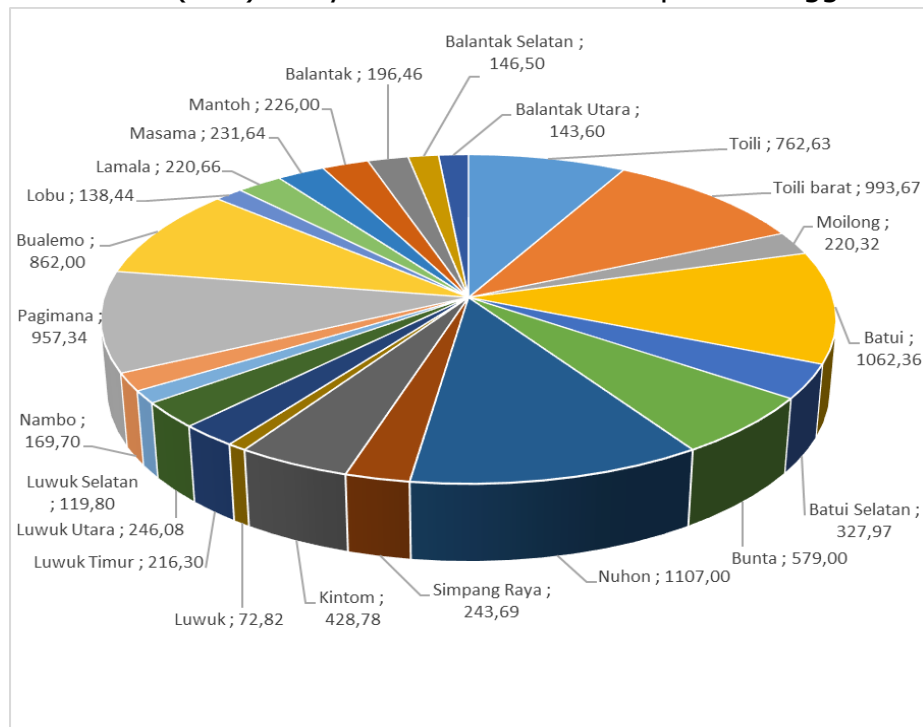


Kabupaten Banggai memiliki luas wilayah daratan $\pm 9.672,70$ Km² atau sebesar 14,22 persen dari seluruh luas Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas lautan $\pm 20.309,68$ Km² serta garis pantai sepanjang 613,25 Km², dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Tomini;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Maluku dan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Peling dan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Morowali Utara.

Secara administratif Kabupaten Banggai terbagi dalam 24 Kecamatan, 46 Kelurahan, 291 Desa.

Grafik 1.1
Luas (km²) Wilayah Kecamatan di Kabupaten Banggai



Sumber : BPS, Kabupaten Banggai Dalam Angka 2026

Berdasarkan grafik diketahui bahwa Kecamatan Nuhon Adalah Kecamatan yang mmepunyai wilayah paling luas yaitu 1.107,00 Km² atau 11,45 persen dari seluruh wilayah Kabupaten Banggai. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah yang paling sempit Adalah Kecamatan Luwuk dengan luas 72,82 Km² atau hanya 0,75 persen dari luas Kabupaten Banggai.

Tabel 1.1
Jumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Banggai

24 Kecamatan	46 Kelurahan	291 Desa	Jumlah Desa/Kelurahan
Toili	1	14	15
Toili Barat		17	17
Toili Jaya		10	10
Moilong		16	16
Batui	7	6	13
Batui Selatan		10	10
Bunta	4	18	22
Nuhon		20	20
Simpang Raya		12	12
Kintom	3	11	14
Luwuk	8	2	10

Luwuk Timur		13	13
Luwuk Utara	2	9	11
Luwuk Selatan	9	1	10
Nambo	6	5	11
Pagimana	3	30	33
Bualemo		20	20
Lobu		10	10
Lamala		12	12
Masama		14	14
Mantoh		10	10
Balantak	3	10	13
Balantak Selatan		11	11
Balantak Utara		10	10

Adapun kecamatan dengan jumlah desa paling banyak adalah Kecamatan Pagimana yaitu 30 desa, sedangkan kecamatan dengan desa paling sedikit adalah Kecamatan Luwuk Selatan yaitu 1 desa.

Jarak antara ibukota Kabupaten ke Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten lain di Sulawesi Tengah yaitu :

- Luwuk ke Palu = 610 Km
- Luwuk ke Parigi = 535 KM
- Luwuk ke Poso = 388 Km
- Luwuk ke Ampa = Km
- Luwuk ke Banggai = 100 Km/66 Mil Laut
- Luwuk ke Salakan = 61 Km/38 Mil Laut
- Luwuk ke Bungku = 161 Km/106 Mil Laut

1.2.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Berdasarkan astronomisnya, Kabupaten Banggai terletak pada posisi antara 0°30' dan 2°20' Lintang Selatan dan antara 122°23' dan 124°20' Bujur Timur. Posisi geografis Kabupaten Banggai berada di bagian Timur Provinsi Sulawesi Tengah di jalur koridor perairan Teluk Tolo, Selat Peling dan Teluk Tomini dan diapit tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Banggai Kepulauan, Tojo Una-Una dan Morowali Utara. Kabupaten Banggai memiliki luas wilayah keseluruhan 29.982,38 Km², ± 9.672,70 Km² atau 32,26 persen diantaranya merupakan daratan dan ± 20.309,68 Km² atau 67,74% merupakan wilayah laut dengan garis pantai sepanjang 613,25 km. Berdasarkan letak geografis tersebut, maka Kabupaten

Banggai memiliki posisi strategis sebagai kawasan maritim yang potensial untuk dikembangkan sebagai kekuatan pendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

1.2.1.3. Topografi

Dilihat dari kondisi topografi, Kabupaten Banggai didominasi oleh kawasan perbukitan dengan kategori kemiringan lereng curam(25-40%) hingga sangat curam (>40%) sebesar ± 395.094,96 Ha atau sekitar ±40.83% dari luas wilayah. Kemiringan lereng yang termasuk kategori datar-landai (8-15%) seluas ±167.901,22 Ha atau sekitar 17,35% dari luas wilayah. Terakhir, yang termasuk kategori sangat datar (0-8%) seluas ±190.874,07 Ha atau sekitar 19,72% dari luas wilayah. Berdasarkan kondisi topografi tersebut, dapat diketahui bahwa lahan datar di Kabupaten Banggai terbatas sehingga lahan yang dapat dijadikan kawasan budidaya juga menjadi terbatas.

1.2.1.4. Demografi

Kepadatan penduduk merupakan indikator tekanan penduduk di suatu wilayah. Ditinjau di masing-masing daerah, diketahui bahwa terjadi ketimpangan kepadatan penduduk antar kecamatan. Kepadatan penduduk terpusat di daerah ibukota kabupaten yang memiliki berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh penduduk sehingga mengundang penduduk wilayah kabupaten untuk bekerja atau menetap disana.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Banggai Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
Tahun 2025

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1	Batui	9.799	9.408	19.207
2	Bunta	10.318	9.961	20.279
3	Kintom	5.949	6.030	11.979
4	Luwuk	16.524	16.769	33.293
5	Lamala	3.832	3.601	7.433
6	Balantak	3.128	3.053	6.181
7	Pagimana	13.456	13.064	26.520
8	Bualemo	9.378	9.108	18.486
9	Toili	11.141	10.773	21.914
10	Masama	6.346	6.241	12.587
11	Luwuk Timur	7.019	6.702	13.721
12	Toili Barat	12.802	12.042	24.844
13	Nuhon	10.572	9.903	20.475
14	Moilong	10.309	10.065	20.374

15	Batui Selatan	8.026	7.609	15.635
16	Lobu	2.112	2.049	4.161
17	Simpang Raya	7.719	7.299	15.018
18	Balantak Selatan	2.926	2.670	5.596
19	Balantak Utara	2.600	2.605	5.205
20	Luwuk Selatan	12.768	12.823	25.591
21	Luwuk Utara	10.529	10.469	20.998
22	Mantoh	3.827	3.516	7.343
23	Nambo	4.515	4.607	9.122
24	Toili Jaya	8.187	7.860	16.047
Jumlah		193.782	188.227	382.009

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Banggai, 2025

Jumlah penduduk Kabupaten Banggai pada tahun 2025 sebesar 382.009 jiwa. Beberapa kecamatan di Kabupaten Banggai memiliki penduduk yang besar seperti Kecamatan Luwuk dengan jumlah penduduk sebesar 33.293 jiwa dan Kecamatan Pagimana sebesar 26.520 jiwa.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Banggai
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	67.300
2	Belum Tamat SD/Sederajat	38.118
3	Tamat SD/Sederajat	104.780
4	SLTP/Sederajat	56.406
5	SLTA/Sederajat	87.829
6	Diploma I/II	1.687
7	Akademi/Diploma III/S.Muda	3.569
8	Diploma IV/Strata I	21.221
9	Strata II	1.059
10	Strata III	40
Jumlah		382.009

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Banggai, 2025

Sedangkan untuk penduduk Kabupaten Banggai pada tahun 2025 yang bekerja di Kabupaten Banggai berdasarkan sektornya:

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Kab. Banggai Berdasarkan Jenis Pekerjaan
Tahun 2025

Mata Pencapaian/ Pekerjaan	Jumlah	Mata Pencapaian/ Pekerjaan	Jumlah
Belum/Tidak Bekerja	94.803	Anggota BPK	1

Mengurus Rumah Tangga	63.815	Bupati	1
Pelajar/Mahasiswa	70.506	Wakil Bupati	1
Pensiunan	1.996	Anggota DPRD PROP	3
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	7.912	Anggota DPRD Kab/Kota	11
TNI	572	Dosen	253
POLRI	805	Guru	1.757
Perdagangan	121	Pengacara	23
Petani/Pekebun	82.027	Notaris	10
Peternak	37	Arsitek	5
Nelayan/Perikanan	7.409	Konsultan	7
Industri	4	Dokter	168
Konstruksi	8	Bidan	262
Transportasi	25	Perawat	393
Karyawan Swasta	5.557	Apoteker	35
Karyawan BUMN	514	Psikiater/Psikolog	3
Karyawan BUMD	113	Penyiar Radio	1
Karyawan Honorer	5.876	Pelaut	90
Buruh Harian Lepas	3.533	Peneliti	1
Buruh Tani/Perkebunan	651	Sopir	1.461
Buruh Nelayan/Perikanan	50	Pedagang	383
Buruh Peternakan	2	Perangkat Desa	157
Pembantu Rumah Tangga	51	Kepala Desa	46
Tukang Cukur	2	Wiraswasta	28.782
Tukang Listrik	6	Anggota Lemb Tinggi Lainnya	12
Tukang Batu	332	Tenaga Tata Usaha	1
Tukang Kayu	468	Tabib	1
Tukang Sol Sepatu	6	Operator	1
Tukang Las/Pandai Besi	30	Teknisi	3
Tukang Jahit	73	Imam Masjid	22
Tukang Gigi	3	Pendeta	294
Penata Rias	8	Pastor	1
Penata Busana	1	Wartawan	19
Juru Masak	1	Ustadz/Mubaligh	11
Mekanik	74	Pekerjaan Lainnya	394
Seniman	5		

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Banggai, 2025

1.3. ORGANISASI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa perangkat daerah kabupaten/kota terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan. Pemerintah Kabupaten Banggai dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai dengan susunan sebagai berikut :

- Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B

- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 - 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Dinas Tipe A;
 - 2. Dinas Kesehatan merupakan Dinas Tipe A;
 - 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Dinas Tipe A;
 - 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan Dinas Tipe A;
 - 5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B;
 - 6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C;
 - 7. Dinas Sosial merupakan Dinas Tipe A;
 - 8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan Dinas Tipe A;
 - 9. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Dinas Tipe A;
 - 10. Dinas Ketahanan Pangan merupakan Dinas Tipe A;
 - 11. Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Tipe A;
 - 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Tipe A;
 - 13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Dinas Tipe A;
 - 14. Dinas Perhubungan merupakan Dinas Tipe B;
 - 15. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan Dinas Tipe A;
 - 16. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan Dinas Tipe B;
 - 17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Tipe B;
 - 18. Dinas Pemuda dan Olah Raga merupakan Dinas Tipe B;
 - 19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Dinas Tipe A;
 - 20. Dinas Perikanan merupakan Dinas Tipe B;
 - 21. Dinas Pariwisata merupakan Dinas Tipe A;
 - 22. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan merupakan Dinas Tipe A;
 - 23. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan Dinas Tipe A;
 - 24. Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan Dinas Tipe A;
- e. Badan Daerah, terdiri dari :
 - 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Badan Tipe A;
 - 2. Badan riset dan Inovasi daerah merupakan Badan Tipe A;

3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan Tipe A;
4. Badan Pendapatan Daerah merupakan Badan Tipe A;
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Badan Tipe A;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Badan Tipe A;
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Badan Tipe A;
- f. Kecamatan, terdiri dari:
 1. Kecamatan Luwuk merupakan Kecamatan Tipe A;
 2. Kecamatan Bunta merupakan Kecamatan Tipe A;
 3. Kecamatan Kintom merupakan Kecamatan Tipe A;
 4. Kecamatan Pagimana merupakan Kecamatan Tipe A;
 5. Kecamatan Batui merupakan Kecamatan Tipe A;
 6. Kecamatan Balantak merupakan Kecamatan Tipe A;
 7. Kecamatan Lamala merupakan Kecamatan Tipe A;
 8. Kecamatan Bualemo merupakan Kecamatan Tipe A;
 9. Kecamatan Masama merupakan Kecamatan Tipe A;
 10. Kecamatan Toili merupakan Kecamatan Tipe A;
 11. Kecamatan Luwuk Timur merupakan Kecamatan Tipe A;
 12. Kecamatan Toili Barat merupakan Kecamatan Tipe A;
 13. Kecamatan Balantak Selatan merupakan Kecamatan Tipe A ;
 14. Kecamatan Luwuk Selatan merupakan Kecamatan Tipe A;
 15. Kecamatan Luwuk Utara merupakan Kecamatan Tipe A;
 16. Kecamatan Batui Selatan merupakan Kecamatan Tipe A;
 17. Kecamatan Nuhon merupakan Kecamatan Tipe A;
 18. Kecamatan Moilong merupakan Kecamatan Tipe A;
 19. Kecamatan Simpang Raya merupakan Kecamatan Tipe A;
 20. Kecamatan Lobu merupakan Kecamatan Tipe A;
 21. Kecamatan Mantoh merupakan Kecamatan Tipe A;
 22. Kecamatan Balantak Utara merupakan Kecamatan Tipe A; dan
 23. Kecamatan Nambo merupakan Kecamatan Tipe A;
 24. Kecamatan Toili jaya merupakan Kecamatan Tipe A.

Dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Banggai didukung oleh Aparatur Sipil Negara.

Jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai sebanyak 5.782 PNS dan 3.835 PPPK, yang dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 1.5
Kondisi ASN Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2025

GOLONGAN	WANITA	PRIA	JUMLAH
PNS			
I/a		1	1
I/b	1	3	4
I/c		6	6
I/d	1	3	4
Total	2	13	15
II/a	3	17	20
II/b	21	49	70
II/c	94	111	205
II/d	98	128	226
Total	216	305	521
III/a	474	305	779
III/b	599	342	941
III/c	529	320	849
III/d	875	546	1.421
Total	2.477	1.513	3.990
IV/a	312	226	538
IV/b	282	226	508
IV/c	107	100	207
IV/d	1	2	3
Total	702	554	1.256
PPPK			
X	95	30	125
IX	1.712	707	2.419
VII	685	141	826
V	234	227	461
III	-	4	4
Total	2.726	1.109	3.835
PNS DAN PPPK TOTAL	5.555	3.494	9.617

Sumber : BKPSDM Kab.Banggai, 2025

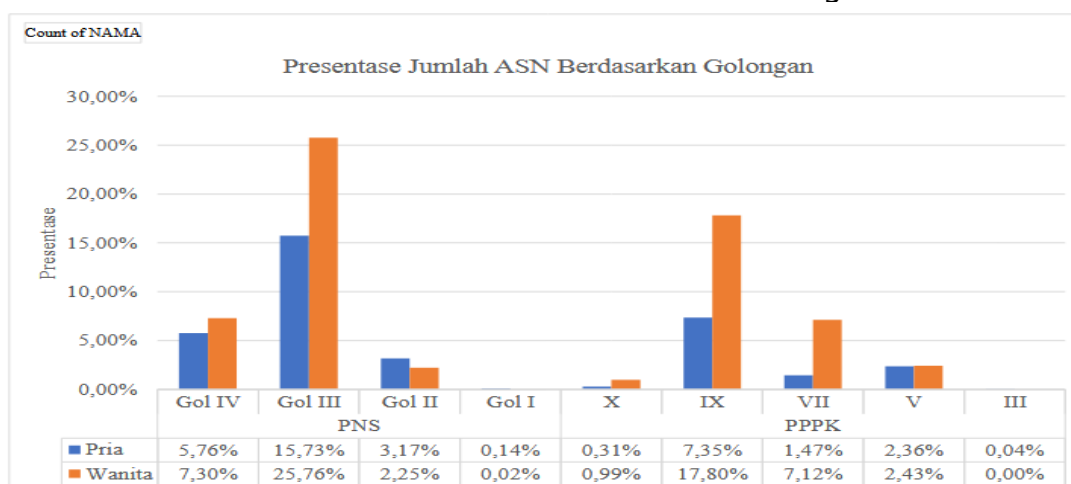
Tabel 1.6
Kondisi ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

JENIS ASN	PENDIDIKAN	WANITA	PRIA	JUMLAH
PNS	S-3/Doktor	-	1	1
	S-2	160	140	300
	D IV/S-1	2.387	1.562	3.949
	DIPLOMA	474	178	652

	SLTA	374	485	859
	SLTP	2	14	16
	SEKOLAH DASAR	-	5	5
PNS Total		3.397	2.385	5.782
PPPK	S-2	90	29	119
	D IV/ S-1	1717	708	2425
	DIPLOMA	685	141	826
	SLTA	234	227	461
	SLTP	4	-	4
PPPK Total		2.726	1.109	3.835
Jumlah PNS dan PPPK		6.123	3.494	9.617

Sumber : BKPSDM Kab.Banggai, 2025

Grafik 1.2
Presentase Jumlah ASN Berdasarkan Golongan



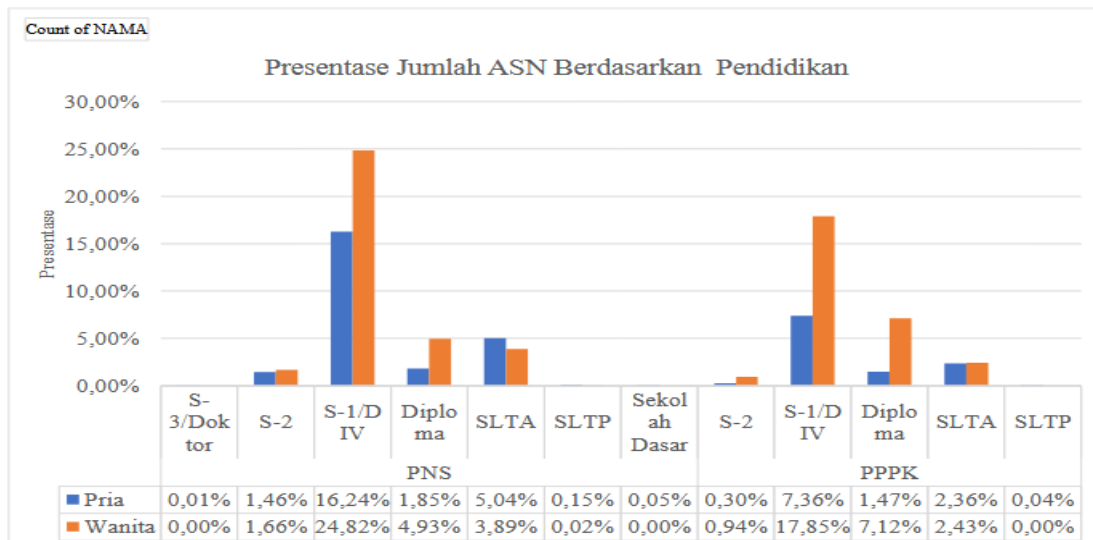
Sumber : BKPSDM Kab.Banggai, 2025

Tabel 1.7
Kondisi ASN Berdasarkan Jenis Jabatan Tahun 2025

JENIS ASN	JABATAN	WANITA	PRIA	JUMLAH
PNS	Jabatan Fungsional	2415	1165	3580
	Jabatan Pelaksana	707	770	1486
	Jabatan Struktural	275	441	716
PNS Total		3397	2385	5782
PPPK	Jabatan Fungsional	2156	765	2921
	Jabatan Pelaksana	570	344	914
PPPK Total		2726	1109	3835
JUMLAH		6123	3494	9617

Sumber : BKPSDM Kab.Banggai, 2025

Grafik 1.3
Presentase Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan



Sumber : BKPSDM Kab.Banggai, 2025

1.4. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) kedepannya. Adapun isu strategis atau permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Banggai pada tahun 2025 yang juga tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, maka isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Banggai sebagai berikut :

1. Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia
2. Pembangunan ekonomi inklusif
3. Sarana prsarana konektivitas dan pelayanan dasar
4. Kesenjangan Pembangunan antar wilayah
5. Ketahanan social dan budaya
6. Pengelolaan potensi sumber daya alam dan ketahanan pangan daerah
7. Infrastruktur TIK dan transformasi digital
8. Penataan ruang, ketahanan ekologi, adaptasi dan mitigasi bencana
9. Tata Kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik

1.5. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menyampaikan secara ringkas tentang latar belakang disusunnya laporan kinerja, gambaran umum daerah, organisasi, sumber daya manusia, isu-isu strategis, dan sistematika laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menjelaskan secara ringkas tentang visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja, perjanjian kinerja, rencana kerja dan anggaran.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini menyajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2025, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

Bab IV Penutup

Menyampaikan simpulan atas capaian kinerja, kendala dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien serta akuntabel (*Good Governance*), Pemerintah Kabupaten Banggai dalam melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyusun dokumen perencanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yang telah ditetapkan dalam Peraturan daerah kabupaten Banggai Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai memuat arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Banggai yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1. Visi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026, Visi Kabupaten Banggai tahun 2021-2026 sebagai berikut:

***"TERWUJUDNYA BANGGAI MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA
BERBASIS KEARIFAN LOKAL"***

Penjabaran Visi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

Kabupaten Banggai, adalah kesatuan wilayah dan masyarakat Kabupaten yang terbentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959, termasuk sarana dan prasarana, kelembagaan serta potensi sumber daya alam dan lingkungan alamiah. Sebagai daerah otonom, maka Kabupaten Banggai adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah geografis yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Daerah menunjukkan suatu kesatuan pemerintah dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimiliki.

Banggai Maju, di maknakan sebagai tingkat pencapaian pembangunan daerah Kabupaten Banggai yang di ukur berdasarkan indikator sosial ekonomi,

budaya dan politik. Dari indikator sosial, kemajuan daerah di ukur dari kualitas sumber daya manusianya, di katakan makin maju apabila sumber daya manusianya Berkepribadian Bangsa, berahlak mulia dan berkualitas pendidikan yang tinggi yang tercermin dalam produktivitas yang tinggi. Daerah yang maju di tandai dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, derajat kesehatan yang lebih baik, angka harapan hidup yang lebih tinggi, dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik.

Berdasarkan indikator ekonomi, kemajuan daerah di ukur berdasarkan tingkat pendapatan rata – rata masyarakatnya dan distribusi/kontribusi sektor terhadap pembentukan *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) nya. Daerah maju pada umumnya ditandai dengan telah berkembangnya sektor industri dan sektor jasa.

Guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah, investasi digerakan untuk menjadi sumber utama pembangunan di Kabupaten Banggai. Bermodalkan keunggulan kompetitif di bidang pertanian, kelautan, industri dan pertambangan, hendaknya dimanage dengan baik untuk menjadi daya tarik investasi. Iklim Investasi yang kondusif, reformasi birokrasi, pelayanan perizinan dan kondisi ketersediaan infrastruktur pendukung ekonomi seperti sarana prasarana transportasi yang mendukung aksesibilitas daerah, telekomunikasi, ketenagalistrikan, arahan tata ruang yang mendukung kegiatan industri dan perdagangan serta situasi keamanan dan ketertiban daerah menjadi prasyarat yang harus disiapkan/dibenahi oleh pemerintah daerah guna menarik investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Banggai, dibarengi dengan optimalisasi dan pendayagunaan Jaringan promosi, informasi potensi dan peluang investasi dan perdagangan yang ada di daerah.

Investasi yang dikembangkan hendaknya mampu untuk menciptakan lapangan kerja, menanggulangi kemiskinan yang keseluruhannya diarahkan pada sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai, olehnya itu penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi juga mutlak di lakukan.

Kemajuan daerah juga dimaknakan sebagai kemampuan untuk mewujudkan kualitas pelayanan diberbagai bidang kehidupan masyarakat, dari segi daya dukung sumber daya manusia yang cerdas dan sehat, terampil dan profesional, ekonomi daerah yang berdaya saing, ketersediaan infrastruktur wilayah yang dapat diakses secara luas dan merata serta manajemen pelayan publik yang efektif , efisien dan

memberi dampak bagi berdayanya fungsi – fungsi ekonomi, politik, hukum dan pemerintahan, sosial, budaya dan kehidupan keagamaan.

Makna Visi Banggai Maju ini di tandai oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatnya PDRB/Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, pendapatan perkapita serta inflasi stabil dan terkendali.
2. Investasi yang masuk kedaerah meningkat.
3. Menurunnya kesenjangan pembangunan antar wilayah, dengan bertambahnya Desa yang berstatus maju dan mandiri.
4. Ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata.
5. Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata, perdagangan, industri pengolahan, pertambangan dan penggalian dalam pembentukan PDRB meningkat.
6. Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi meningkat.

Banggai Mandiri, dimaknakan sebagai suatu kondisi dimana Kabupaten Banggai mampu mewujudkan kehidupan yang lebih baik, sejahtera dan berkualitas, yang sejajar dan sederajat dengan daerah lainnya yang telah maju, dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Atau dengan kata lain kemandirian daerah adalah kemampuan untuk mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lainnya dengan mengandalkan pada prakarsa, kemampuan dan kekuatan sumber daya manusia yang berkualitas, dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan daerahnya sendiri. Makna kemandirian diartikan sebagai optimalisasi sumber – sumber pendapatan asli daerah, yang dapat dilihat pada meningkatnya kontribusi/proporsi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Atau dengan kata lain berkurangnya tingkat ketergantungan fiskal terhadap dana transfer kedaerah oleh pemerintah pusat, melalui kemandirian keuangan daerah.

Makna Visi Banggai Mandiri ini di tandai oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah meningkat signifikan melalui optimalisasi, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber pendapatan daerah.
2. Kapasitas Fiskal Daerah meningkat signifikan, dengan mengoptimalkan Dana Transfer Kedaerah dan Dana Desa.

Banggai Sejahtera, di maknakan sebagai kondisi di mana masyarakat Kabupaten Banggai mampu untuk meningkatkan taraf kehidupan, memperoleh

lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, kebebasan mengemukakan pendapat, menggunakan hak politik, serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum. Daerah yang sejahtera juga di tunjukan oleh berkurangnya kesenjangan antar daerah / wilayah, baik perkotaan dan perdesaan serta daerah terpencil dan terisolir, tersedianya infrastruktur serta terbinanya kekuatan – kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan.

Makna Visi Banggai sejahtera ini di tandai oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia meningkat yang di tunjukan oleh Indeks Pembangunan Manusia, Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender meningkat.
2. Pendapatan masyarakat meningkat di barengi dengan berkurangnya kesenjangan pendapatan antar kelompok.
3. Meningkatnya lapangan kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran berkurang.

Berbasis Kearifan Lokal, dimaksudkan bahwa perwujudan Kabupaten Banggai yang maju, mandiri dan sejahtera harus di dasarkan atau di landasi oleh nilai-nilai kearifan lokal dan budaya masyarakat Kabupaten Banggai (Babasalan). Kearifan lokal adalah suatu gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat berupa sikap, nilai-nilai, etika, cara-cara, perilaku, kepercayaan, keyakinan, adat istiadat, hukum adat, pandangan, kemampuan, dan pengetahuan dari komunitas atau masyarakat lokal untuk mengelola lingkungan hidup, tradisi, dan budaya setempat. Kearifan lokal berkaitan dengan makna visi lainnya merupakan dasar atau pendekatan untuk pengambilan kebijakan pada level lokal dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengelolaan sumber daya alam dan kegiatan masyarakat pedesaan serta penataan perekonomian daerah, dengan tetap mengacu pada nilai-nilai sosio-kultural masyarakat setempat, yang telah diakui dan dihargai secara turun temurun sebagai sebuah tatanan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kearifan lokal, terkandung pula kearifan budaya lokal. Kearifan budaya lokal sendiri adalah pengetahuan lokal yang sudah sedemikian menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama, tetapi tetap bersendikan agama.

Perwujudan makna visi kearifan lokal dan budaya di maksud di tandai oleh adanya hal – hal sebagai berikut :

1. Aktualisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Penerapan nilai-nilai budaya dan Bahasa daerah dalam muatan lokal di sekolah.
3. Terpeliharanya tradisi dan adat istiadat daerah, yang di tunjukan melalui even atau kegiatan budaya.
4. Terpeliharanya Cagar Budaya Daerah.
5. Harmonisasi dan moderasi kehidupan umat beragama di daerah.

Berdasarkan Visi dan maknanya sebagaimana telah di uraikan di atas, maka target makro daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021–2026 sebagai ukuran keberhasilan pencapaian/perwujudan Visi Daerah selama 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Target Pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati Banggai Terpilih Sesuai Periode
RPJMD Tahun 2021 – 2026

Indikator	Base Line Data (2020*)	Target Akhir RPJMD
Banggai Maju		
1. Pertumbuhan Ekonomi	2,54%	5,99%
2. Pendapatan Perkapita (Juta Rp)	75,76	83,09
3. Tingkat Inflasi	0,83%	2,00%
4. Prosentase Infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah dalam kondisi Baik	NA	80,00%
5. Presentase Desa Maju berdasarkan IDM	26,12%	75,00%
Banggai Mandiri		
6. Kapasitas Fiskal Daerah	Tinggi	Tinggi
7. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	8,06%	13,56%
Banggai Sejahtera		
8. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	7,39%	5,00%
9. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	2,42%	2,18%
10. Gini Rasio	0,308	0,277
11. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,22	73,57
12. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	NA	46,9
Kearifan Lokal		
13. Indeks Kerukunan Beragama	NA	80
14. Indeks Pembangunan Kebudayaan	NA	56,31

Keseluruhan target Visi sebagaimana di atas, hanya dapat di capai dan di laksanakan dengan di dukung oleh pemerintahan daerah yang baik, bersih, transparan dan akuntable melalui pelaksanaan reformasi Birokrasi, sehingga

ukuran keberhasilan perwujudan Reformasi Birokrasi akan menentukan keberhasilan pencapaian Visi RPJMD.

Guna membangkitkan semangat dan pemahaman Bersama dari seluruh stakeholders pembangunan daerah Kabupaten Banggai, Visi kemudian di terjemahkan kedalam motto, slogan ataupun *Tag Line* pembangunan daerah Kabupaten Banggai 2021-2026 yaitu **BANGGAI LEBIH BAIK** atau dalam Bahasa Saluan, Balantak dan Banggai sebagai perwujudan dari kearifan lokal dalam pelaksanaan pembangunan daerah di terjemahkan menjadi **BANGGAI MAIMA, BANGGAI PORE, ATAU BANGGAI MONONDOK.**

Banggai Lebih Baik dapat di terjemahkan sebagai kondisi Kabupaten Banggai yang lebih baik dari sebelumnya yang menunjukkan kondisi lebih Maju, lebih Mandiri dan lebih sejahtera, yang dapat di gambarkan antara lain dalam perwujudan sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia lebih baik
2. Ekonomi Kerakyatan lebih baik
3. Infrastruktur lebih baik
4. Pengelolaan Sumber Daya Alam Lebih Baik
5. Pariwisata dan Budaya Lebih baik
6. Birokrasi Lebih baik

Sebagai landasan kerja dan landasan Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Banggai dalam mencapai Banggai Lebih Baik, Moto yang di gunakan adalah CERDAS yaitu mampu membaca dan memahami apa yang menjadi keluhan dan kebutuhan masyarakat, SANTUN yaitu siap dan ikhlas menerima, menyerap dan menindaklanjuti seluruh kritik, masukan dan aspirasi masyarakat serta RELIGIUS yaitu menggunakan pendekatan Aqidah, Syariah dan Ahlak dalam melakukan setiap tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2.1.2. Misi

Rumusan Misi sebagai penjabaran Visi Bupati dan Wakil Bupati Banggai, yang akan tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banggai 2021-2026, adalah sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Produktif dan Sejahtera.
2. Menciptakan Kemandirian Ekonomi yang Produktif dan Berdaya Saing Melalui Pemanfaatan Teknologi.

3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur serta Penanggulangan Bencana.
4. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan yang Berbasis Lingkungan.
5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya serta Nilai Keagamaan.
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel.



Adapun penjabaran unsur Visi RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2021 – 2026 kedalam Misi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Katerkaitan Pokok – Pokok Visi dengan Misi RPJMD Kabupaten Banggai Periode 2021-2026

Pokok Visi	Misi Terkait	
Banggai Maju	Di terjemahkan dalam Misi ke (1) Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Produktif Dan Sejahtera	Pokok – pokok Visi dan Pelaksanaan misi pembangunan daerah tahun 2021 – 2026 lainnya akan terlaksana dengan baik jika di tunjang oleh tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan Misi ke (6) Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan Yang Bersih, Transparan Dan
	Di terjemahkan dalam Misi ke (2) Menciptakan Kemandirian Ekonomi Yang Produktif Dan Berdaya Saing Melalui Pemanfaatan Teknologi	
	Di terjemahkan dalam Misi ke (3) Mempercepat Pertumbuhan Dan Pemerataan Infrastruktur Serta Penanggulangan Bencana	
	Diterjemahkan dalam Misi ke (4) Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Yang Berbasis Lingkungan	
	Di terjemahkan dalam Misi ke (5)	

	Pengembangan Pariwisata Dan Budaya Serta Nilai Keagamaan	Akuntabel
Banggai Mandiri	Dilaksanakan dalam Misi ke (2) Menciptakan Kemandirian Ekonomi Yang Produktif Dan Berdaya Saing Melalui Pemanfaatan Teknologi.	
	Diterjemahkan dalam Misi ke (4) Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Yang Berbasis Lingkungan	
	Diterjemahkan dalam Misi ke (6) Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan Yang Bersih, Transparan Dan Akuntabel.	
Banggai Sejahtera	Di terjemahkan dalam Misi ke (1) Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas , Produktif Dan Sejahtera.	
	Di terjemahkan dalam Misi ke (2) Menciptakan Kemandirian Ekonomi Yang Produktif Dan Berdaya Saing Melalui Pemanfaatan Teknologi	
	Dilaksanakan dalam Misi ke (3) Mengembangkan sektor Kemaritiman berbasis potensi wilayah	
	Diterjemahkan dalam Misi ke (4) Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Yang Berbasis Lingkungan	
	Di terjemahkan dalam Misi ke (5) Pengembangan Pariwisata Dan Budaya Serta Nilai Keagamaan	
Berbasis Kearifan Lokal	Dilaksanakan dalam Misi ke (5) Pengembangan Pariwisata Dan Budaya Serta Nilai Keagamaan	

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai selama Periode Tahun 2021 - 2026 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Jangka Menengah 2021 – 2026

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Banggai Maju, Mandiri dan Sejahtera Berbasis Kearifan Lokal		
Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Produktif, dan Sejahtera	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera

Misi 2 : Menciptakan Kemandirian Ekonomi yang Produktif dan Berdaya Saing Melalui Pemanfaatan Teknologi	Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Agar Mandiri, Produktif dan Berdaya Saing melalui Pemanfaatan Teknologi, Berbasis Potensi Sumber Daya Alam dan Keunggulan Lokal	1. Meningkatnya Kualitas Perdagangan, Industri Rumah Tangga, Perdagangan, Koperasi dan UMKM serta Pertumbuhan Wirausaha Baru 2. Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Perdesaan
Misi 3 : Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur Serta Penanggulangan Bencana	Percepatan Penyediaan dan Pemerataan Infrastruktur serta Penanggulangan Bencana	1. Tersedianya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas, Layak, dan Merata Untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Konektivitas 2. Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana
Misi 4 : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan yang Berbasis Lingkungan	Peningkatan Perekonomian Daerah melalui Peningkatan Investasi dan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan	1. Meningkatnya Investasi dan Pengelolaan Potensi Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah 2. Meningkatnya Kualitas Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Untuk Kesejahteraan Rakyat
Misi 5 : Pengembangan Pariwisata dan Budaya Serta Nilai Keagamaan	1. Peningkatan Pariwisata Daerah 2. Peningkatan Kebudayaan Babasalan serta Moderasi Beragama	1. Merningkatnya Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah 2. Meningkatnya Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Daerah Melalui Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Babasalan Serta

		Moderasi Beragama
Misi 6 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi di Kabupaten Banggai, untuk Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel

2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Guna mewujudkan visi dan misi, serta tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Banggai, maka di rumuskan strategi, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Banggai tahun 2021-2026. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Arah Kebijakan dalam RPJMD menjelaskan tahapan pembangunan tahunan (milestone) Kabupaten Banggai periode 2021 - 2026.

2.2.1. Strategi Umum Pembangunan Daerah

Dalam upaya pencapaian Visi, Misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2021 - 2026, maka di tetapkan strategi umum sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka responsif dan adaptif, agar mampu memenuhi aspirasi masyarakat. Di harapkan proses reformasi birokrasi bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tidak sekedar merupakan kesibukan dan kebutuhan Pemerintah semata.
2. Membangun dan mengembangkan kemitraaan antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dunia akademik, serta pemangku kepentingan lainnya, agar lebih bersinergi dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini di dasari pemikiran bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan sumber daya finansial di satu sisi,

sedangkan disisi lain terdapat potensi sumberdaya alam yang harus dikelola bersama secara berkelanjutan.

3. Pemantapan demokrasi, kesetaraan, serta perluasan akses dan kapasitas bagi masyarakat untuk meningkatkan derajat dan perannya dalam pembangunan, melalui implementasi keikutsertaan Kabupaten Banggai dalam inisiatif global keterbukaan pemerintah daerah dalam Open Government Partnership (OGP) Local , agar nantinya masyarakat bisa mejadi potensi pembangunan, bukan menjadi beban.
4. Mengembangkan kemandirian desa agar terjadi penyebaran pusat-pusat pertumbuhan, utamanya pusat pertumbuhan kawasan perdesaan. Hal ini dimaksudkan untuk mendekatkan layanan sosial ekonomi masyarakat sehingga pembangunan akan menjadi efektif dan efisien, dan mengurangi biaya masyarakat maupun beban perkotaan.
5. Menjaga prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan utamanya dalam pengelolaan sumber daya alam.
6. Memperkuat upaya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan, memastikan kelompok rentan akan memiliki daya tahan dan kemampuan untuk mengentaskan dirinya dari kemiskinan.
7. Mengedepankan pendekatan Tematik – Holistik, Integratif dan Spasial dalam perumusan program pembangunan daerah serta Money Follow Program sehingga terwujud pemerintahan yang berorientasi hasil melalui Performance Based Budgeting

2.2.2. Strategi dan Arah Kebijakan berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Strategi berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Banggai tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI 1 : MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS, PRODUKTIF DAN SEJAHTERA			
Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten yang Produktif dan Sejahtera	Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar menuju Banggai Cerdas	1. Penuntasan Program pendidikan wajar 9 tahun dan peningkatan wajib belajar 12 tahun. 2. Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) dan

			Penanganan Dewasa Tidak Sekolah (DTS). 3. Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) dan Penanganan Dewasa Tidak Sekolah (DTS). 4. Percepatan Pelaksanaan PAUD Holistik Integratif, Kelas Parenting, Penguatan UKS dan Sanitasi Sekolah, untuk pencegahan stunting. 5. Penerapan Pendidikan budaya dan budi pekerti/karakter di sekolah. 6. Peningkatan kualitas, kuantitas dan kualifikasi akademik pendidik dan tenaga kependidikan, serta sebaran yang merata pada semua satuan Pendidikan dasar. 7. Peningkatan cakupan pelayanan perpustakaan melalui Gerakan literasi masyarakat.
		Meningkatkan akses dan Kualitas Layanan Kesehatan menuju Banggai sehat.	1. Peningkatan ketersediaan fasilitas dan Mutu layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan layanan Rujukan. 2. Peningkatan capaian SPM Kesehatan melalui Digitalisasi Pelayanan. 3. Penyediaan tenaga kesehatan dengan distribusi yang merata hingga ke wilayah terpencil. 4. Peningkatan sediaan farmasi dan alat Kesehatan serta pembinaan dan pengawasan makanan dan minuman. 5. Peningkatan kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat. 6. Peningkatan Status Kesehatan dan Gizi

			Masyarakat. 7. Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi.
		Banggai produktif melalui pengembangan Diklat Vokasional dan Kewirausahaan	1. Peningkatan Pelatihan kerja dan Penyelenggaraan Diklat Vokasional. 2. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja. 3. Peningkatan layanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan kesempatan kerja. 4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan hubungan industrial yang harmonis serta penciptaan iklim ketenagakerjaan yang baik. 5. Fasilitasi Perkembangan usaha rintisan (Start up Company). 6. Fasilitasi Wirausaha Pemuda, Santri, Wirausaha Sosial dan Komunitas.
		Penanggulangan kemiskinan daerah secara terpadu dan lintas sektor, menuju Banggai Sejahtera	1. Validasi Data Penduduk Miskin, rentan miskin serta data penerima penerima bantuan sesuai skema Bansos Adaftif. 2. Sinkronisasi program lintas Perangkat Daerah dalam penanggulangan kemiskinan, melalui Inovasi "Tumis Ikan Teri" (Tuntaskan Kemiskinan melalui kegiatan Terintegrasi). 3. Penyelenggaraan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan. 4. Meningkatkan Kapasitas PSKS dan Kelembagaan Kesos dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

			5. Peningkatan Upaya Pemberdayaan, Perlindungan dan Rehabilitasi Sosia Bagi PMKS. 6. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana (alam dan sosial) pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
		Pengarusutamaan Gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pelayanan Keluarga Berencana guna mewujudkan Keluarga Sejahtera.	1. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi. 2. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan serta Peningkatan pemenuhan hak perempuan dalam ketenagakerjaan. 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG). 4. Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan. 5. Peningkatan Kualitas Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 6. Perwujudan Kabupaten Layak Anak dan Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk Pemenuhan Hak Anak (PHA).
		Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan daerah serta pengembangan olah raga.	1. Peningkatan Kapasitas dan daya saing Kepemudaaan agar dapat partisipasi Aktif dalam pembangunan daerah (Sosial, Politik dan Ekonomi), melalui Fasilitasi Ruang Kreasi positif bagi pemuda termasuk membangun wirausaha muda kreatif. 2. Pencegahan perilaku

			beresiko pada pemuda (bahaya kekerasan, penyalahgunaan NAFZA, Miras dan HIV/AIDS). 3. Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan, Karang Taruna dan Pramuka. 4. Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan melalui pembinaan dan pengembangan olah raga Pendidikan, olah raga prestasi, olah raga rekreasi dan organisasi olah raga. 5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olah raga.
Misi II : Menciptakan Kemandirian Ekonomi Yang Produktif dan Berdaya Saing Melalui Pemanfaatan Teknologi A			
Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Agar Mandiri, Produktif, dan Berdaya Saing Melalui Pemanfaatan Teknologi Berbasis Potensi Sumber Daya Alam dan Keunggulan Lokal	Meningkatnya Kualitas Industri Rumah Tangga, Koperasi dan UMKM Serta Pertumbuhan Wirausaha Baru	Fasilitas Koperasi Generasi Baru yang Maju, Modern serta UMKM Naik Kelas dan Go Digital	1. Pengembangan Koperasi dan UMKM berbasis kewirausahaan dengan pendekatan kelompok, komunitas dan kluster sesuai sentra komoditas dan wilayah. 2. Pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan Koperasi dan UMKM secara lintas sektor dan mengedepankan kemitraan. 3. Modernisasi dan penerapan Inovasi Teknologi pada produk dan jasa Koperasi dan UMKM. 4. Iklim Usaha UMKM yang kondusif. 5. Digitalisasi pemasaran UMKM dan koperasi.
		Mempekuat Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Industri dan Perdagangan	1. Peningkatan tertib usaha perdagangan melalui peningkatan jumlah pasar yang tertib, bersih, indah dan nyaman serta berkontribusi terhadap

			pendapatan asli daerah. 2. Peningkatan stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting 3. Peningkatan nilai ekspor daerah 4. Peningkatan perlindungan konsumen melalui penerapan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang bertanda tera sah 5. Peningkatan jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang berkembang dan mampu mengakses pasar
	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Pedesaan	Meningkatkan Pembangunan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat dalam Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Pedesaan melalui BUMDes	1. Peningkatan pembangunan pedesaan berbasis kawasan dan potensi lokal desa, melalui Kerjasama antar desa. 2. Revitalisasi BUMDes/BUMDes Bersama melalui kebijakan satu BUMDes 500 Juta. 3. Peningkatan Investasi produk unggulan pedesaan/ kawasan pedesaan melalui BUMDes. 4. Peningkatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam meningkatkan usaha produktif masyarakat pedesaan. 5. Pemanfaatan Pekarangan melalui system pertanian terintegrasi di Pedesaan (program satu juta satu pekarangan)
Misi III : Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur Serta Penanggulangan Bencana			
Percepatan	Tersedianya	Meningkatkan	1. Penataan dan

Penyediaan dan Pemerataan Infrastruktur serta Penanggulangan Bencana.	Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berkualitas, Layak dan Merata Untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Konektivitas	kualitas layanan Air Minum dan Perumahan layak di perkotaan dan perdesaan untuk kehidupan masyarakat yang lebih layak dan bermartabat.	peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten. 2. Penyediaan Akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan korban bencana. 3. Penyediaan akses dan peningkatan system penyediaan air minum yang aman melalui jaringan perpipaan di perkotaan maupun perdesaan. 4. Peningkatan kualitas layanan Air Minum perkotaan melalui PDAM.
		Meningkatkan kualitas layanan sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman perkotaan dan perdesaan.	1. Penyediaan Infrastruktur persampahan. 2. Peningkatan dan pengembangan sistem jaringan drainase dan sistem air limbah domestik di perkotaan dan perdesaan. 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sanitasi dan persampahan melalui prinsip reduce, reuse dan recycle.
		Meningkatkan Jaringan jalan, jembatan, sarana dan prasarana transportasi secara merata dan berkualitas untuk konektivitas wilayah	1. Kerjasama penyediaan infrastruktur dengan pihak swasta melalui mekanisme KPBU. 2. Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan yang berkualitas yang menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Banggai. 3. Peningkatan kinerja pelayanan sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, utamanya di wilayah

		terpencil, pedalaman dan daerah rawan bencana. 4. Penyediaan sistem angkutan umum publik dalam kota dan perdesaan yang terpadu dan nyaman. 5. Penyediaan Fasilitas keselamatan lalu lintas jalan. 6. Pengembangan infrastruktur dan layanan angkutan laut/pelayaran untuk mendukung konektivitas dengan Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai Laut dan kepulauan Taliabo.
	Meningkatkan penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat khususnya untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai kewenangan Kab. Banggai.	1. Peningkatan ketersediaan air baku untuk jaringan irigasi dalam mendukung produksi dan produktivitas tanaman pangan. 2. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi.
	Meningkatkan tertib pembangunan bangunan Gedung.	1. Peningkatan layanan IMB dan regulasi bangunan gedung. 2. Penyediaan Fasilitas Pemerintahan untuk peningkatan pelayanan publik.
	Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta ketenagalistrikan sampai ke pelosok desa.	1. Percepatan Implementasi Master Plan pengembangan Teknologi dan Informatika Kabupaten Banggai. 2. Pembangunan Infrastruktur TIK dan system jaringan intra Pemerintah Daerah untuk mendukung transformasi digital. 3. Peningkatan

			kompetensi aparatur di bidang Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK). 4. Peningkatan keterbukaan informasi public dan Literasi TIK masyarakat (Digital society).
	Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana.	Meningkatkan ketahanan bencana daerah melalui koordinasi/ integrasi pemda dan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Daerah.	1. Percepatan penyusunan Kajian Resiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana daerah serta Integrasinya ke dalam perencanaan pembangunan daerah. 2. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, melalui penguatan manajemen bencana berbasis masyarakat dan data Bencana terpadu. 3. Penguatan system peringatan dini bencana. 4. Penguatan system logistik pangan dan jaring pengaman sosial untuk masyarakat terdampak bencana. 5. Pengembangan Desa Tangguh Bencana/Desa Tangguh lawan covid 19. 6. Penguatan system penanggulangan bahaya kebakaran melalui penyiapan sarana dan prasarana, pencegahan dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran.
Misi IV : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Yang Berbasis Lingkungan			
Peningkatan Perekonomian Daerah melalui Peningkatan Investasi dan	Meningkatnya investasi dan pengelolaan potensi Pertanian, Perikanan dan	Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan	1. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B),

Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan	Kelautan serta pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah.	perkebunan.	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Cadangan Pangan Berkelanjutan (LCP2B). 2. Penyediaan benih yang memenuhi prinsip 5T (tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat tempat dan tepat harga). 3. Peningkatan Penyediaan prasarana dan pemanfaatan teknologi pertanian. 4. Penyediaan akses terhadap informasi pasar, sumber permodalan, teknologi, sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan.
		Meningkatkan populasi dan produksi peternakan menuju Banggai swasembada daging	1. Peningkatan ketersediaan dan mutu benih dan bibit ternak. 2. Peningkatan populasi dan produktivitas ternak. 3. Meningkatkan ketersediaan dan produksi pakan ternak. 4. Menjamin produk hewani yang ASUH dan berdaya saing. 5. Peningkatan Pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, kesehatan hewan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit hewan.
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi hasil perikanan dan pemasarannya dalam rangka memenuhi kebutuhan protein yang berasal dari	1. Pengembangan perikanan tangkap dan budidaya melalui pemanfaatan teknologi perikanan, pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil. 2. Peningkatan

		ikan.	infrastruktur perikanan tangkap dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan (air bersih, listrik, BBM, sistem rantai dingin, pelabuhan perikanan). 3. Penyediaan Akses nelayan/pembudidaya ikan terhadap permodalan, teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
		Meningkatkan Ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, aman serta terjangkau bagi masyarakat.	1. Peningkatan Infrastruktur pangan, diversifikasi dan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan serta pengawasan keamanan pangan. 2. Implementasi Perda Lahan Pangan Berkelanjutan. 3. Pemanfaatan Lahan pekarangan melalui implementasi Inovasi satu juta satu pekarangan.
		Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kesejahteraan Petani/Peternak dan Nelayan.	1. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan pertanian/ perkebunan. 2. Peningkatan peran dan fungsi Kelembagaan Peternak. 3. Peningkatan Pembinaan Kelompok Nelayan dan pembudidaya ikan.
		Pengembangan dan pemanfaatan Potensi pertambangan (Mineral, Minyak dan Gas) untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1. Pengembangan sistem pola Kerjasama antara pemerintah dan perusahaan industri minyak & gas, melalui pembentukan/revitalisasi dan pemberdayaan BUMD. 2. Percepatan pembangunan usaha industri minyak & gas daerah dengan

			melakukan Kerjasama antara pemerintah dan perusahaan industri minyak & gas. 3. Peningkatan Kerjasama Pendidikan antara pemerintah dan perusahaan industri minyak & gas untuk meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Banggai yang dapat diserap menjadi tenaga kerja industri minyak & gas. 4. Re-negosiasi antara pemerintah dan perusahaan industri minyak & gas untuk meningkatkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih menguntungkan bagi masyarakat Kabupaten Banggai. 5. Percepatan pembangunan Jaringan Gas (City Gas) melalui Kerjasama antara pemerintah dan perusahaan industri minyak & gas.
		Meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing.	1. Peningkatan peluang dan potensi serta promosi investasi/penanaman modal di daerah, berbasis potensi lokal. 2. Peningkatan kualitas pelayanan Penanaman modal. 3. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah daerah dan dunia usaha/swasta. 4. Peningkatan kemitraan antara PMA dan PMD dengan UKM Lokal.

	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Untuk Kesejahteraan Rakyat.	Meningkatkan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan SDA dan Lingkungan Hidup.	1. Penguatan kelembagaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang SDA dan LH. 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. 3. Peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. 4. Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Keanekaragaman hayati. 5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui pembangunan rendah karbon. 6. Pengelolaan sampah perkotaan berbasis masyarakat dengan pendekatan Reduce, Reuse dan Recycle.
		Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang Daerah dan pertanahan.	1. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012 – 2032 dan rencana rincinya. 2. Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah. 3. Pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 4. Pengurangan jumlah sengketa, konflik dan perkara tata ruang dan pertanahan.
Misi V : Pengembangan Pariwisata dan Budaya Serta Nilai Keagamaan			
Peningkatan Pariwisata Daerah	Meningkatnya Pariwisata Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian	Meningkatkan upaya pengembangan destinasi , industry, promosi	1. Pengembangan 4 destinasi pariwisata prioritas. 2. Pengembangan pemasaran pariwisata.

	Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah	dan kelembagaan pariwisata daerah.	3. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi kreatif. 4. Pengembangan kelembagaan pariwisata dan masyarakat sadar wisata.
Peningkatan Kebudayaan Daerah serta Moderasi Beragama	Meningkatnya Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Daerah Melalui Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Babasalan serta Moderasi Beragama	Meningkatkan Pemajuan dan pelestarian Kebudayaan Banggai, Balantak, Saluan dan Andio.	1. Revitalisasi dan reaktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal Babasalan. 2. Pengembangan seni dan budaya Babasalan 3. Pemanfaatan kekayaan Budaya Babasalan untuk kesejahteraan rakyat banggai melalui pengembangan Pariwisata Budaya. 4. Pelestarian serta pengelolaan Cagar Budaya dan Museum Daerah.
		Pengarusutamaan Moderasi Beragama (Wasathiyyah) sebagai karakter beragama masyarakat Kabupaten Banggai.	1. Peningkatan wawasan kebangsaan dan pembinaan idiologi Pancasila di tengah masyarakat. 2. Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama. 3. Pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan.
Misi VI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel			
Peningkatan Kualitas Reformasi di Kabupaten Banggai untuk terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya indeks reformasi birokrasi Kabupaten Banggai.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK.	1. Peningkatan kemudahan perizinan dan investasi serta kemudahan berusaha. 2. Peningkatan kualitas dan cakupan layanan administrasi kependudukan. 3. Peningkatan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 4. Modernisasi/Digitalisasi system dan manajemen pelayanan

			publik. 5. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Perangkat Daerah pengampu SPM. 6. Peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
		Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah.	1. Banggai Inovatif 2. Penguatan Kembali Laboratorium Inovasi Daerah

Tabel 2.5
Arah Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai
Tahun 2021-2026

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH				
2022	2023	2024	2025	2026
▪ Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai melalui percepatan perwujudan Banggai Sehat, Cerdas, Produktif dan sejahtera	• Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai melalui percepatan perwujudan Banggai Sehat, Cerdas, Produktif dan sejahtera	• Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai melalui perwujudan Banggai Sehat, Cerdas, Produktif dan sejahtera	• Pemantapan Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai melalui perwujudan Banggai Sehat, Cerdas, Produktif dan sejahtera	• Perwujudan Banggai Sehat, Cerdas, Produktif dan sejahtera
• Percepatan transformasi ekonomi kerakyatan (koperasi dan UMKM) menuju ekonomi digital	• Peningkatan transformasi ekonomi kerakyatan (koperasi dan UMKM) menuju ekonomi digital	• Peningkatan transformasi ekonomi kerakyatan (koperasi dan UMKM) menuju ekonomi digital	• Pemantapan transformasi ekonomi kerakyatan (koperasi dan UMKM) menuju ekonomi digital	• Perwujudan transformasi ekonomi kerakyatan (koperasi dan UMKM) menuju ekonomi digital
• Pemenuhan infrastruktur dasar yang mendesak di butuhkan masyarakat dan infrastruktur konektivitas	• Pemenuhan infrastruktur dasar yang mendesak di butuhkan masyarakat dan infrastruktur konektivitas	• Penuntasan infrastruktur dasar yang mendesak di butuhkan masyarakat dan infrastruktur konektivitas	• Penuntasan infrastruktur dasar yang mendesak di butuhkan masyarakat dan infrastruktur konektivitas	• Perwujudan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur konektivitas pada lokasi prioritas

pada lokasi prioritas	pada lokasi prioritas	pada lokasi prioritas	pada lokasi prioritas	
• Peningkatan produksi pertanian, kelautan dan perikanan serta implementasi program satu juta satu pekarangan	• Peningkatan produksi pertanian, kelautan dan perikanan serta implementasi program satu juta satu pekarangan	• Peningkatan produksi pertanian, kelautan dan perikanan serta implementasi program satu juta satu pekarangan	• Peningkatan produksi pertanian, kelautan dan perikanan serta implementasi program satu juta satu pekarangan	• Peningkatan produksi pertanian, kelautan dan perikanan serta implementasi program satu juta satu pekarangan
• Persiapan investasi sektor pertambangan daerah	• Percepatan investasi sektor pertambangan daerah	• Percepatan investasi sektor pertambangan daerah	• Pemantapan investasi sektor pertambangan daerah	• Perwujudan investasi sektor pertambangan daerah
• Peningkatan Kualitas LH, Revisi RTRW &Peningkatan Ketahanan Bencana Daerah	• Peningkatan Kualitas LH, Revisi RTRW &Peningkatan Ketahanan Bencana Daerah	• Peningkatan Kualitas LH, Revisi RTRW &Peningkatan Ketahanan Bencana Daerah	• Pemantapan Kualitas LH, Revisi RTRW &Peningkatan Ketahanan Bencana Daerah	• Pemantapan Kualitas LH, Revisi RTRW &Peningkatan Ketahanan Bencana Daerah
• Penataan 2 (dua) destinasi pariwisata prioritas, Pelestarian budaya daerah dan moderasi beragama.	• Penataan 2 (dua) destinasi pariwisata prioritas, Pelestarian budaya daerah dan moderasi beragama	• Penataan 4 (empat) destinasi pariwisata prioritas, Pelestarian budaya daerah dan moderasi beragama	• Penataan 4 (empat) destinasi pariwisata prioritas, Pelestarian budaya daerah dan moderasi beragama.	• Penataan 4 (empat) destinasi pariwisata prioritas, Pelestarian budaya daerah dan moderasi beragama.
• Penguatan Reformasi Birokrasi	• Penguatan Reformasi Birokrasi	• Penguatan Reformasi Birokrasi	• Pemantapan Reformasi Birokrasi	• Perwujudan Reformasi Birokrasi Kelas Dunia

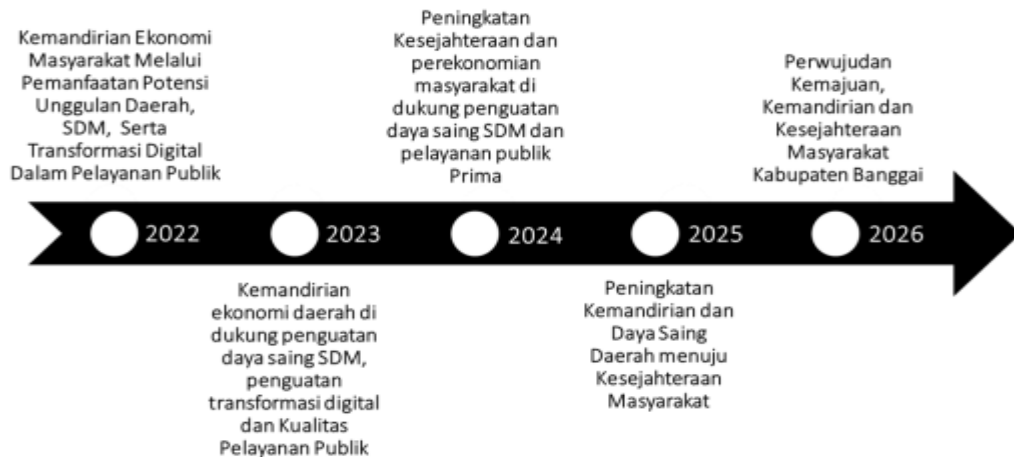
Arah kebijakan di atas merupakan target indikatif menuju tercapainya Visi Pembangunan RPJMD Kabupaten Banggai di akhir periode perencanaan tahun 2026. Secara teknokratik, arah kebijakan tahunan ini sinergis dengan tema rencana Pembangunan Tahunan (RKPD) setiap tahun berkenaan. Selain itu, arah kebijakan tahunan ini juga disesuaikan dengan tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta Tema Pembangunan Tahunan RKPD Propinsi Sulawesi Tengah.

Keselaran Tema, Fokus dan Arah Kebijakan baik secara vertical maupun horizontal akan menjamin keserasian pembangunan antarlevel maupun antar daerah.

Tematik dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Banggai secara indikatif dapat di lihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1

Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 - 2026



2.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021-2026

Prioritas pembangunan daerah merupakan implementasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah. BANGGAI LEBIH BAIK akan di wujudkan melalui (delapan) prioritas pembangunan daerah, yaitu :

Gambar 2.2

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 - 2026



1. Pembangunan Manusias Berkualitas dan Berdaya Saing

Untuk mewujudkan prioritas daerah ini di rumuskan program unggulan, yakni sebagai berikut :

a. Banggai Cerdas



Banggai Cerdas di maksudkan sebagai upaya pemerintah Kabupaten Banggai untuk mewujudkan pendidikan gratis dan berkualitas di Kabupaten Banggai, agar tercipta peserta didik dengan dasar kecerdasan dan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan siap mengikuti pendidikan lebih lanjut. Ruang lingkup Banggai Cerdas selain PAUD, pendidikan dasar, juga mencakup fasilitasi terhadap pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi.

c. Banggai Sejahtera



Banggai Sejahtera di maksudkan sebagai upaya pemerintah kabupaten banggai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi multi sektor. Penanggulangan kemiskinan di lakukan melalui inovasi "Tumis Ikan Teri" = tuntaskan kemiskinan melalui kegiatan terintegrasi

e. Banggai Youthpreneur



Banggai Youthpreneur Merupakan Upaya Pemerintah Kabupaten Banggai Untuk Menggali Dan Mengembangkan Potensi Dan Kemandirian Pemuda Untuk Berwirausaha. Kegiatan Ini Di Lakukan Dalam Bentuk Pelatihan, Pembinaan, Pendampingan Maupun Bantuan Modal Usaha.

b. Banggai Sehat



Banggai Sehat di maksudkan sebagai upaya pemerintah Kabupaten Banggai untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan di semua fasilitas kesehatan yang ada. Fokus Banggai Sehat di arahkan pada pelayanan kesehatan ibu, bayi dan anak, penanggulangan stunting terintegrasi, PHBS, jaminan kesehatan dan kualitas layanan rumah sakit rujukan

d. Banggai Produktif



Banggai Produktif Di Maksudkan Sebagai Upaya Pemerintah Kabupaten Banggai Untuk Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja, Penyiapan Tenaga Kerja Yang Terintegrasi Dengan Kebutuhan Industri. Serta Penyiapan Wirausaha Mandiri, Untuk Mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka. Kegiatan Yang Di Lakukan Dalam Bentuk Pendidikan, Pelatihan, Pembinaan Dan Pembimbingan

2. Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi, Keunggulan Lokal dan Pemanfaatan Teknologi

Untuk mewujudkan prioritas daerah ini di rumuskan program unggulan, yakni sebagai berikut :

a. Banggai Berdaya



Banggai Berdaya di maksudkan sebagai upaya Pemerintah Kabupaten

Banggai untuk memperkuat ekonomi produktif/ kerakyatan dengan berbasis UMKM, Koperasi Dan Ekonomi Kreatif. Pemberdayaan/ Penguatan di maksud di lakukan melalui pelatihan, pembinaan, pembimbingan, pendampingan serta pemberian bantuan modal

b. Banggai Desapreneur



Banggai Desapreneur merupakan upaya pemerintah Kabupaten

Banggai untuk mendorong kemandirian ekonomi perdesaan, melalui penguatan kapasitas pemerintah desa dan revitalisasi peran BUMDesa serta Inovasi Desa. Banggai Desapreneur akan di dukung oleh program satu juta satu pekarangan dan satu BUMDes Rp.500 juta

c. Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Untuk mewujudkan prioritas daerah ini di rumuskan program unggulan, yakni sebagai berikut :

Banggai Akses



Banggai Akses merupakan upaya pemerintah Kabupaten Banggai untuk mempercepat pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar yaitu air bersih, rumah layak huni dan sanitasi layak, serta infrastruktur wilayah yaitu jalan, jembatan, infrastruktur perhubungan, telekomunikasi dan ketenagalistrikan (Banggai Terang). Banggai Akses juga di harapkan dapat mengatasi kesenjangan/ketimpangan wilayah.

d. Ketahanan Pangan

Untuk mewujudkan prioritas daerah ini di rumuskan program unggulan, yakni sebagai berikut :

Banggai Swasembada Pangan



Banggai Swasembada Pangan merupakan upaya pemerintah Kabupaten Banggai untuk meningkatkan produksi dan produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas pangan yang beragam, bergizi dan seimbang, dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dan gizi Masyarakat

e. Investasi Daerah di Sektor Pertambangan

Banggai Investment



Banggai Invesment merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Banggai untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di daerah melalui iklim investasi yang kondusif, kemudahan berusaha, serta investasi pengelolaan keunggulan daerah melalui revitalisasi BUMD dan kerjasama usaha dengan perusahaan multinasional/ internasional

f. Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Ketahanan Bencana Daerah.

Prioritas daerah ini di arahkan untuk mewujudkan ketahanan/kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. Selain itu di maksudkan sebagai kemampuan daerah untuk menangani pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta dampak perubahan iklim, melalui pemanfaatan ruang sesuai arahan tata ruang

g. Pariwisata, Kebudayaan Daerah dan Moderasi Beragama

Untuk mewujudkan prioritas daerah ini di rumuskan program unggulan, yakni sebagai berikut :

Banggai Cultural Heritage



Banggai Cultural Heritage merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Banggai untuk menjadikan Banggai sebagai pusat kebudayaan dan sentra promosi budaya, sekaligus sebagai atraksi budaya dalam destinasi pariwisata. Kegiatan ini dilakukan secara kolaboratif dengan Kabupaten Banggai Laut dan Banggai Kepulauan

h. Penguatan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan prioritas daerah ini di rumuskan program unggulan, yakni sebagai berikut :

Banggai Amanah



Banggai Amanah merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Banggai dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel melalui perbaikan pada delapan area perubahan reformasi birokrasi. Banggai Amanah juga merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan dalam pencapaian suatu tujuan (jangka menengah lima tahun) dan sasaran strategis (jangka pendek tahunan) organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Banggai 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banggai

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
		2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
		3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
		4. Angka Kemiskinan
		5. Gini Rasio
2	Meningkatnya Kualitas Perdagangan, Industri Rumah Tangga, Koperasi dan UMKM serta Pertumbuhan Wirausaha Baru	Kontribusi Usaha Perdagangan, Koperasi, UMKM dan IKM terhadap PDRB
3	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Perdesaan	Persentase Desa Maju Berdasarkan IDM
4	Tersedianya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas, Layak dan Merata untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Konektivitas	Persentase Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Wilayah dalam Kondisi Baik
5	Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah
6	Meningkatnya Investasi dan Pengelolaan Potensi Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah	1. Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan dan Pertambangan Terhadap PDRB
		2. Indeks Ketahanan Pangan
7	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim untuk Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
8	Meningkatnya Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB

	Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah	
9	Meningkatnya Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Daerah Melalui Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Babasalan serta Moderasi Beragama	Indeks Pembangunan Kebudayaan
10	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Inovasi Daerah dan Nilai SAKIP Kabupaten Banggai	1. Indeks Reformasi Birokrasi
		2. Indeks Inovasi Daerah
		3. Nilai SAKIP

2.5. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Banggai ditetapkan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, sasaran yang hendak dicapai dengan target indikator *output* dan atau *outcome*.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur

Adapun wujud dari Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2025 berdasarkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Banggai tahun 2021-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam rencana strategis pada RPJMD dan sesuai dengan RKPD Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,10
		2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	46,5
		3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,22%
		4. Angka Kemiskinan	5,43%
		5. Gini Rasio	0,282
2	Meningkatnya Kualitas Perdagangan, Industri Rumah Tangga, Koperasi dan UMKM serta Pertumbuhan Wirausaha Baru	Kontribusi Usaha Perdagangan, Koperasi, UMKM dan IKM terhadap PDRB	5,2%
3	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Perdesaan	Persentase Desa Maju Berdasarkan IDM	72,50%
4	Tersedianya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas, Layak dan Merata untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Konektivitas	Persentase Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Wilayah dalam Kondisi Baik	78,00%
5	Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Rendah
6	Meningkatnya Investasi dan Pengelolaan Potensi Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah	3. Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan dan Pertambangan Terhadap PDRB	35,30%
		4. Indeks Ketahanan Pangan	89,53
7	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim untuk Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	82,818
8	Meningkatnya Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	2,92%

9	Meningkatnya Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Daerah Melalui Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Babasalan serta Moderasi Beragama	Indeks Pembangunan Kebudayaan	54,26
10	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Inovasi Daerah dan Nilai SAKIP Kabupaten Banggai	4. Indeks Reformasi Birokrasi	BB
		5. Indeks Inovasi Daerah	Sangat inovatif/Terinovatif
		6. Nilai SAKIP	AA

2.6. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2025 tersebut, Pemerintah Kabupaten Banggai melaksanakan program-program dengan pagu anggarannya sesuai dengan Perubahan Anggaran APBD sebesar Rp. 3.316.105.440.115,00.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya di capai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang di harapkan. Kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Bupati Banggai Tahun 2025 pada seluruh sasaran strategis.

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran di gunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1
Kriteria Penilaian Pencapaian Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	> 90% - 100%	Sangat Memuaskan
2	> 80% - 90%	Memuaskan
3	> 70% - 80%	Sangat Baik
4	> 60% - 70%	Baik
5	> 50% - 60%	Cukup
6	> 30% - 50%	Kurang
7	0% - 30%	Sangat Kurang

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Persentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian sasaran strategi Kerja Kabupaten Banggai dan sebab-sebab tercapai dan tidaknya kinerja yang diharapkan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran serta indikator sasaran.

Untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas per sasaran di gunakan rumus sebagai berikut :

1. Efisiensi = % Rata-rata capaian kinerja - % Realisasi anggaran
2. Efektivitas = (% Rata-rata capaian kinerja/% Realisasi anggaran) x 100%

Efisiensi dan efektivitas baru dihitung apabila capaian kinerja $\geq 100\%$ Pengukuran terhadap kinerja selain dari capaian kinerja juga dari efisiensi dan efektivitas sumber daya, efisiensi diukur dengan persentase dari selisih rata-rata capaian kinerja dengan % realisasi anggaran, sedangkan efektivitas adalah dengan mengukur jumlah dari capaian kinerja dengan efisiensi anggaran.

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026. Dalam RPJMD terdapat 6 (enam) Misi, 7 (Tujuh) Tujuan dan 10 (sepuluh) Sasaran, dengan 17 (tujuh belas) Indikator sasaran. **Misi I** terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 5 indikator kinerja, **Misi II** terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 2 indikator kinerja, **Misi III** terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 2 indikator kinerja, **Misi IV** terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 3 indikator kinerja, **Misi V** terdapat 2 tujuan, 2 sasaran dan 2 indikator kinerja dan **Misi VI** terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 3 indikator kinerja.

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2025

Misi 1 Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Produktif, dan Sejahtera					
Tujuan Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera					
Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,10	73,44	100,47	Sangat Memuaskan
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	46,5	76,96*	165,51	Sangat Memuaskan
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,22%	3,07	61,71	Baik
4	Angka Kemiskinan	5,43	6,23	85,27	Memuaskan
5	Gini Rasio	0,282	0,316*	87,94	Memuaskan
Misi 2 Menciptakan Kemandirian Ekonomi yang Produktif dan Berdaya Saing Melalui Pemanfaatan Teknologi					
Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Agar Mandiri, Produktif Dan Berdaya Saing melalui Pemanfaatan Teknologi, Berbasis Potensi Sumber Daya Alam dan Keunggulan Lokal					
Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Perdagangan, Industri Rumah Tangga, Perdagangan, Koperasi dan UMKM serta Pertumbuhan Wirausaha Baru					
1	Kontribusi Usaha Perdagangan, Koperasi, UMKM dan IKM terhadap PDRB	5,2%	5,17	99,42%	Sangat Memuaskan
Sasaran Strategis Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Perdesaan					
1	Persentase Desa Maju Berdasarkan IDM	72,50%	47,08%	64,94%	Baik
Misi 3 Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur Serta Penanggulangan Bencana					
Tujuan Percepatan Penyediaan dan Pemerataan Infrastruktur serta Penanggulangan Bencana					
Sasaran Strategis Tersedianya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas, Layak dan Merata Untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Konektivitas					
1	Persentase Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Wilayah Dalam Kondisi Baik	78,00%	76,57%	98,17%	Sangat Memuaskan
Sasaran Strategis Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana					
1	Indeks Ketahanan Daerah	Rendah	Rendah	100%	Sangat Memuaskan
Misi 4 Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan yang Berbasis Lingkungan					
Tujuan Peningkatan Perekonomian Daerah melalui Peningkatan Investasi dan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan					
Sasaran Strategis Meningkatnya Investasi dan Pengelolaan Potensi Pertanian, perikanan dan Kelautan serta Pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah					
1	Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan dan pertambangan Terhadap PDRB	35,30%	45,44	128,73	Sangat Memuaskan
2	Indeks Ketahanan Pangan	89,53	76,35	85,28	Memuaskan
Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan pengendalian Dampak Perubahan Iklim untuk Kesejahteraan Rakyat					

1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	82,818	86,60	104,56	Sangat Memuaskan
Misi 5 Pengembangan Pariwisata dan BUdaya Serta Nilai Keagamaan					
Tujuan Peningkatan Pariwisata Daerah					
Sasaran Strategis Meningkatnya Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah					
1	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	2,92%	0,33	11,30	Sangat Kurang
Tujuan Peningkatan Kebudayaan Babasalan serta Moderasi Beragama					
Sasaran Strategis Meningkatnya Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Daerah Melalui Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Babasalan serta Moderasi Beragama					
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	54,26	27,74	51,12	Cukup
Misi 6 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan dan Akuntabel					
Tujuan Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi di Kabupaten Banggai, untuk Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel					
Sasaran Strategis Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Inovasi Daerah dan Nilai SAKIP					
1	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB*	100,00	Sangat Memuaskan
2	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100,00	Sangat Memuaskan
3	Nilai SAKIP	AA	BB	83,20	Memuaskan

Keterangan :

*: Realisasi menggunakan hasil sementara berdasarkan portal RB kemenPANRB, per Februari 2026

Tabel 3.3
Rekap Pencapaian Indikator Sasaran

Misi	Jumlah Tujuan	Jumlah Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Indikator Sasaran
Misi 1	1	1	5	SM=2, M=2, SB=0, B=1, C=0, K=0, SK=0
Misi 2	1	2	2	SM=1, M=0, SB=0, B=1, C=0, K=0, SK=0
Misi 3	1	2	2	SM=2, M=0, SB=0, B=0, C=0, K=0, SK=0
Misi 4	1	2	3	SM=2, M=1, SB=0, B=0, C=0, K=0, SK=0
Misi 5	2	2	2	SM=0, M=0, SB=0, B=0, C=1, K=0, SK=1
Misi 6	1	1	3	SM=2, M=1, SB=0, B=0, C=0, K=0, SK=0

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel diatas dapat diketahui bahwa:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 4 target;
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 3 target; dan

3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 10 target:

Sehingga hasil pengukuran kinerja tersebut dari 17 indikator kinerja utama (IKU) memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 89,84% dengan kategori capaian kinerja “Memuaskan”.

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Evaluasi dan analisa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai sebagaimana yang telah ditetapkan, dapat diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut :

Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera, dengan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 3.4
Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025

	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73,10	73,44	100,47
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	46,5	76,96*	165,51
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,22	3,07	61,71
4	Angka Kemiskinan	%	5,43	6,23	85,27
5	Gini Rasio	Point	0,282	0,316**	87,94
	Rata-rata capaian kinerja				100,18

Sumber : BPS Kab.Banggai, 2026

*) BPS Indonesia, menggunakan realisasi tahun 2024

**)BPS Kab.Banggai, menggunakan realisasi tahun 2024

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan, pendidikan, dan aspek kesejahteraan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu : Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), digambarkan oleh Umur Harapan Hidup pada saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat ditempuh oleh bayi yang baru lahir untuk hidup dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang uisa bayi. Pengetahuan (knowledge), diukur menggunakan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah yang diharapkan akan dijalani oleh anak yang berumur 7 tahun di

masa mendatang. Standar hidup layak (decent standard of living), digambarkan oleh pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan, dihitung berdasarkan nilai pengeluaran per kapita, indeks harga, dan paritas daya beli.

Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai IPM menunjukkan bahwa capaian pembangunan manusia di wilayah tersebut semakin baik. IPM dikelompokkan menjadi empat kategori sebagai berikut :

- a. $IPM \geq 80$: IPM sangat tinggi
- b. $70 \leq IPM < 80$: IPM tinggi
- c. $60 \leq IPM < 70$: IPM sedang
- d. $IPM < 60$: IPM rendah

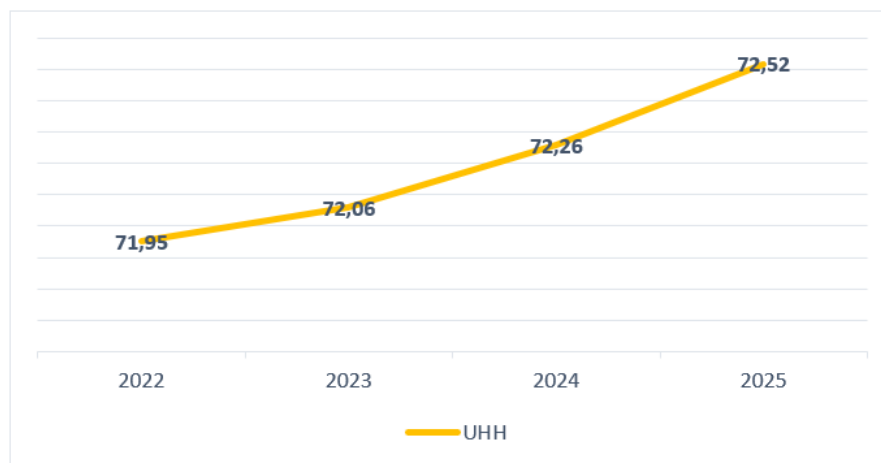
Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banggai tahun 2025 sebesar 73,44 dengan kategori IPM Tinggi. IPM Kabupaten Banggai terbentuk atas empat komponen indikator, yaitu Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran per kapita riil.

Berikut analisis capaian dari 4 (empat) komponen indikator pembentuk IPM Kabupaten Banggai tahun 2025.

Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup (UHH) di tahun 2025 sebesar 72,52, hal ini menggambarkan perkiraan rata-rata usia yang akan dijalani oleh seorang bayi yang dilahirkan hidup di Kabupaten Banggai pada tahun 2025 hingga akhir hayatnya.

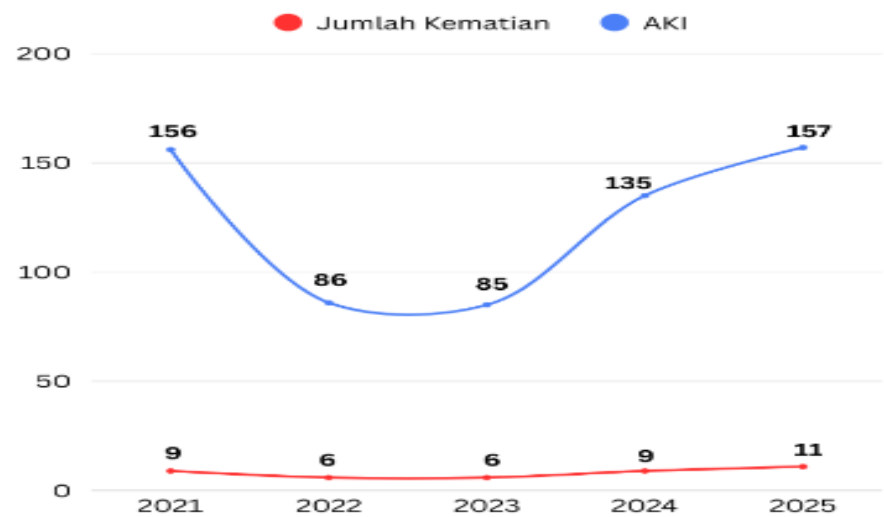
Grafik 3.1
Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Banggai
Tahun 2022-2025



Sumber : BPS Indonesia, per November 2025

Capaian UHH Kabupaten Banggai pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan sebesar 0,26 tahun dibanding tahun 2024. Faktor yang mempengaruhi capaian UHH adalah angka kematian ibu, yang mana angka kematian ibu dihitung dari kejadian kematian ibu pada masa kehamilan, persalinan, dan nafis.

Grafik 3.2
Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
Kabupaten Banggai Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Banggai, 2025

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Banggai tahun 2025 naik sebesar 22/100.000 KH dari tahun 2024 135/100.000 KH. Hal ini di sebabkan jumlah kematian ibu pada tahun 2025 adalah 11 orang dari jumlah kelahiran hidup 6.991. Penyebab kematian ibu pada tahun 2025 terbanyak disebabkan karena perdarahan berjumlah 4 (empat) orang atau 37% dari jumlah keseluruhan penyebab kematian.

Tabel 3.5
Penyebab Kematian Ibu Tahun 2022 s.d 2025

Penyebab Kematian	Jumlah				2025 %
	2022	2023	2024	2025	
Perdarahan	1	1	0	4	37
Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah	0	1	4	3	27
Infeksi	1	1	1	1	9
Hipertensi dalam Kehamilan	1	0	0	0	0
Lainnya	3	3	4	3	27
Jumlah	6	6	9	11	100

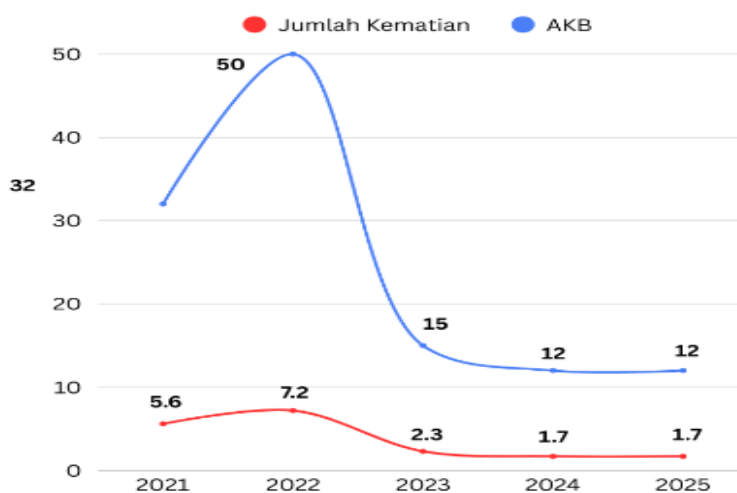
Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Banggai, 2025

Intervensi program dan kegiatan dalam rangka menurunkan AKI di Kabupaten Banggai melalui upaya Inovasi program posyandu prakonsepsi, yang menitikberatkan

pada program layanan dasar atau standar pelayanan minimal yang salah satunya adalah pelayanan Kesehatan ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu nifas. Program penurunan AKI juga didukung dengan adanya Inovasi “Ambulance Dering” Dimana upaya penanganan rujukan untuk aksesibilitas layanan guna penanganan paripurna juga sudah mulai dilaksanakan.

Faktor lain yang mempengaruhi capaian UHH adalah Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Banggai. Angka Kematian Bayi adalah untuk mengetahui gambaran Tingkat permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan ante natal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA & KB serta kondisi lingkungan & sosial ekonomi. Angka Kematian Bayi adalah Jumlah kematian bayi di bawah usia 1 tahun di wilayah tertentu selama 1 tahun. Jumlah kematian bayi di bawah usia 1 tahun di wilayah tertentu selama 1 tahun dibandingkan dengan jumlah lahir hidup di wilayah dan periode waktu yang sama 1000 KH.

Grafik 3.3
Angka Kematian Bayi (per 10.000 kelahiran hidup)
Kabupaten Banggai Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Banggai, 2025

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Banggai mengalami penurunan yang sangat signifikan sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Banggai tahun 2025 bila dibandingkan dengan tahun 2024 masih tetap di angka 1.7/10.000 KH. Hal ini disebabkan jumlah kematian bayi pada tahun 2025 adalah 12 orang. Penyebab kematian bayi pada tahun 2025 terbanyak disebabkan karena Asfiksia berjumlah 6 orang atau 50% dari jumlah keseluruhan penyebab kematian.

Tabel 3.6
Penyebab Kematian Bayi Tahun 2022 s.d 2025

Penyebab Kematian	Jumlah				2025 %
	2022	2023	2024	2025	
Asfiksia	6	3	4	6	50
BBLR	8	4	2	3	25
Kelainan Kongenital	0	3	1	1	8,3
Kelainan Bawaan	8	0	0	0	0
Infeksi	0	1	1	1	8,3
Pneumonia	3	0	0	0	0
Lain-lainnya	14	6	4	1	8,4
Jumlah	39	17	12	12	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Banggai, 2025

Program penurunan AKB merupakan salah satu prioritas penting dalam upaya peningkatan status derajat kesehatan masyarakat melalui program 1000 hari pertama kehidupan dengan melibatkan gugus tugas yang terdiri dari lintas sektor turut serta berkontribusi langsung dalam upaya mengkoordinasikan penanggulangan kasus kematian ibu dan anak.

Dukungan program kegiatan penanggulangan AKB bersumber dari Dana DAK Non fisik yaitu Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) serta program yang bersumber dari dana DAU yaitu pelayanan Kesehatan anak balita, peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan pelayanan gizi masyarakat.

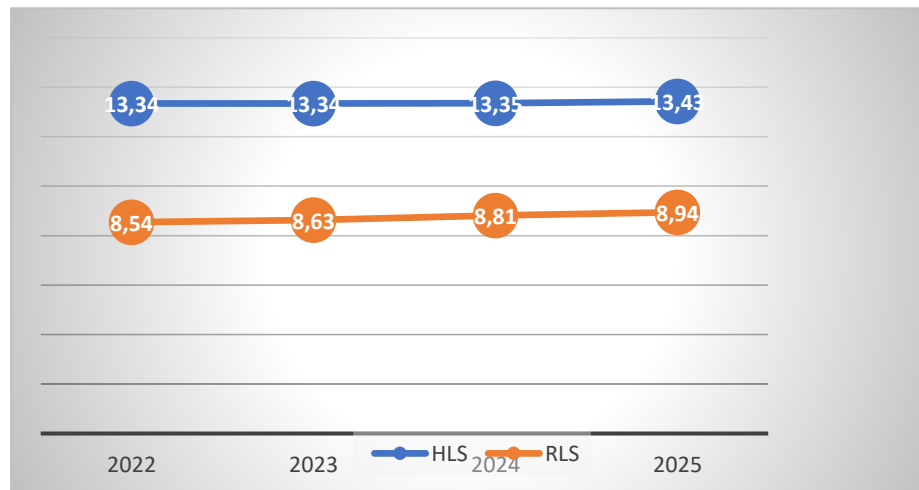
Adapun upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi yaitu:

1. Mengoptimalkan pemerataan tenaga kesehatan di Puskesmas
2. Pelatihan teknis kepada tenaga yang berkompetensi menolong persalinan
3. Melakukan Kerjasama dengan organisasi profesi dalam melakukan pembinaan dan pelayanan neonates dan bayi.
4. Memaksimalkan pelayanan PONEC dengan pertolongan di fasilitas Kesehatan.
5. Penguatan sistem rujukan.

Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Dari sisi dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Grafik 3.4
Perkembangan HLS dan RLS Kabupaten Banggai
Tahun 2022-2025



Sumber : BPS Indonesia, per November 2025

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk Kabupaten Banggai pada tahun 2025 sebesar 13,43 tahun yang berarti bahwa pada tahun 2025 seorang anak yang berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati Pendidikan formal dimasa depan selama 13,43 tahun, lama sekolah ini dihitung sejak SD hingga pendidikan yang lebih tinggi. Adapun perkembangan HLS Kabupaten Banggai tahun 2025 mengalami peningkatan HLS 0,08 tahun dari tahun 2024.

Rata-rata Lama sekolah (RLS) penduduk mencapai 8,94 tahun yang berarti rata-rata lama tahun bersekolah yang dijalani oleh penduduk Kabupaten Banggai berusia 25 tahun keatas rata-rata telah menjalani Pendidikan formal selama 8,94 tahun, setara dengan lulus pada jenjang kelas 8 SMP atau putus sekolah pada kelas 9 SMP. Adapun perkembangan angka RLS Kabupaten Banggai tahun 2025 terjadi sedikit perubahan RLS Kabupaten Banggai hanya 0,13 tahun dari tahun 2024.

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan harapan terhadap akses Pendidikan generasi muda dibandingkan dengan tingkat pendidikan rata-rata penduduk saat ini. Hal ini menjadi wajar, mengingat bahwa dari tahun ke tahun fasilitas pendidikan terus ditambah dan diperbaharui. Upaya ini dapat meningkatkan partisipasi sekolah penduduk berusia 7 tahun ke atas. Semakin tinggi partisipasi sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas, maka harapan lama sekolah akan semakin panjang. Di sisi lain, rata-rata lama sekolah menunjukkan masa pendidikan yang sudah ditempuh oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas. Seperti yang diketahui bahwa keterjangkauan pendidikan pada masa silam tidak semudah saat ini. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi sekolah pada tahun-tahun tersebut, sehingga

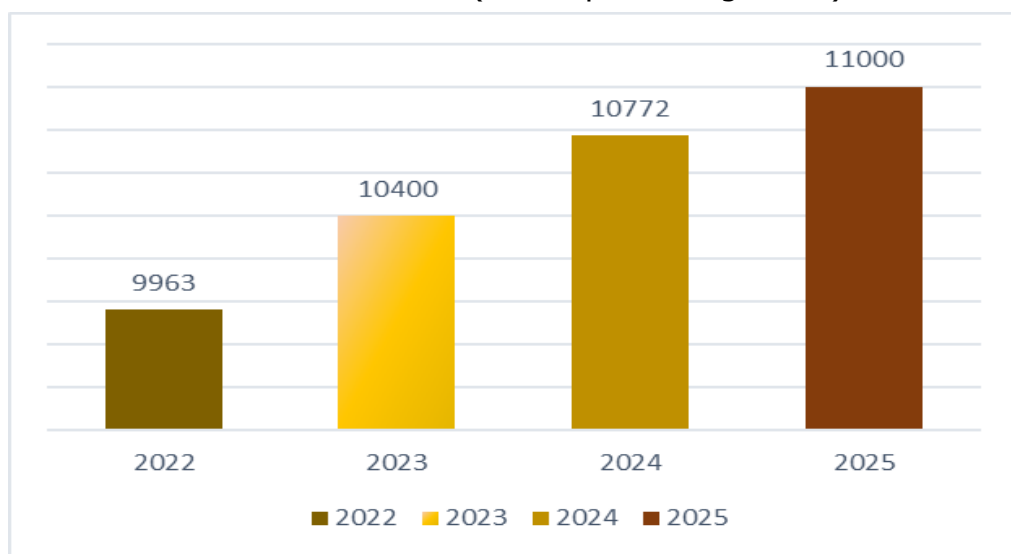
rata-rata lama sekolah yang telah ditempuh penduduk usia 25 tahun masih relatif rendah.

Peningkatan kualitas pendidikan (baik melalui peningkatan HLS maupun RLS) akan memperbaiki dua aspek penting dalam perhitungan IPM: pendidikan dan pendapatan per kapita. Dengan kata lain, meskipun IPM Kabupaten Banggai sudah cukup baik, sektor pendidikan menjadi kunci untuk mendorongnya ke level yang lebih tinggi.

Pengeluaran Riil Per kapita disesuaikan

Dari sisi dimensi Standar Hidup Layak berdasarkan yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan untuk tahun 2025 diterbitkan oleh BPS, oleh karena itu data yang tersedia dan pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025.

Grafik 3.5
Perkembangan Pengeluaran Riil Per kapita Kabupaten Banggai
Tahun 2022-2025 (Ribu rupiah/orang/tahun)



Sumber : BPS Nasional, per November 2025

Data pengeluaran per kapita yang disesuaikan pada periode 2022-2025 menggambarkan kondisi serta perkembangan standar hidup layak masyarakat di kabupaten banggai. Melalui data tersebut, bahwa tren perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat dari tahun ke tahun dengan nilai pengeluaran riil per kapita Kabupaten Banggai mengalami peningkatan, hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Meskipun IPM Kabupaten Banggai sudah menunjukkan pencapaian positif, masalah pendapatan dan distribusi kekayaan perlu diperhatikan untuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat secara lebih merata, dengan fokus pada peningkatan sektor ekonomi lokal dan distribusi pendapatan yang lebih merata.

Tabel 3.7

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota, Provinsi di Sulawesi Tengah dan Nasional Menurut Dimensi Penyusunnya tahun 2025

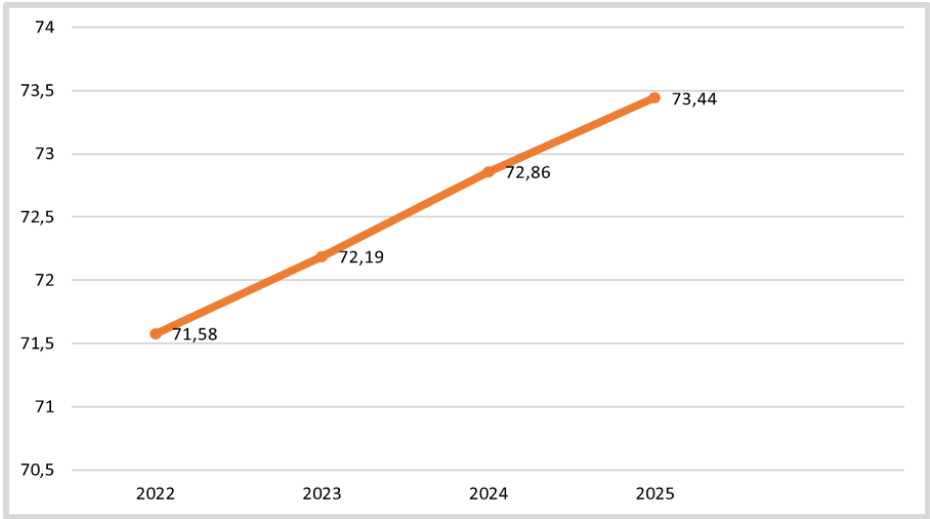
Kabupaten/Kota	UHH	HLS	RLS	Pengeluaran Riil per Kapita
Banggai	72,52	13,43	8,94	11.000
Banggai Kepulauan	67,83	13,12	8,88	8.723
Banggai Laut	71,45	13,17	8,66	9.184
Morowali	71,34	13,40	9,39	12.527
Morowali Utara	72,61	12,60	9,14	10.258
Poso	73,34	13,76	9,84	10.314
Donggala	71,03	12,75	8,01	9.337
Toili-Toli	71,62	13,18	0,00	9.295
Parigi Moutong	69,09	12,53	8,07	11.194
Buol	71,62	13,19	9,21	9.410
Tojo Una-Una	71,30	12,62	8,58	9.200
Sigi	71,63	13,30	9,05	9.659
Kota Palu	74,25	16,53	11,76	16.269
Sulawesi Tengah	71,10	13,35	9,10	10.934
Nasional	74,47	13,30	9,07	12.802

Sumber : BPS Indonesia, 2025

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 tercantum pada grafik, sebagai berikut:

Grafik 3.6

Perbandingan Realisasi indikator IPM Kabupaten Banggai Tahun 2025 Dengan Beberapa Tahun Terakhir



Sumber : BPS Kab. Banggai, 2026

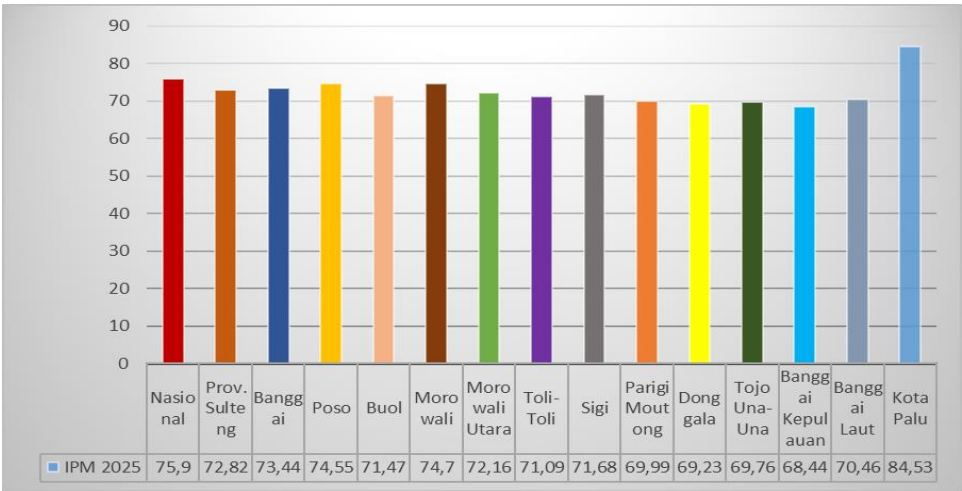
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banggai dari tahun ketahun menunjukkan tren positif dengan kenaikan IPM yang stabil dari tahun ke tahun, untuk tahun 2025 naik 0,58 point dari tahun 2024. Meskipun angka kenaikan tahunan tidak terlalu besar, peningkatan yang terus menerus dan stabil

menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Banggai dilakukan dengan pendekatan jangka panjang yang memfokuskan pada pembangunan sumberdaya manusia keberlanjutan.

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD 2021-2026

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Target Akhir RPJMD 2026	Capaian (%)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73,44	73,57	99,82

Grafik 3.7
Perbandingan realisasi indikator IPM Kabupaten Banggai dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, serta Nasional Tahun 2025



Sumber: BPS Sulawesi Tengah, 2025

Dari grafik tersebut, menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di berbagai Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025. Dengan IPM 73.44, Kabupaten Banggai berada di posisi yang cukup baik yaitu ke empat dan masuk dalam kategori IPM tinggi, meskipun lebih rendah dibandingkan Kota Palu dengan status IPM sangat tinggi dan beberapa kabupaten lain seperti Morowali dan Poso, untuk meningkatkan IPM di Kabupaten Banggai masih terdapat potensi besar terutama dengan memperkuat sektor-sektor yang dapat mendorong pendapatan dan akses ke layanan dasar. Meskipun mengalami perkembangan yang baik dari tahun ketahun, angka IPM Kabupaten Banggai masih tertinggal 2,46 point dibanding dengan capaian IPM Nasional tahun 2025 yang mencapai 75,90.

Sedangkan Untuk meningkatkan IPM Kabupaten Banggai agar lebih mendekati atau bahkan melampaui IPM Nasional, perhatian khusus perlu diberikan pada

peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang lebih baik, dan peningkatan ekonomi masyarakat yang lebih merata.

Faktor keberhasilan atas peningkatan capaian kinerja indikator IPM Kabupaten Banggai:

1. Pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana sekolah.
2. Penyediaan bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu.
3. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik seperti pelatihan.
4. Perbaikan fasilitas dan layanan kesehatan.
5. Peningkatan gizi masyarakat dan pencegahan stunting.
6. Mengoptimalkan pemerataan tenaga kesehatan di Puskesmas.
7. Melakukan pembinaan dan pelatihan teknis bagi tenaga teknis kesehatan.
8. Penguatan sistem rujukan.
9. Peningkatan kegiatan promotif dan preventif perilaku hidup bersih dan sehat melalui penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
10. Pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat.
11. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

Dalam pencapaian kinerja tersebut , masih terdapat tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Banggai:

1. Ketidakmerataan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan.
2. Kualitas sumber daya manusia yang belum merata.
3. Masih ada Masyarakat dengan tingkat Pendidikan rendah.
4. Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk, masih kurang memadai.
5. Masih rendahnya perekonomian orang tua peserta didik.
6. Kualitas tenaga kerja yang masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing.

Adapun Solusi yang dilakukan untuk pencapaian kinerja Indeks Pembangunan Manusia yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inklusif di Satuan Pendidikan.
2. Menyalurkan bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu untuk mencegah putus sekolah.
3. Salah satu langkah inovatif yang diambil adalah peluncuran program "SI ADE" (Sistem Informasi Anak dan Dewasa Kembali Sekolah) yang bertujuan menangani permasalahan anak putus sekolah. Dengan inovasi agar anak yang putus sekolah bisa kembali sekolah, dan dewasa yang tidak pernah sekolah bisa bersekolah, diharapkan rata-rata lama sekolah semakin meningkat.

4. Melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga pendidik melalui pelatihan, workshop, dan kegiatan pengembangan profesi berkelanjutan.
1. Mengoptimalkan program pendidikan melalui jalur non formal seperti Paket A, Paket B dan Paket C bagi masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan formal.
2. Peningkatan sarana dan prasarana puskesmas serta ketersediaan tenaga kesehatan.
3. Perluasan cakupan jaminan Kesehatan.
4. Peningkatan pencegahan penyakit dan perbaikan gizi masyarakat melalui kegiatan penyuluhan Kesehatan dan edukasi.

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Indikator dari Indeks Pemberdayaan gender (IDG) yaitu menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemberdayaan perempuan di suatu daerah dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Semakin tinggi angka IDG, semakin baik pemberdayaan gender di daerah tersebut.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Banggai pada tahun 2025 belum tersedia secara publik oleh BPS, sehingga realisasi tahun 2025 menggunakan data Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2024 sebesar 76,96. Capaian ini menunjukkan bahwa Tingkat partisipasi Perempuan dalam berbagai bidang Pembangunan di Kabupaten Banggai tergolong baik serta menunjukkan adanya peningkatan pemberdayaan Perempuan dalam kehidupan social, ekonomi dan politik.

Tabel 3.9

Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2025

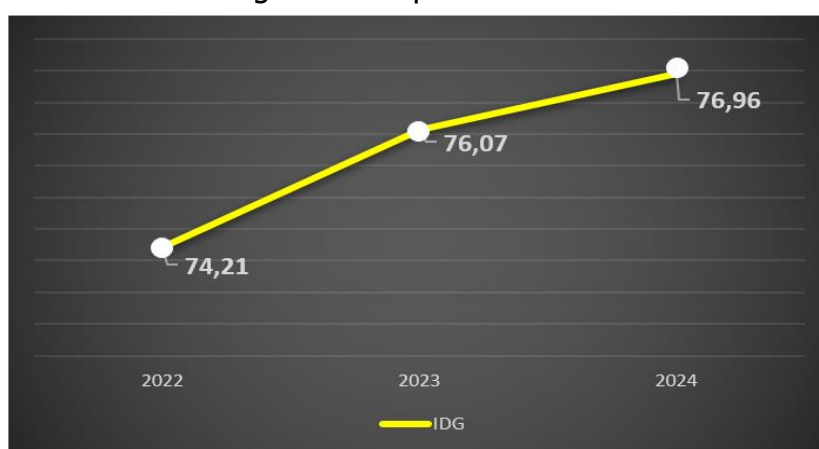
No	Uraian	Tahun 2025	Keterangan
1	Perempuan di bidang pemerintahan	6.123 Orang	Total ASN 9.617 Orang
2	Perempuan di bidang politik	13 Orang	Total Anggota DPR 35 Orang

Sumber : BKPSDM Kabupaten Banggai, Sekretariat Dewan Kabupaten Banggai 2025

Kehadiran perempuan di rana politik praktis yang dibuktikan dengan keterwakilan perempuan dalam Lembaga legislatif menjadi syarat mutlak bagi terciptanya kultur pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitive pada kepentingan perempuan. Tanpa keterwakilan perempuan di parlemen dalam jumlah yang memadai, kecenderungan untuk menempatkan kepentingan laki-laki sebagai pusat dari pengambilan kebijakan akan sulit dibendung. Sehingga berdasarkan tabel diatas Keterwakilan Perempuan dalam kancah perpolitikan di Kabupaten Banggai masih terbilang kecil sebesar 37,14 persen. Sedangkan untuk keterlibatan perempuan di bidang pemerintahan 63,67 persen melebihi dari setengah jumlah ASN di Kabupaten Banggai. Selain itu, pelaksanaan berbagai program pemberdayaan Perempuan yang dilakukan turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan capaian IDG.

Indeks Pemberdayaan gender (IDG) Kabupaten Banggai selama kurun waktu Tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut :

Grafik 3.8
Perbandingan realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2024
dengan beberapa tahun terakhir



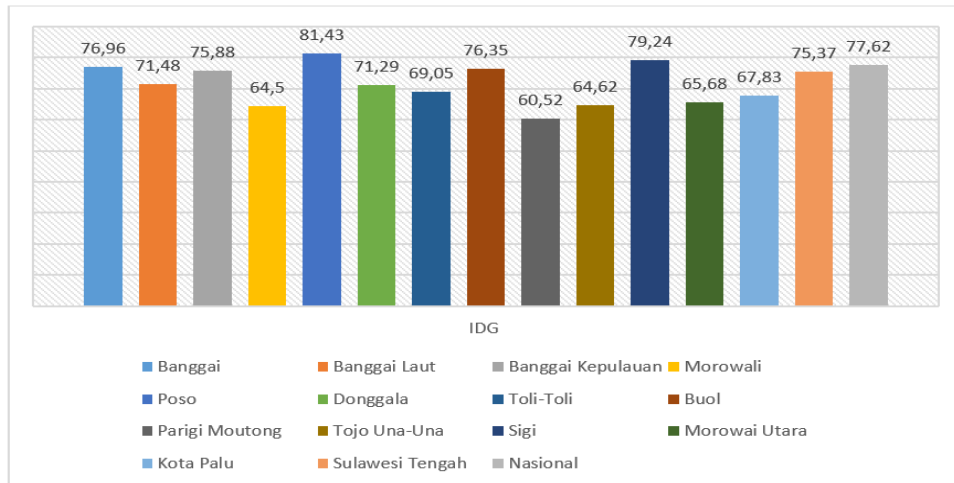
Sumber: BPS Nasional, 2025

Secara keseluruhan, bahwa IDG Kabupaten Banggai menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 yang mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam pemberdayaan gender di Kabupaten Banggai. Ini bisa menjadi hasil dari upaya-upaya intensif dari pemerintah daerah atau organisasi terkait yang berfokus pada pemberdayaan perempuan. Meskipun ada tantangan yang dapat mempengaruhi indikator ini, hasil positif menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki situasi tersebut sudah mulai memberikan dampak yang nyata.

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD 2021-2026

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Target Akhir RPJMD 2026	Capaian (%)
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	76,96	46,90	164,09

Grafik 3.9
Perbandingan realisasi IDG Kabupaten Banggai dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, serta Nasional Tahun 2024



Sumber : BPS Nasional, 2025

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) bila dibandingkan dengan Provinsi/Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah tahun 2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Banggai memiliki IDG 76,96 berada di posisi ketiga tertinggi setelah Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi. Hal ini menandakan bahwa pemberdayaan gender di Kabupaten Banggai cukup baik, menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan melalui kebijakan atau program yang lebih efektif dan mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Adapun penyebab keberhasilan peningkatan kinerja Indeks Pemberdayaan Gender yaitu:

1. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pengambilan Keputusan dalam Lembaga legislative, pemerintahan, maupun organisasi Masyarakat.
2. Melalui perangkat daerah terkait telah mendorong implementasi program pengarusutamaan gender dengan melaksanakan sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG
3. Melaksanakan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan Perempuan.

4. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap Perempuan.
5. Melaksanakan kegiatan penyediaan layanan pengaduan bagi Perempuan korban kekerasan.
6. Melaksanakan pelatihan keterampilan, penguatan UMKM Perempuan.

Meskipun capaian IDG sangat tinggi, namun masih terdapat kendala yang dalam mencapai indikator IDG, antara lain:

1. Keterwakilan perempuan di politik yang masih terbatas.
2. Kesenjangan kesempatan kerja antara laki-laki dan perempuan pada sektor tertentu.
3. Perempuan yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan masih terbatas.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian IDG, perlu terus melakukan beberapa Upaya berikut:

1. Peningkatan kapasitas Perempuan dengan melaksanakan berbagai program seperti pelatihan kewirausahaan, pelatihan kepemimpinan Perempuan, dan penguatan kelompok usaha Perempuan.
2. Mendorong keterwakilan Perempuan dalam politik.
3. Penguatan pemberdayaan ekonomi Perempuan melalui pemberian modal usaha, pelatihan UMKM, dan pemasaran produk lokal.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari:

- Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Pada tabel dibawah ini menunjukkan jumlah penduduk usia kerja dan angkatan kerja Tahun 2022-2025 di Kabupaten Banggai, yaitu :

Tabel 3.11
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Kabupaten Banggai,
Agustus 2023 - Agustus 2025

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2023	Agustus 2024	Agustus 2025
Penduduk Usia Kerja (PUK)	281.531	285.369	289.021
Angkatan Kerja	201.863	204.604	216.021
- <i>Bekerja</i>	<i>195.564</i>	<i>198.293</i>	<i>209.381</i>
- <i>Pengangguran</i>	<i>6.299</i>	<i>6.365</i>	<i>6.640</i>
Bukan Angkatan Kerja	79.668	80.765	73.000
	Persen	Persen	Persen
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	71,70	71,70	74,74
- <i>Laki-Laki</i>	<i>85,72</i>	<i>86,46</i>	<i>89,45</i>
- <i>Perempuan</i>	<i>57,17</i>	<i>56,41</i>	<i>59,54</i>

Sumber : BPS Kab.Banggai, 2025

Pengertian penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja pada Agustus 2025 sebanyak 289.021 ribu orang. Dari total tersebut, sekitar 216.021 atau 74,74 persen merupakan angkatan kerja sedangkan sisanya termasuk bukan angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi sebesar 5,17 persen pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Umum. berbeda dengan tahun sebelumnya, TPT tertinggi berada pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Sepanjang periode 2022–2025, tercatat jumlah angkatan kerja di Kabupaten Banggai mengalami peningkatan.

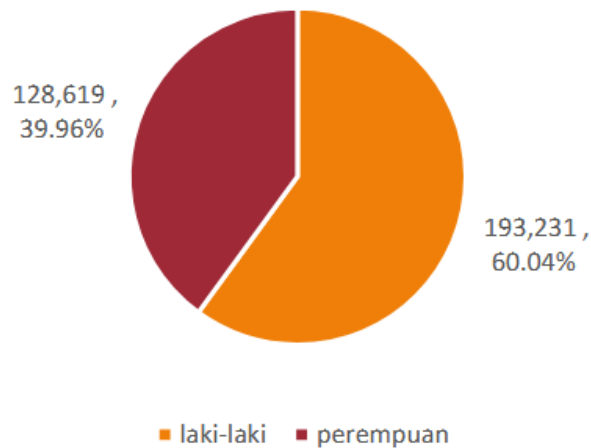
Tabel 3.12
Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Banggai,
2020-2025 (Agustus) (orang)

Tahun	2022	2023	2024	2025
Jumlah	217.399	201.863	204.604	216.021
Pertumbuhan	3,39%	-7,14%	1,36%	5,58%

Sumber : Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Banggai Agustus 2025

Secara umum, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja pada periode Agustus 2025 dibandingkan dengan periode sebelumny tahun 2024. Hal ini khususnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja, serta persebaran tenaga kerja yang tidak merata, yang mana di Kabupaten Banggai tenaga kerja lebih banyak tersebar di wilayah perkotaan dibanding di wilayah perdesaan.

Gambar 3.1
Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Banggai, Agustus 2025



Sumber : Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Banggai Agustus 2025

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Banggai masih didominasi oleh laki-laki, sekitar 193.231 ribu jiwa atau sekitar 60,04 persen dari total angkatan kerja yang ada pada Agustus 2025. Sebaliknya, jumlah penduduk usia kerja yang bukan merupakan angkatan kerja didominasi oleh perempuan. Rendahnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja antara lain dipengaruhi faktor budaya di mana peran perempuan masih dituntut untuk mengurus rumah tangga sedangkan laki-laki bertugas untuk mencari nafkah.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. TPAK pada Agustus 2025 sebesar 74,74 persen, dengan jumlah angkatan kerja pada Agustus 2025 sebanyak 216.021 ribu orang.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki lebih besar dibandingkan TPAK perempuan. Dalam empat tahun terakhir, TPAK laki-laki selalu lebih tinggi dibanding TPAK perempuan.

Tabel 3.13
Karakteristik Pengangguran di Kabupaten Banggai,
Agustus 2023-Agustus 2025

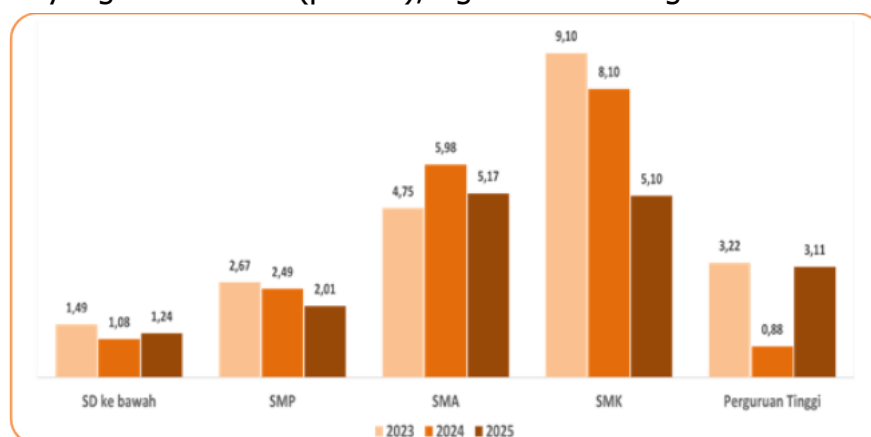
Karakteristik Pengangguran	Agustus 2023 (persen)	Agustus 2024 (persen)	Agustus 2025 (persen)	Perubahan Agst 2023-Agst 2024 (persen poin)	Perubahan Agst 2024-Agst 2025 (persen poin)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,12	3,11	3,07	-0,01	-0.04
TPT Menurut Jenis Kelamin					

- Laki-laki	3,09	3,64	3,37	0,55	-0,27
- Perempuan	3,16	2,27	2,62	-0,89	0,35

Sumber : BPS Kab.Banggai, 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2025 sebesar 3,07 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar tiga sampai empat orang penganggur. Pada Agustus 2025, TPT mengalami penurunan sebesar 0,04 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2024. Pada Agustus 2025, TPT laki-laki sebesar 3,37 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 2,62 persen. TPT laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,27 persen poin dibandingkan Agustus 2024, sedangkan TPT perempuan mengalami kenaikan sebesar 0,35 persen poin dibandingkan Agustus 2024.

Grafik 3.10
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Agustus 2023–Agustus 2025



Sumber : BPS Kab.Banggai, 2025

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT pada Agustus 2025 mempunyai pola cukup bervariasi baik dengan tahun 2023 maupun dengan tahun 2024. Pada Agustus 2025, TPT tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) Umum merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 5,17 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah pendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 1,24 persen.

Pada tahun 2025, berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan TPT penduduk dengan pendidikan SMP, SMA dan SMK/ sederajat mengalami penurunan. Sementara kategori pendidikan yaitu SD ke bawah dan Perguruan Tinggi mengalami kenaikan. Kenaikan TPT pada kategori pendidikan Perguruan Tinggi sebesar 2,23

persen poin dibandingkan tahun 2024, kemudian untuk kategori SMK/ sederajat turun sebesar 3,00 persen poin.

Tabel 3.14.
Penduduk Usia 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Banggai, 2025

Lapangan Pekerjaan Utama	Jumlah	Persentase
Pertanian	72.195	34,48
Manufaktur	33.124	15,82
Jasa	104.062	49,70
Total	209.381	100,00

Sumber: Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Banggai, Agustus 2025

Penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banggai tersebar di seluruh jenis lapangan usaha yang ada. Pada tahun 2025, sebagian besar tenaga kerja di Kabupaten Banggai terserap pada lapangan usaha jasa, yaitu sekitar 104.062 jiwa atau 49,70 persen dari total penduduk yang bekerja pada tahun 2025 (periode Agustus). Hal ini menunjukkan lapangan usaha jasa mampu menyerap tenaga kerja dengan baik karena merupakan lapangan usaha yang padat karya.

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD 2021-2026

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Target Akhir RPJMD 2026	Capaian (%)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,07	2,18	59,17

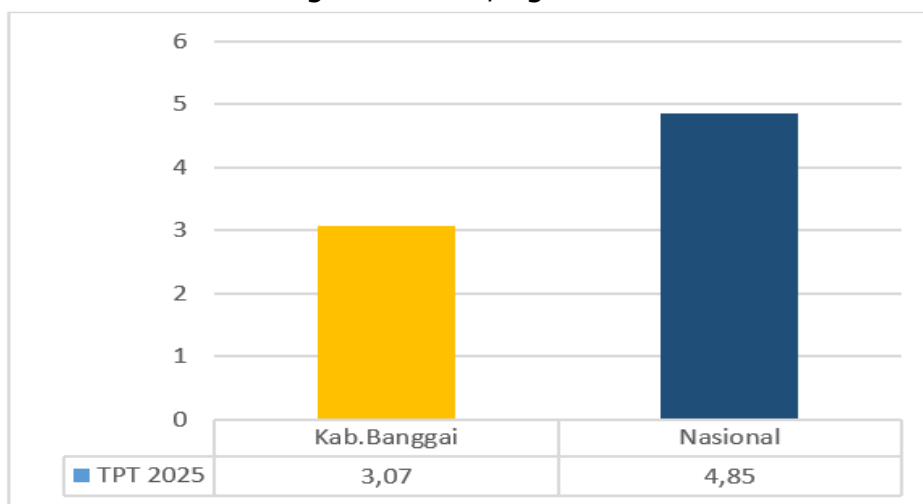
Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi, Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, Agustus 2023 - Agustus 2025

Kabupaten/ Kota	Agustus 2023	Agustus 2024	Agustus 2025
	persen	persen	persen
Banggai Kepulauan	1,56	1,55	1,67
Banggai	3,12	3,11	3,07
Morowali	2,84	2,84	2,81
Poso	1,67	1,77	1,76
Donggala	2,79	2,79	2,78
Tolitol	3,12	3,11	3,09
Buol	3,14	3,13	3,11
Parigi Moutong	2,11	2,10	2,10
Tojo Una-Una	2,83	2,47	2,73
Sigi	2,60	2,55	2,30
Banggai Laut	3,64	3,60	3,69
Morowali Utara	2,23	2,38	2,38
Palu	5,65	5,63	5,59
Sulawesi Tengah	2,95	2,94	2,92

Sumber : BPS Kab.Banggai, 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banggai pada Agustus 2025 sebesar 3,07 persen, lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi Sulawesi tengah sebesar 2,92 persen. TPT Kabupaten Banggai merupakan TPT tertinggi kelima dari tiga belas Kabupaten Kota di Sulawesi Tengah. Terdapat 8 Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi tengah yang mengalami penurunan TPT, termasuk Kabupaten Banggai. Hal ini berbanding lurus dengan TPT Sulawesi Tengah yang mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik 3.11
Perbandingan Realisasi TPT Kabupaten Banggai
dengan Nasional, Agustus 2025



Sumber : BPS Indonesia, 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banggai tahun 2025 lebih rendah 1,78 point dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional sebesar 4,85. Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya, contohnya kriminalitas. Sebaliknya, semakin rendah angka pengangguran terbuka maka semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat.

Kualitas sumber daya manusia juga berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja yang terbuka di daerah. Oleh sebab itu pembangunan SDM di Kabupaten Banggai diarahkan agar benar-benar mampu menghasilkan tenaga kerja yang memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan Daerah. Selain itu, dalam menyongsong pembangunan digital, pemerintah Indonesia memperbaiki kurikulum pendidikan,

memperkuat kompetensi melalui pelatihan vokasi dan program magang, serta pelaksanaan sertifikasi profesi di seluruh institusi di wilayah Indonesia.

Beberapa program, seperti program penempatan tenaga kerja, program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, program hubungan industrial, serta program perlindungan dan jaminan sosial, Kabupaten Banggai dalam menekan tingkat pengangguran telah melaksanakan berbagai upaya yaitu :

- a. Melaksanakan kegiatan penempatan tenaga kerja yang bertujuan untuk meningkatkan serapan tenaga kerja. Persentase pencari kerja yang ditempatkan diperoleh dari jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibandingkan dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar. Pada tahun 2025, dari jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 2.860 orang sebanyak 809 orang pencari kerja yang terdaftar berhasil ditempatkan sekitar 28,29 % tenaga kerja yang ditempatkan.

Capaian ini didukung dengan adanya kegiatan pelayanan antar kerja melalui layanan AKAD dan AKL. Layanan AKAD adalah kegiatan penempatan tenaga kerja dari Kabupaten ke daerah lain yang membutuhkan tenaga kerja, sedangkan layanan AKL adalah kegiatan



penempatan tenaga kerja dalam wilayah kabupaten sendiri. Dengan demikian pelayanan antar kerja melalui AKAD dan AKL di Kabupaten Banggai merupakan upaya pemerintah daerah untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, baik di dalam daerah maupun di luar daerah, sehingga kesempatan kerja bagi masyarakat semakin luas.

- b. Melaksanakan kegiatan pengelolaan informasi pasar kerja melalui *Job Fair/Bursa Kerja* yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai. Kegiatan *Job Fair* ini sebagai bagian dari program



pemerintah dalam mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha secara langsung. Tahun 2025, *Job Fair* mengusung tema "Gerbang (Gerakan Banggai) Produktif : Banggai Bergerak, Tenaga Kerja Bangkit". Pada pelaksanaan *Job Fair*

tahun 2025 sebanyak 20 perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Banggai ikut andil dalam kegiatan ini. Per Januari sampai Mei 2025 telah tersedia 634 lowongan kerja, dan dari juni hingga pelaksanaan *Job Fair* terbuka lagi sebanyak 365 posisi, dengan total keseluruhan hingga juli 2025 adalah 999 lowongan kerja, dan jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui *Job Fair* *ursa kerja* sebanyak 60 orang.

- c. Melaksanakan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi (PBK) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja lokal, sehingga nantinya mampu menjadi tenaga kerja profesional maupun wirausaha mandiri yang sukses.



Tingkatkan Daya Saing SDM, Disnakertrans Banggai Gelar PBK Kejuruan 2025

Pelatihan yang dilaksanakan mencakup

yaitu pertama, Plate Welder Smaw 3G (pengelasan dasar) hasil kerjasama dengan PT Panca Amaran Utama (PAU) yang diikuti 20 peserta. Kejuruan ini berfokus pada penguasaan teknik dasar pengelasan yang sangat dibutuhkan dalam industri konstruksi dan permesinan. Kedua, Servis Sepeda Motor Injeksi (perbengkelan) yang diikuti oleh 18 peserta, bertujuan untuk membekali peserta dengan keterampilan memperbaiki sepeda motor injeksi, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan bengkel modern. Dengan



adanya kegiatan pelatihan kejuruan pengelasan dan perbengkelan sepeda motor injeksi ini dapat membuka peluang untuk berwirausaha. Ketiga, pelatihan menjahit bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis menjahit pakaian dengan benar, sehingga membuka peluang menjadi pekerja penjahit atau dapat membuka usaha jahit, atau bekerja di konveksi. Keempat, pelatihan mengemudi bertujuan untuk membekali peserta dengan keterampilan mengemudi

kendaraan dengan benar dan aman, sehingga membuka peluang kerja bisa menjadi sopir seperti sopir di perusahaan, taksi atau transportasi lainnya.

Kendala-kendala yang menghambat penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) antara lain:

- a. Keterbatasan lapangan kerja, dimana jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja.
- b. Kurangnya kesempatan kerja yang sesuai dengan keterampilan dan pendidikan masyarakat.
- c. Rendahnya minat berwirausaha.

Solusi untuk Mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Banggai:

- a. Mendorong pengembangan UMKM dan kewirausahaan.
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan kerja, kursus, dan pendidikan vokasi agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
- c. Membangun kerja sama dengan perusahaan dan investor agar membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
- d. Penyelenggaraan Job Fair/Bursa Kerja.

4. Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan merupakan persentase jumlah penduduk miskin terhadap total seluruh penduduk di suatu wilayah tertentu. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari 2 komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), perhitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar nonmakanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan. Garis Kemiskinan per

rumah tangga dihitung dari garis kemiskinan per kapita dikalikan dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga pada rumah tangga miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan.

Tabel 3.17
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Banggai,
Maret 2022 – Maret 2025

Periode	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
Maret 2022	28,55	7,33
Maret 2023	27,38	6,94
Maret 2024	26,21	6,56
Maret 2025	25,17	6,23

Sumber : *BPS Kabupaten Banggai, 2025*

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banggai pada Maret 2025 mencapai 25,17 ribu orang. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 1,04 ribu orang dibandingkan Maret 2024, yang sebesar 26,21 ribu orang.

Tabel 3.18
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD 2021-2026

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Target Akhir RPJMD 2026	Capaian (%)
Angka Kemiskinan	%	6,23	5,00	75,40

Tabel 3.19
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota
di Sulawesi Tengah, Maret 2025

Kab/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)
Banggai Kepulauan	13,92	11,49
Banggai	25,17	6,23
Morowali	13,65	10,38
Poso	36,49	12,90
Donggala	14,66	14,66
Toli-Toli	12,20	12,20
Buol	23,13	12,48
Parigi Moutong	71,88	13,51
Tojo Una-Una	23,59	14,67
Sigi	26,03	10,47
Banggai Laut	10,44	12,71
Morowali Utara	14,78	10,38
Kota Palu	21,99	5,26
Sulawesi Tengah	356,19	10,92

Sumber : *BPS Kabupaten Banggai, 2025*

Secara absolut, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banggai pada Maret 2025 tercatat sebanyak 25,17 ribu orang. Angka ini menempatkan Banggai sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi keempat di Provinsi Sulawesi Tengah, berada di bawah Parigi Moutong (71,88 ribu orang), Poso (36,49 ribu orang), dan Sigi (26,03 ribu orang). Meski tidak berada pada posisi tertinggi, jumlah penduduk miskin di Banggai tetap termasuk yang besar dibandingkan beberapa kabupaten/kota lain seperti Banggai Laut, Toli-Toili, dan Morowali.

Tabel 3.20
Garis Kemiskinan dan Perubahannya. Maret 2023 - Maret 2025

Periode	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
(1)	(2)
Maret 2023	488.788
Maret 2024	515.334
Maret 2025	535.425
Perubahan Mar'23–Mar'25 (%)	9,54
Perubahan Mar'24–Mar'25 (%)	3,89

Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2025

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Tabel diatas menyajikan perkembangan garis kemiskinan pada Maret 2023 sampai dengan Maret 2025. Pada periode Maret 2024–Maret 2025, Garis Kemiskinan naik sebesar 3,89 persen, yaitu dari Rp 515.334,- per kapita per bulan pada Maret 2024 menjadi Rp 535.425,- per kapita per bulan pada Maret 2025.

Tabel 3.21
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Banggai, Maret 2023 - Maret 2025

Periode	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
(1)	(2)	(3)
Maret 2023	0,80	0,17
Maret 2024	0,86	0,17
Maret 2025	0,74	0,14

Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2025

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Pada periode Maret 2024 - Maret 2025, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2024 adalah 0,86 turun menjadi 0,74 pada Maret 2025, sedangkan Indeks Keparahannya Kemiskinan mengalami penurunan dari 0,17 menjadi 0,14 pada periode tersebut. Apabila dibandingkan dengan periode 2 tahun sebelumnya yaitu bulan Maret 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) pada tahun 2025 juga masih lebih rendah.

Pemerintah Kabupaten Banggai terus berupaya dalam mengentaskan kemiskinan, melalui berbagai program dan inovasi yang tepat sasaran. Dalam melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan perlu adanya keterpaduan antara pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat yang peduli terhadap pengentasan kemiskinan.

Upaya/strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai melalui program penanggulangan kemiskinan dengan inovasi **“Tuntaskan Kemiskinan Melalui Kegiatan Terintegrasi (Tumis Ikan Teri)”** yakni:

1. Pengelolaan jaminan Kesehatan
2. Bantuan Rumah Sejahtera Terpadu (RST)
3. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) per Kepala Keluarga.
4. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)
5. Pembangunan/rehabilitasi rumah layak huni
6. Penyediaan air minum dan sanitasi
7. Bantuan pelatihan usaha mikro
8. BUMDES 500 jt/desa
9. Bantuan kepada korban bencana baik bencana alam maupun bencana sosial berupa bantuan sandang, pangan dan papan.
10. Bantuan bagi siswa kurang mampu.

Beberapa faktor berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Banggai selama periode Maret 2024 - Maret 2025 antara lain adalah:

1. Inflasi year on year Maret 2025 terhadap Maret 2024 sebesar 2,24 persen, lebih rendah dibanding inflasi year on year Maret 2024 terhadap Maret 2023 sebesar 2,95 persen.
2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Kabupaten Banggai untuk komponen Profil Kemiskinan di Kabupaten Banggai, Maret 2025 BRS No. 13/12/7202/Th. VI, 15 Desember 2025 pengeluaran rumah tangga pada tahun 2025 Triwulan 1 sebesar 1.917,07 miliar rupiah, mengalami pertumbuhan 4,30 persen dibandingkan triwulan tahun sebelumnya sebesar 1.837,99 miliar rupiah.
3. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai pada tahun 2024 tetap menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 3,63 persen, lebih laju dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 2,40 persen.
4. Terdapat beberapa program gubernur yang mendukung penurunan kemiskinan seperti Berani Sehat dimana masyarakat Sulawesi Tengah dapat berobat gratis dimanapun dengan menunjukkan KTP. Program Berani Cerdas, yaitu pemberian beasiswa bagi mahasiswa dan mahasiswi Sulteng, penghapusan biaya pendidikan untuk pelajar SMA/SMK/SLB, pemberlakuan program wajib belajar 13 tahun dimulai dari PAUD hingga SMA/SMK/SLB, dan penyaluran bantuan dana BOS Daerah (Bosda) bagi sekolah swasta setingkat SMA/ SMK/SLB dan serta program bantuan gubernur lainnya.
5. Bantuan Langsung Tunai yang diberikan secara teratur setiap bulan oleh Pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Banggai dalam mengentaskan dan mengurangi Kemiskinan di Kabupaten Banggai:

1. Terbatasnya lapangan kerja produktif, dimana sebagian masyarakat masih tergantung pada sektor pertanian dan nelayan, menyebabkan pendapatan dari sektor ini relatif rendah dan tidak stabil.
2. Masih terdapat masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, keterampilan kerja terbatas, menyebabkan masyarakat sulit bersaing di pasar kerja.
3. Kurangnya akses ke modal usaha, perbankan, atau lembaga keuangan yang menyediakan pinjaman. Tanpa dukungan finansial, mereka sulit meningkatkan penghasilan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai untuk mengurangi Kemiskinan pada Tahun 2025:

1. Membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, pasar serta akses air bersih, untuk mendukung akses masyarakat dan meningkatkan perekonomian lokal.
2. Peningkatan kualitas SDM, melalui pelatihan keterampilan kerja, pendidikan vokasi dan program kewirausahaan bagi pemuda.
3. Memperkuat koordinasi melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).
4. Menyalurkan bantuan sosial secara tepat sasaran dengan menggunakan data kemiskinan yang terupdate.
5. Menerapkan program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan keterampilan masyarakat melalui pelatihan dan penyediaan modal untuk usaha kecil dan menengah (UKM).

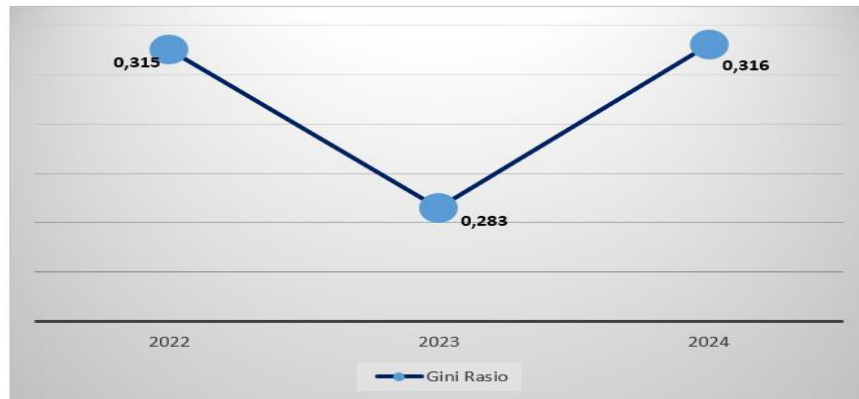
5. Gini Rasio

Indeks Gini adalah salah satu ukuran umum untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Indeks Gini ada diantara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai indeks Gini adalah 0 (nol) artinya terdapat pemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai 1 (satu) berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna. Adapun interpretasi tingkat ketimpangan adalah sebagai berikut:

- lebih dari 0,5 adalah tingkat ketimpangan tinggi
- antara 0,30 - 0,5 adalah tingkat ketimpangan sedang
- kurang dari 0,30 adalah tingkat ketimpangan rendah

Gini ratio Kabupaten Banggai tahun 2025 belum rilis oleh BPS kabupaten Banggai sehingga masih menggunakan data tahun 2024 dengan ideks Gini Kabupaten Banggai sebesar 0,316 ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banggai memiliki ketimpangan sedang.

Grafik 3.12
Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Banggai, Tahun 2022-2024



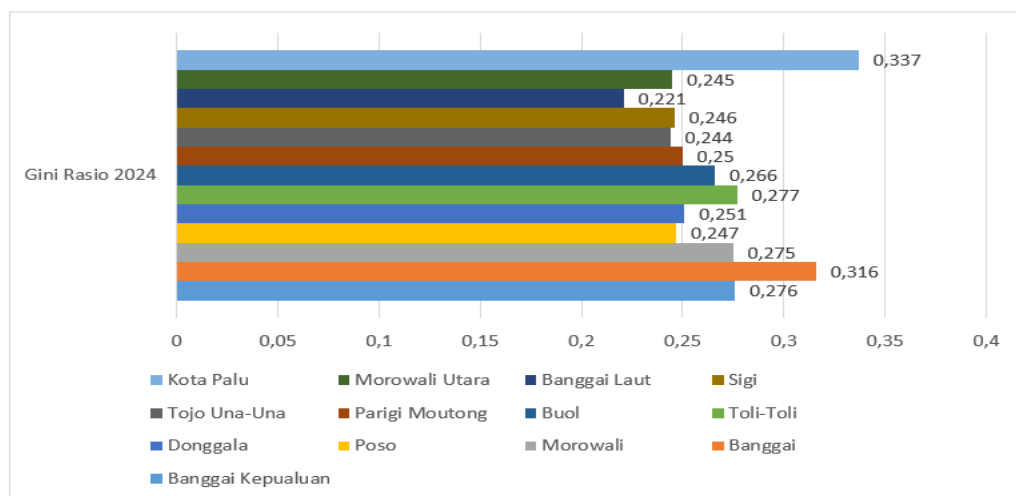
Sumber : BPS Sulteng, 2025

Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Banggai selama periode 2022-2024 fluktuatif. Gini Ratio Kabupaten Banggai tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,033 dari tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan kembali meningkat dan masuk dalam kategori ketimpangan rendah. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor ekonomi dan sosial.

Tabel 3.22
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD 2021-2026

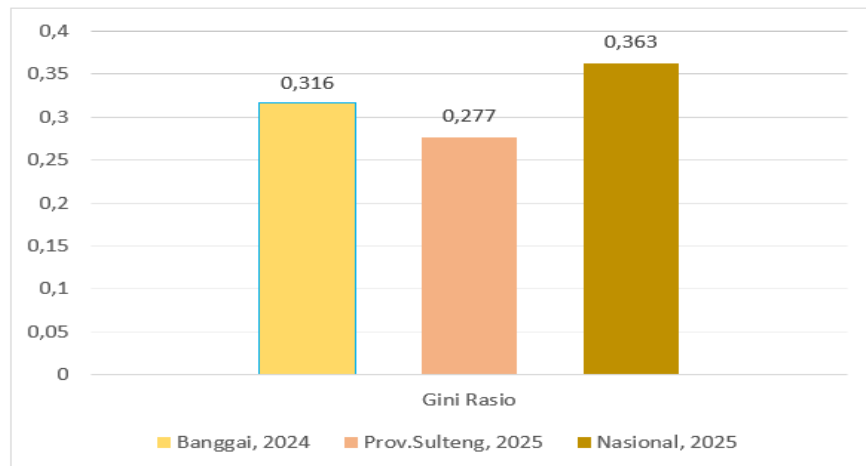
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Target Akhir RPJMD 2026	Capaian (%)
Gini Rasio	Angka	0,316	0,277	85,92

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Gini Rasio Menurut Provinsi, Kabupaten/Kota di Sulawesi



Sumber : BPS Prov.Sulteng, 2025

Grafik 3.14
Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Banggai Tahun 2024 dengan
Gini Rasio Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional September 2025



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Nilai Gini Rasio Kabupaten Banggai tahun 2024 jika dibandingkan dengan Gini Rasio Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dan Gini Rasio Nasional Tahun 2025, bahwa tingkat ketimpangan di Kabupaten Banggai tahun 2024 termasuk kategori ketimpangan sedang, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sulawesi Tengah yang berada pada kategori rendah, namun masih lebih rendah dibandingkan tingkat ketimpangan Nasional yang juga berada pada kategori sedang.

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan tingkat ketimpangan di Kabupaten Banggai, yaitu:

1. Pertumbuhan sektor ekonomi Kabupaten Banggai yang banyak bergantung pada sektor perdagangan, perikanan, pertanian, dan jasa yang masih menjadi sumber penghidupan utama masyarakat.
2. Pengembangan UMKM yang dapat memberikan peluang usaha dan lapangan kerja bagi Masyarakat.

Beberapa faktor yang menyebabkan tingkat ketimpangan belum dapat ditekan lebih rendah sehingga mempengaruhi ketimpangan, yaitu:

1. Kualitas pendidikan di daerah perkotaan atau yang lebih berkembang lebih baik dibandingkan dengan daerah pedesaan, yang menyebabkan ketimpangan antara kelompok yang berpendidikan tinggi dan yang rendah.
2. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang belum merata. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau wilayah yang kurang berkembang tidak mendapatkan akses yang sama terhadap peluang ekonomi yang ada.

3. Terbatasnya akses permodalan bagi usaha kecil, sehingga menghambat pengembangan usaha bagi masyarakat yang berpendapatan rendah.

Adapun langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk pencapaian ditahun mendatang antara lain :

1. Pemberian akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan.
2. Pemerataan Pembangunan wilayah, khususnya pembangunan infrastruktur di wilayah perdesaan dan di daerah terpencil.
3. Peningkatan akses Pendidikan, pelatihan kerja, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

Pelaksanaan sasaran “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera” di dukung oleh program-program :

Tabel 3.23
Program dan Anggaran Yang Mendukung Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera”

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
Pengelolaan Pendidikan	180.044.550.506,00	168.968.640.972,00	93,85
Pengembangan Kurikulum	135.744.800,00	129.112.800,00	95,11
Pendidik dan Tenaga Kependidikan	129.773.000,00	129.235.000,00	99,59
Pengendalian Perizinan Pendidikan	54.944.500,00	48.058.500,00	87,47
Pembangunan Bahasa dan Sastra	261.147.340,00	224.069.340,00	85,80
Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	163.659.310.855,00	132.557.748.699,85	80,99
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.574.122.000,00	1.467.758.244,00	93,24
Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	853.726.125,00	615.212.980,00	72,06
Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	799.465.500,00	427.284.000,00	53,45
Pemberdayaan Sosial	5.177.270.000,00	4.037.597.586,00	77,98
Rehabilitasi Sosial	2.573.359.500,00	1.836.573.151,00	71,36
Perlindungan dan Jaminan Sosial	9.771.152.350,00	8.923.689.481,00	91,32
Penanganan Bencana	1.223.539.750,00	1.030.495.108,00	84,22
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	429.763.000,00	427.040.500,00	99,36
Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	176.540.700,00	173.200.600,00	98,11
Penempatan Tenaga Kerja	135.801.800,00	129.352.348,00	95,25
Hubungan Industrial	4.530.164.412,00	4.380.350.983,00	96,69
Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	782.101.500,00	773.224.980,00	98,87
Perlindungan Perempuan	132.048.500,00	115.997.000,00	87,84
Pemenuhan Hak Anak (PHA)	622.177.500,00	620.225.250,00	99,69
Pengendalian Penduduk	438.579.500,00	419.666.500,00	95,69
Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	9.729.566.538,00	7.743.492.825,00	79,59
Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.795.270.000,00	2.768.472.881,00	99,04

Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	633.649.000,00	553.933.142,00	87,42
Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	14.659.259.472,00	11.617.649.288,00	79,25
Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	785.300.000,00	785.300.000,00	100,00
Pembinaan Perpustakaan	1.632.117.273,00	1.605.055.778,00	98,34
Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	66.324.300,00	66.110.300,00	100,00
Jumlah	403.806.769.721,00	183.605.907.264,85	45,47

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP2KBP3A, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas pembangunan manusia kabupaten banggai yang produktif dan Sejahtera” diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 100,18% dengan persentase anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar 45,47%.

Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Perdagangan, Industri Rumah Tangga, Koperasi dan UMKM serta Pertumbuhan Wirausaha Baru

Tabel. 3.24
Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025

	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Kontribusi Usaha Perdagangan, Koperasi, UMKM dan IKM terhadap PDRB	%	5,2	5,17	99,42
	Rata-rata capaian kinerja				99,42

Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2025

Realisasi Kontribusi Usaha Perdagangan, Koperasi, UMKM dan IKM tahun 2025 merupakan data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai yang dihitung berdasarkan komponen Perdagangan Besar dan Eceran, dimana yang termasuk dalam perdagangan besar yaitu kegiatan ekspor dan yang termasuk dalam perdagangan eceran yaitu pada koperasi, UMKM dan IKM.

Perdagangan besar di Kabupaten Banggai dilakukan melalui transaksi ekspor dan impor, Komoditas andalan ekspor Kabupaten Banggai yang diperdagangkan terutama berasal dari sebagian besar potensi sumber daya alam dan hasil industri domestik, yang di dominasi oleh amonia dan natural gas. Kontribusi ekspor kelompok komoditas lainnya (non migas), didominasi oleh komoditas kelapa serta hasil perikanan laut, yaitu tepung kelapa, minyak kelapa, dan gurita beku.

Tabel 3.25
Daftar Eksportir SKA
Kabupaten Banggai Tahun 2025

Nama Eksportir	Jenis Komoditi	Jumlah				Negara Tujuan
		Quantity	USD	Rp	SKA	
PT. PANCA AMARA UTAMA (PAU)	Amonia	565.138,600 TNE	189.116.956,92	3.184.729.554.532,80	52	Korea, China, Jepang
PT. DONGGI SENORO LNG (LNG)	Natural Gas	396.205,42 TNE	243.758.935,00	4.104.900.465.400,00	7	Korea
PT. SASL AND SONS INDONESIA	Tepung dan Minyak Kelapa	4.924.132,230 KGM	117.687.469,88	1.981.856.992.779,20	203	Uruguay, Denmark, Kolombia, Ekuador, Afrika, Polandia, Arab, Afrika Utara, Korea, Amerika, Belanda, Beraisil, Kanada, Spanyol, China, Argentina, Afrika Selatan, Australia, Rusia, Kindom
PT. MEDCO E & TOMORI SULAWESI	Condensate	240.153,080 BBL	15.780.458,89	265.742.927.707,60	1	Korea
PT PERTAMINA EP	Condensate	14.054.950,000 KGM	8.214.932,92	138.339.470.372,80	4	Korea
PT PERTAMINA HULU ENERGI TOMORI SULAWESI	Condensate	89.904.384,000,00 KGM	52.751.711,73	888.338.825.533,20	4	Korea
CV. INDOTROPIC FISHERY	Gurita Beku	150.149,820 KGM	868.555,97	14.626.482.534,80	9	Meksiko, Vietnam, Australia, Jepang
JUMLAH			628.179.021,31	10.578.534.718.860,40	280	

Sumber : Disdagrin Kab.Banggai, 2025

Nilai Eksport Non Migas Kabupaten Banggai tahun 2025 untuk komoditas tepung terigu dan minyak kelapa mengalami peningkatan volume yang sangat signifikan sebesar 4.924.132,230 Kgm atau 99,43% dari volume ekspor tahun 2024 sebesar 2.469.141,020 Kgm, sedangkan gurita beku tahun 2025 dengan volume 150.149,820 Kgm mengalami penurunan dari tahun 2024 dengan volume 436.471,240 Kgm atau turun 65,60%.

Komoditas tepung kelapa dan minyak kelapa mengalami peningkatan nilai ekspor sangat drastis, tidak hanya karena kenaikan volume tetapi juga dapat disebabkan oleh : peningkatan permintaan terhadap produk turunan kelapa, peningkatan kualitas produk, peningkatan harga komoditas kelapa di pasar, serta adanya perluasan pasar ekspor. Pertumbuhan sangat tinggi ini menunjukkan bahwa sektor perkebunan kelapa menjadi komoditas unggulan ekspor Kabupaten Banggai, dimana produk turunan kelapa memiliki nilai tambah yang tinggi karena digunakan dalam berbagai industri global.

Sedangkan pada komoditas gurita beku mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti : penurunan permintaan pasar sehingga

para eksportir mengurangi jumlah produksinya, adanya perusahaan eksportir yang berhenti beroperasi atau sudah tidak melakukan produksi.

Usaha Kecil adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Berikut Jumlah Usaha Kecil menurut Kecamatan di Kabupaten Banggai tahun 2024 sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai.

Tabel 3.26
Jumlah Usaha Kecil di Kabupaten Banggai Berdasarkan Jenis Industri
Tahun 2025

No	Jenis Usaha	Jumlah Industri
1	Industri Jasa Reparasi	19
2	Industri Furniture	3
3	Industri Pakaian Jadi	7
4	Industri Kayu	-
5	Industri Pengolahan	6
6	Industri Makanan/ Minuman	59

Sumber: BPS Kab. Banggai, Banggai Dalam Angka 2026

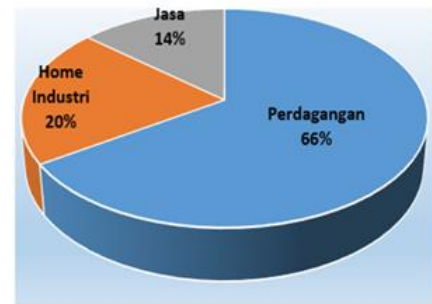
Distribusi jumlah entitas dalam berbagai sektor industri menunjukkan dominasi yang sangat besar oleh industri pengolahan dibandingkan dengan sektor lainnya. Beberapa industri lain, seperti jasa reparasi, makanan/minuman, dan furniture, memiliki kontribusi yang lebih kecil, sementara sektor tertentu hampir tidak memiliki representasi. Ketimpangan ini mencerminkan perbedaan dalam pertumbuhan dan perkembangan industri, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor seperti kebijakan ekonomi, Tingkat permintaan pasar, dan daya saing antar sektor.

Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pelaku usaha di kabupaten banggai tahun 2025 berdasarkan sektor usaha secara

keseluruhan berjumlah 11.221 yang meliputi sektor usaha perdagangan berjumlah 7.375 atau 66% dari jumlah pelaku usaha, untuk sektor usaha home industri berjumlah 2.312 atau 20% dari jumlah pelaku usaha, sedangkan sektor usaha jasa berjumlah 1.534 atau 14% dari jumlah pelaku usaha.

Gambar 3.2
Pelaku Usaha berdasarkan Sektor Usaha di Kabupaten Banggai Tahun 2025



Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kab.Banggai . 2025

Perdagangan adalah sektor yang paling dominan, yang menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha mikro di Kabupaten Banggai yang terlibat dalam kegiatan jual beli barang dan jasa. Sektor home industri menunjukkan adanya kreativitas dan usaha rumahan yang berpotensi berkembang. Sedangkan Jasa sektor yang lebih kecil dibandingkan perdagangan dan home industri, namun tetap memiliki kontribusi penting.

Selain dari sektor UKM dan IKM, sektor koperasi juga memiliki kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Banggai. Koperasi merupakan suatu organisasi bisnis yang dioperasikan serta dimiliki oleh orang/seorang untuk kepentingan bersama. Koperasi berlandaskan sebuah kegiatan dengan berdasarkan prinsip gerak ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Berikut jumlah koperasi aktif di Kabupaten Banggai tahun 2025:

Tabel 3.27
Jumlah Koperasi di Kabupaten Banggai, Tahun 2025

No	Nama Koperasi	Jumlah
1.	Koperasi Unit Desa (KUD)	18
2.	Koperasi KPRI	24
3.	Koperasi ABRI	2
4.	Koperasi Pensiunan	1
5.	Koperasi Wanita (Kopwan)	11
6.	Koperasi Kopinkra	1
7.	Koperasi Perikanan (Kopnel)	12
8.	Koperasi Simpan Pinjam (KSP)	20
9.	Koperasi Serba Usaha (KSU)	46
10.	Koperasi Karyawan (Kopkar)	10
11.	Koperasi Koppontren	2
12.	Koperasi Tani (Koptan)	12
13.	Koperasi Produsen	24
14.	Koperasi Kopermas	1
15.	Koperasi lainnya	1

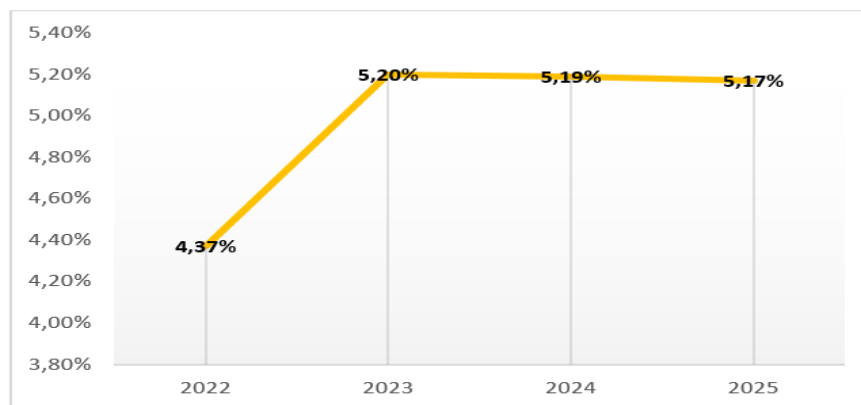
16.	Koperasi Jasa	12
17.	Koperasi Konsumen	9
18.	Koperasi Pemasaran	1
Jumlah		207

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai, 2025

Jumlah koperasi di Kabupaten Banggai adalah 207 koperasi, dengan rincian: koperasi aktif sebanyak 145 atau 70,05% dari total koperasi di Kabupaten Banggai dan 62 koperasi tidak aktif atau 29,95% dari total koperasi di Kabupaten Banggai. Selain itu ditahun 2025 telah dibentuk koperasi desa merah putih yang berjumlah 291, dan koperasi kelurahan merah putih berjumlah 46. Koperasi yang tidak aktif membutuhkan perhatian dalam hal pengembangan koperasi, baik melalui pelatihan pengelolaan koperasi atau penciptaan peluang ekonomi yang dapat mendukung keberlanjutan koperasi. Meskipun ada koperasi aktif, terdapat sejumlah koperasi yang tidak berfungsi atau tidak lagi beroperasi yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti pengelolaan yang kurang baik atau kurangnya kegiatan ekonomi yang mendukung kelangsungan koperasi

Grafik 3.15

Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kontribusi Usaha Perdagangan, Koperasi, UMKM dan IKM terhadap PDRB Tahun 2025 dengan Beberapa TahunTerakhir



Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2025

Realisasi Kinerja Indikator Kontribusi Usaha Perdagangan, Koperasi, UMKM dan IKM terhadap PDRB pad tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 0,02 point atau sebesar 0,39% penurunannya dibandingkan tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum peran sektor sektor perdagangan, koperasi, UMKM, dan IKM terhadap PDRB masih cukup stabil, meskipun mengalami sedikit penurunan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penurunan tersebut, antara lain:

1. Adanya sektor ekonomi lain yang mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi seperti pertambangan, konstruksi, pertanian.

2. Sebagian UMKM dan IKM menghadapi kendala seperti : keterbatasan modal usaha, perubahan pola konsumsi masyarakat, persaingan dengan produk industri besar, dan akses pasar yang terbatas.

Namun demikian terdapat Upaya yang telah dilakukan melalui program-program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian indikator Kontribusi Usaha Perdagangan, Koperasi, UMKM dan IKM terhadap PDRB, meliputi:

1. Program perizinan dan pendaftaran Perusahaan melalui kegiatan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan, kegiatan penerbitan surat keterangan asal (SKA) merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menciptakan tata Kelola perdagangan yang tertib, transparan, dan terintegrasi. Melalui pemberian izin usaha yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa kegiatan perdagangan berlangsung secara legal serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha serta memperkuat pengawasan terhadap kegiatan usaha perdagangan di Kabupaten Banggai.
2. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan melalui kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, monitoring dan evaluasi pengelola pasar, pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat diwilayah kerjanya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran distribusi barang serta memperkuat aktivitas perdagangan di pasar rakyat, sehingga meningkatkan nilai transaksi ekonomi.
3. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dengan melakukan kegiatan pengecekan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di agen/toko dan pasar rakyat, serta Pengendalian

harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar, dan untuk menstabilkan harga dilaksanakan kegiatan pasar murah.



4. Program Pendidikan dan pelatihan perkoperasian, dimana koperasi memiliki peran strategis dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Melalui kegiatan pelatihan, sosialisasi yang bertujuan untuk memahami tata Kelola manajemen koperasi, peningkatan SDM bagi pengurus koperasi sehingga dapat mengelola koperasi yang berbasis digitalisasi, meningkatnya kemampuan pengurus dalam menyusun perencanaan dalam pengembangan usaha koperasi.



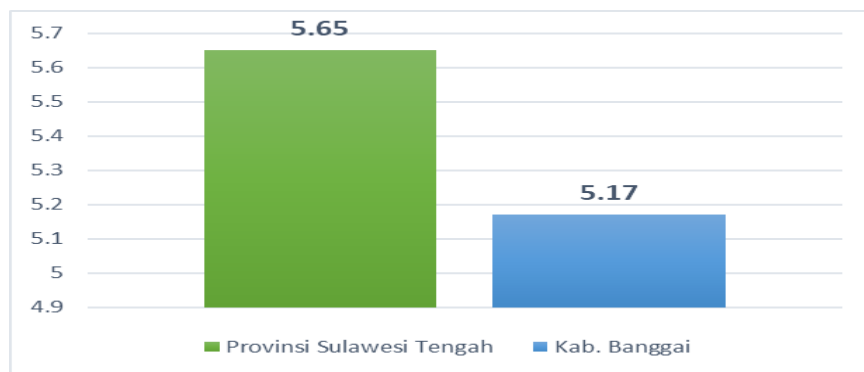
5. Program pemberdayaan usaha menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) melalui kegiatan pelatihan kewirausahaan manajemen usaha dan pelatihan kewirausahaan digital marketing bagi pelaku usaha mikro, yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usahanya, meningkatkan kemampuan dalam pemasaran produk, mendorong untuk berinovasi dalam pengembangan produk usaha, meningkatkan pengetahuan pelaku usaha dalam memanfaatkan media digital untuk pemasaran produk.



Tabel 3.28
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025
dengan Target Akhir RPJMD 2021-2026

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Target Akhir RPJMD 2026	Capaian (%)
Kontribusi Usaha Perdagangan, Koperasi, UMKM dan IKM terhadap PDRB	%	5,17	5,7	90,7

Grafik 3.16
Perbandingan Kontribusi usaha perdagangan, koperasi, UMKM dan IKM terhadap PDRB Kabupaten Banggai dengan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025



Sumber : BPS Sulteng, Prov. Sulteng dalam Angka 2026

Kontribusi usaha perdagangan, koperasi, UMKM dan IKM terhadap PDRB Kabupaten Banggai dengan Provinsi Sulawesi Tengah masih berada dibawah capaian Provinsi Sulawesi Tengah yaitu selisih 0,48 point, persentase tersebut menunjukkan bahwa peran sektor ekonomi kerakyatan di Kabupaten Banggai relatif belum optimal dibandingkan rata-rata provinsi. Hal ini dikarenakan jumlah usaha di sektor perdagangan, koperasi, UMKM, dan IKM jauh lebih banyak dibandingkan dengan di Kabupaten Banggai. Akses transportasi, konektivitas antar wilayah, serta jaringan distribusi barang dan jasa bisa menjadi kendala bagi pelaku usaha dalam memasarkan produknya secara luas. Jika infrastruktur belum optimal, biaya logistik menjadi lebih tinggi sehingga daya saing usaha menurun. Selain itu Kabupaten Banggai dikenal memiliki sektor ekonomi yang lebih dominan di bidang industri ekstraktif seperti pertambangan dan perikanan. Jika sektor perdagangan dan UMKM tidak menjadi fokus utama, maka kontribusinya terhadap PDRB relatif lebih rendah dibandingkan sektor lain.

Untuk meningkatkan kontribusi sektor perdagangan, koperasi, UMKM dan IKM terhadap PDRB Kabupaten Banggai pada tahun mendatang, dilakukan beberapa upaya, antara lain :

1. Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha, melalui pelatihan manajemen usaha, peningkatan kualitas produk, inovasi, serta pemanfaatan teknologi digital.
2. Penguatan akses permodalan, melalui fasilitasi kerja sama dengan perbankan, program kredit usaha rakyat (KUR), dan pembiayaan melalui koperasi.
3. Mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan marketplace, media sosial, guna memperluas jangkauan pasar.
4. Peningkatan kualitas dan standarisasi produk, melalui pendampingan sertifikasi halal, PIRT, merek dagang, serta peningkatan kualitas kemasan produk.
5. Penguatan kemitraan usaha, dengan mendorong kerja sama antara UMKM dengan industri besar, ritel modern, serta memperluas jaringan distribusi produk lokal.

Program-program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran “Meningkatnya Kualitas Perdagangan, Industri Rumah Tangga, Koperasi dan UMKM serta Pertumbuhan Wirausaha Baru”, yaitu:

Tabel. 3.29
Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2025
Yang Mendukung sasaran Meningkatkan Kualitas Perdagangan, Industri Rumah
Tangga, Koperasi dan UMKM serta Pertumbuhan Wirausaha Baru

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	44.568.000,00	43.752.960,00	98,17
Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	145.985.483,00	137.800.292,00	94,39
Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	113.383.500,00	106.442.000,00	93,87
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	302.288.300,00	279.097.520,00	92,87
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperas	971.069.600,00	971.069.600,00	100,00
Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	2.728.968.165,00	2.489.374.889,00	92,22
Pengembangan UMKM			
Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	40.578.100,00	40.418.100,00	99,61
Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.234.332.485,00	1.121.179.280,00	90,83
Stabilisasi Harga Barang	1.533.328.700,00	1.372.525.700,00	91,21

Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting			
Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	294.055.500,00	291.296.500,00	99,06
Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.018.406.150,00	971.825.256,00	95,43
Pengendalian Izin Usaha Industri	18.157.700,00	16.681.700,00	91,87
Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	61.784.100,00	57.689.900,00	93,37
Jumlah	8.506.905.783,00	7.899.153.697,00	92,86

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab.Banggai, 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas perdagangan, industri rumah tangga, koperasi dan UMKM serta pertumbuhan wirausaha baru diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 99,42% dengan persentase anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar 92,86%.

Sasaran Straetgis : Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Perdesaan

Tabel. 3.30
Realisasi Indiaktor Kinerja Tahun 2025

	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Desa Maju Berdasarkan IDM	%	72,50	47,08	64,94
	Rata-rata capaian kinerja				64,94

Sumber : Dinas PMD Kab.Banggai, data diolah 2025

Indeks desa membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan. Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni: Desa Sangat Tertinggal; Tertinggal; Desa Berkembang; Desa Maju; dan Desa Mandiri. Klasifikasi dalam 5 status Desa tersebut juga untuk menajamkan penetapan status perkembangan Desa dan sekaligus rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan.

Tabel. 3.31
Status Desa berdasarkan IDM di Kabupaten Banggai Tahun 2025

Status Desa	Jumlah Desa	Persentase
Mandiri	76 Desa	26,12
Maju	137 Desa	47,08

Berkembang	78 Desa	26,80
Tertinggal	0	0
Sangat Tertinggal	0	0
Jumlah Desa di Kabupaten Banggai	291 Desa	100

Sumber : DPMD Kab.Banggai, 2025

Desa mandiri merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik. Secara teknis Desa mandiri merupakan desa dengan nilai Indeks mulai dari 79,63% sampai dengan 100%. Desa maju merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah baik. Secara teknis Desa maju merupakan desa dengan nilai Indeks mulai 69,35% sampai dengan 79,62%. Desa berkembang merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah cukup baik. Secara teknis Desa berkembang merupakan desa dengan nilai Indeks mulai dari 57,39% sampai dengan 69,34%. Desa tertinggal merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih terbatas. Secara teknis Desa tertinggal merupakan desa dengan nilai Indeks mulai dari 49,49% sampai dengan 57,38%. Desa sangat tertinggal merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih sangat terbatas. Secara teknis Desa sangat tertinggal merupakan Desa dengan nilai Indeks mulai dari 0% sampai dengan 49,48%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2025 sebagian besar desa di Kabupaten Banggai telah mencapai status maju, berkembang dan mandiri, dari data diatas bahwa Kabupaten Banggai sudah tidak terdapat lagi desa yang tertinggal dan sangat tertinggal. Hal ini mencerminkan perkembangan yang cukup baik di Kabupaten Banggai dalam hal pembangunan desa. Namun berdasarkan capaian realisasi tahun 2025 sebesar 47,08 menunjukkan bahwa target peningkatan status desa menjadi desa maju di Kabupaten Banggai belum tercapai secara optimal. Hal ini berarti masih terdapat sejumlah desa yang berada pada kategori desa berkembang sehingga mempengaruhi persentase desa maju secara keseluruhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan dalam pembangunan desa yang

mencakup dimensi ketahanan social, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan masih memerlukan penguatan melalui berbagai program dan kegiatan yang lebih terarah.

Tabel. 3.32
Status Perkembangan berdasarkan Status IDM Kabupaten Banggai, 2022-2025

Status Desa / Village Status	Jumlah Kelurahan / Desa / Number of Village							
	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%
Desa Mandiri	7	2,40%	9	3,09%	56	19,24	76	26,12
Desa Maju	118	40,54%	160	54,98%	151	51,89	137	47,08
Desa Berkembang	163	56,01%	121	41,58%	84	28,87	78	26,80
Desa Tertinggal	3	1,03%	1	0,34%	0	0	0	0
Desa Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Desa	291							

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2025

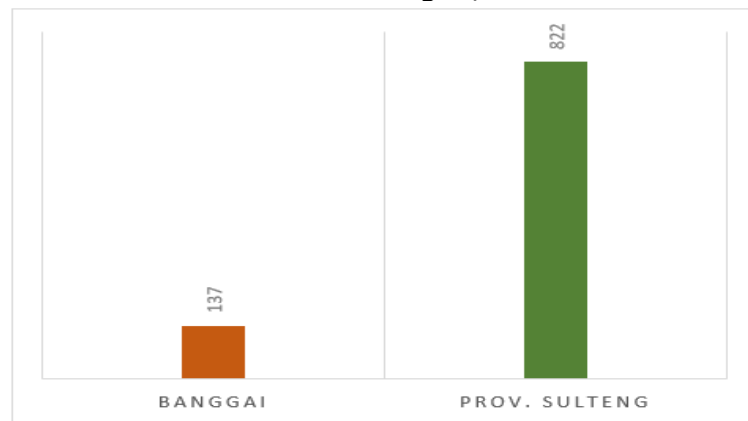
Berdasarkan status desa tersebut menunjukkan pencapaian yang luar biasa dalam pengurangan desa berkembang terjadi perbaikan kualitas hidup di seluruh desa. Perubahan status desa dari tahun ke tahun menunjukkan kemajuan dalam pembangunan desa.

Bila dibandingkan IDM Kabupaten Banggai dengan IDM Kabupaten/Kota dan Provinsi di Sulawesi Tengah, Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Banggai berada pada ranking ketiga setelah Kabupaten Donggala dan Morowali Utara dengan nilai IDM sebesar 0,7504, seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.33
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD 2021-2026

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Target Akhir RPJMD 2026	Capaian (%)
Persentase Desa Maju Berdasarkan IDM	%	47,08	75,00	62,77

Grafik 3.17
Status Desa Maju berdasarkan IDM Kabupaten Banggai terhadap
Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2025



*Sumber : Kemendes dan Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal, 2025*

Kemajuan dan kemandirian desa sangat ditentukan oleh sejauh mana kemampuan antara pemerintah desa dengan kewenangan desa dan keuangan desanya mampu berkolaborasi atau kerja sama dengan kelembagaan desa serta dukungan partisipasi masyarakat untuk dapat mengelola potensi desanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi, sosial dan budaya.

Dalam pencapaian desa maju berdasarkan IDM, telah dilaksanakan program-program yang mendukung dan memberi dampak terhadap pencapaian tersebut yaitu:

1. Program peningkatan Kerjasama desa.
2. Program administrasi pemerintahan desa, dengan melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa.
3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, dengan pelaksanaan fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat hukum adat, fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan, fasilitasi pengembangan usaha ekonomi Masyarakat dan pemerintahan desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa, fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna.

Belum optimalnya pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terjadi dalam perkembangan dan kemajuan status desa di Kabupaten Banggai antara lain :

1. Terbatasnya kapasitas dan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam mengelola dan mengembangkan potensi .
2. Ketimpangan pembangunan antar desa sehingga menciptakan ketidakadilan sosial dan ekonomi.
3. Keterbatasan akses teknologi informasi dan digitalisasi, serta kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi.
4. Kondisi geografis beberapa desa yang susah terjangkau sehingga menghambat akses pelayanan dasar, ekonomi, dan infrastruktur.
5. Rendahnya pengembangan potensi ekonomi lokal dan BUMDes
6. Kondisi ekonomi dan sosial masyarakat

Alternatif solusi yang dapat diterapkan meliputi:

1. Peningkatan kapasitas aparatur desa, melalui pelatihan perencanaan Pembangunan desa berbasis data.
2. Pemberdayaan ekonomi, melalui penguatan BUMDes dan pemanfaatan potensi lokal.
3. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi perkembangan desa, sehingga dapat dilakukan intervensi atas program secara lebih tepat sasaran.
4. Meningkatkan intensitas pembinaan dan pendampingan desa, khususnya bagi desa dengan status berkembang agar dapat naik menjadi desa maju.

Program-program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran “Persentase Desa Maju Berdasarkan IDM”, yaitu:

Tabel. 3.34
Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2025
Yang Mendukung sasaran Persentase Desa Maju Berdasarkan IDM

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
Penataan Desa	547.890.700,00	536.856.400,00	97,99
Peningkatan Kerjasama Desa	128.961.500,00	121.856.000,00	94,49
Administrasi Pemerintahan Desa	7.744.301.650,00	7.512.234.859,00	97,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	1.887.310.300,00	1.789.596.638,00	94,82
Jumlah	10.308.464.150,00	9.960.543.897,00	96,62

Sumber : DPMD Kab.Banggai, 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran meningkatnya kemandirian ekonomi perdesaan diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 64,94% dengan

persentase anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar 96,62%.

Sasaran Strategis : Tersedianya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas, Layak dan Merata Untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Konektivitas

Tabel. 3.35
Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Infrastruktur dasar dan Infrastruktur wilayah dalam kondisi baik	%	78,00	76,20	97,69
Rata-rata capaian kinerja				97,69

Sumber : Dinas PUPR Kab.Banggai, 2025 (data diolah)

Pencapaian atas sasaran tersedianya infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur wilayah yang berkualitas, layak dan merata untuk penanggulangan kemiskinan dan konektivitas dengan indikator persentase infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah dalam kondisi baik pada tahun 2025 menunjukkan pencapaian sebagai berikut :

Tabel 3.36
Capaian Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Wilayah dalam kondisi baik Tahun 2025

Infrastruktur Dasar dan wilayah	Realisasi
Irigasi kabupaten dalam kondisi baik	71,51%
Rumah Tangga dengan akses air minum layak	95,06%
Rumah tangga dengan akses sanitasi layak dan aman	94,06%
Bangunan Negara berfungsi baik	74,50%
Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	37,94%
Pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	75,30%
Kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang	85,00%
Rata-rata capaian	76,20%

Sumber : Dinas PUPR, 2025

Berdasarkan tabel diatas mencerminkan tingkat pencapaian atau realisasi yang dicapai dalam hal pembangunan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah deskripsi lebih lanjut atas pencapaian tersebut:

1. Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (71,51%)

Sampai dengan Tahun 2025 Kabupaten Banggai memiliki saluran irigasi dengan total panjang 355,504 Kilometer, yang terbagi berupa Saluran Primer

sepanjang 46,68 Kilometer, Saluran Sekunder sepanjang 93,20 Kilometer, Saluran Tersier sepanjang 215,62 Kilometer. Sekitar 71,51% dari sistem irigasi yang ada di kabupaten ini berada dalam kondisi yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar jaringan irigasi berfungsi dengan



efektif, yang sangat penting untuk mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan di wilayah tersebut. Didukung dengan program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) melalui kegiatan yang dilaksanakan yaitu kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berupa rehabilitasi dan pemeliharaan saluran irigasi telah dilakukan secara sistematis oleh Pemerintah Kabupaten Banggai bekerja sama dengan masyarakat, sehingga pengelolaan dan pemeliharaan irigasi yang baik akan meningkatkan hasil pertanian dan keberlanjutan produksi pangan.

2. Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak (95,06%)

Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak adalah proporsi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum dari fasilitas air yang memenuhi standar kelayakan, baik dari segi kualitas, keamanan, maupun



kemudahan akses. Dengan demikian sebanyak 95,06% rumah tangga di Kabupaten Banggai telah memiliki akses terhadap air minum yang layak, yang berarti hampir sebagian besar masyarakat sudah memperoleh air bersih yang memenuhi standar kesehatan.

Angka ini menunjukkan kemajuan yang baik dalam penyediaan air minum yang aman bagi masyarakat. Hingga tahun 2025 ini terdapat 116.731 rumah tangga yang memiliki akses air minum layak dan proyeksi total rumah tangga di Kabupaten Banggai sebanyak 122.792 rumah tangga, yang didukung dengan program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum melalui kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan, Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum

(SPAM) Jaringan Perpipaan. Dengan adanya program ini sehingga dapat memberi dampak yang positif seperti :

- meningkatkan kualitas hidup masyarakat lebih mudah mendapatkan air bersih untuk kebutuhannya sehari-hari seperti minum, memasak, dan mandi.
- Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Air minum yang bersih dan layak membantu mengurangi penyakit yang ditularkan melalui air seperti:diare,kolera,tifus.
- Efisiensi Waktu dan Tenaga Masyarakat tidak perlu lagi mengambil air dari sumber yang jauh karena air sudah tersedia melalui jaringan distribusi

3. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak dan Aman (94,06%)

Terdapat 94,06% rumah tangga di Kabupaten Banggai yang telah memiliki akses terhadap sanitasi yang layak dan aman, yang mencakup sistem pembuangan air



limbah yang memadai dan tidak mencemari lingkungan. Hingga tahun 2025 terdapat 115.498 Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak dari proyeksi total Rumah Tangga di kabupaten Banggai sebanyak 122.792 Rumah Tangga.

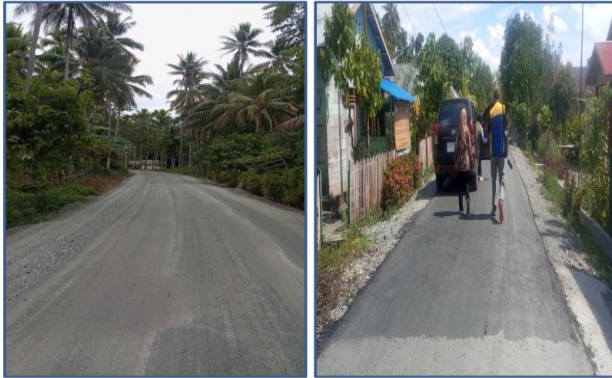
4. Bangunan Negara Berfungsi Baik (74,50%)

Terdapat 74,50% bangunan negara berfungsi dengan baik, yang berarti masih banyak bangunan pemerintah atau fasilitas publik yang memerlukan pemeliharaan dan renovasi dengan kondisi kerusakan yang bervariasi. Hingga tahun 2025 jumlah bangunan negara sebanyak 187 Unit dari jumlah total kebutuhan bangunan pemda sebanyak 251 unit, hal ini menunjukkan bahwa masih perlunya perhatian yang cukup besar untuk meningkatkan kondisi bangunan negara, karena hal tersebut dapat mempengaruhi efektivitas layanan publik dan citra pemerintah.

5. Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap (37,94%)

Pengertian jalan dalam kondisi mantap didefinisikan sebagai kondisi jalan dalam keadaan baik, sedang, dan rusak. Dengan demikian terdapat 37,94% jalan kabupaten yang berada dalam kondisi mantap atau baik. Sampai dengan tahun 2025 panjang jalan menurut jenis permukaan jalan di Kabupaten Banggai sebagai berikut :

- Panjang jalan dalam kondisi baik sepanjang 278,310 Km
- Panjang jalan dalam kondisi sedang sepanjang 154,114 Km
- Panjang jalan dalam kondisi rusak ringan sepanjang 130,644 Km
- Panjang jalan dalam kondisi rusak berat sepanjang 579,683 Km



Ini menunjukkan bahwa sebagian besar jalan kabupaten masih dalam kondisi yang buruk atau rusak berat sehingga perlu perbaikan. Kondisi jalan yang buruk sangat berpengaruh pada aksesibilitas dan mobilitas penduduk, serta distribusi barang

dan layanan. Peningkatan infrastruktur jalan menjadi prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup. Adapun program yang mendukung yaitu program penyelenggaraan jalan melalui pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan berupa pembangunan jalan dengan indikator panjang jalan yang dibangun, rekonstruksi jalan dengan indikator panjang jalan yang direhabilitas, rehabilitas jalan. Dengan adanya program ini sehingga dapat memberi dampak yang positif seperti:

- Mempermudah Mobilitas Masyarakat
- Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
- Membuka Akses Wilayah Terpencil
- Meningkatkan Akses Layanan Publik
- Meningkatkan Keselamatan Transportas

6. Pelaku Jasa Konstruksi yang Memenuhi Standar Kompetensi (75,30%)

Terdapat 75,30% pelaku jasa konstruksi di daerah ini memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar kontraktor dan pekerja konstruksi sudah memiliki kualifikasi yang memadai. Meskipun lebih dari separuh pelaku jasa konstruksi sudah memenuhi standar kompetensi, hampir 24,70% masih belum memenuhi syarat. Ini dipengaruhi oleh adanya kendala pelaksanaan fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi jabatan operator dan teknis atau analis yang hanya dapat terfasilitasi sebanyak 152 peserta untuk uji sertifikasi jenjang 1 dan jenjang 5 dari 205 peserta, disebabkan karena

ketatnya regulasi sertifikasi terbaru yang mensyaratkan standar kualifikasi pengalaman kerja dan kualifikasi Pendidikan tertentu.

7. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang (85,00%)
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang harus dilakukan secara berjenjang dan terintegrasi, mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Setiap tingkat pemerintahan diwajibkan menyusun Rencana Tata Ruang (RTR) sebagai pedoman utama dalam perencanaan pembangunan, pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang. Di tingkat daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) umumnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) agar memiliki kekuatan hukum mengikat.

Di Kabupaten Banggai, pemanfaatan ruang wilayah hingga saat ini masih berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Banggai. Selama lebih dari 12 tahun implementasinya, Pemerintah Kabupaten Banggai telah berupaya menyesuaikan kebijakan, rencana, dan program pembangunan agar tetap berada dalam koridor RTRW. Namun, dinamika pembangunan yang sangat pesat di berbagai sektor seperti permukiman, industri, infrastruktur, dan pertambangan telah menimbulkan tekanan yang semakin besar terhadap ketersediaan dan kualitas ruang wilayah. Permasalahan pemanfaatan ruang juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi pertumbuhan penduduk, peningkatan kebutuhan lahan, serta aktivitas ekonomi yang berkembang di dalam wilayah Kabupaten Banggai. Sementara itu, faktor eksternal berasal dari kebijakan dan program pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, seperti penetapan kawasan strategis nasional atau proyek pembangunan berskala besar, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi arah pembangunan daerah. Kondisi ini menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap muatan RTRW Kabupaten Banggai agar tetap relevan, selaras dengan kebijakan di atasnya, serta mampu menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan di masa depan.

Sebanyak 85% pemanfaatan ruang di wilayah ini sudah sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, yang berarti sebagian besar pengembangan lahan dan pemukiman sudah terencana dengan baik. Kesesuaian dengan

rencana tata ruang penting untuk mencegah penyalahgunaan lahan dan untuk memastikan pengembangan wilayah yang teratur. Namun, ada 15% pemanfaatan ruang yang perlu menjadi perhatian dalam penataan dan pengawasan pembangunan.

Rata-rata pencapaian dari seluruh indikator persentase infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah dalam kondisi baik adalah 77,14%, yang menunjukkan bahwa masih ada tantangan besar dalam meningkatkan kualitas dan cakupan infrastruktur di Kabupaten Banggai. Meskipun ada beberapa area dengan pencapaian tinggi (seperti akses air minum dan sanitasi), namun terdapat juga area yang menunjukkan pencapaian rendah (seperti kondisi jalan kabupaten). Pencapaian rata-rata ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih besar dalam meningkatkan infrastruktur dasar yang masih kurang optimal.

Tabel 3.37

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir dan target Akhir RPJMD 2021-2026

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi				Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
		2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase Infrastruktur dasar dan Infrastruktur wilayah dalam kondisi baik	%	71,91	60,20	69,12	76,20	80,00	95,25

Dalam pencapaian tersebut terdapat upaya-upaya yang telah dilakukan meliputi :

1. Kolaborasi yang efektif antara pemerintah, stakeholders terkait dan masyarakat dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan.
2. Monitoring dan evaluasi rutin memungkinkan identifikasi dini terhadap masalah yang muncul sehingga dapat segera diselesaikan.
3. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan Air Minum (SPAM).
4. Pembangunan sistem penyediaan Air Minum (SPAM) bukan jaringan Perpipaan dan jaringan perpipaan.
5. Peningkatan penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) setempat.
6. Pelaksanaan inventarisasi dan penilaian kondisi bangunan Negara.

7. Pengawasan teknis yang intensif dalam kualitas pengerjaan di lapangan yang terjaga sehingga jalan yang ditangani dapat dikategorikan dalam kondisi "Mantap" sesuai standar penilaian yang berlaku

Terdapat kendala yang di hadapi dalam meningkatkan persentase infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah dalam kondisi baik:

1. Beban Kendaraan Berlebih (Overload) di beberapa ruas kabupaten yang mempercepat laju kerusakan jalan.
2. Karakteristik geografis yang beragam merupakan daerah pegunungan, Lembah dan pesisir sehingga kondisi ini membuat pembangunan infrastruktur menjadi lebih sulit.
3. Keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dasar dan wilayah, menjadi kendala utama sehingga membatasi skala dan kualitas pembangunan yang dapat dilakukan.
4. Terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas.
5. Adanya perubahan iklim seperti banjir, longsor, dan kekeringan, dapat merusak infrastruktur yang ada dan menghambat pembangunan infrastruktur baru.
6. Rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam kepatuhan terhadap aturan rencana tata ruang.
7. Belum tersedianya sistem informasi yang dapat digunakan bagi penyelenggaraan pelayanan KRK maupun KKPR Non Berusaha secara online.

Solusi yang bisa diterapkan untuk peningkatan pencapaian persentase infrastruktur dasar dan wilayah dalam kondisi baik:

1. Pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien untuk pembangunan infrastruktur seperti dengan memprioritaskan jalan yang rusak parah dengan mengidentifikasi jalan yang paling vital dan banyak digunakan, serta memprioritaskan pemeliharaan/renovasi terhadap bangunan dengan fungsi vital (rumah sakit, sekolah, kantor pemerintah).
2. Menjalinkan kerja sama dengan pihak lain, seperti perusahaan swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan.
3. Mendorong partisipasi masyarakat melalui forum konsultasi dan sosialisasi.
4. Melakukan perencanaan infrastruktur yang berkelanjutan dan tahan terhadap perubahan iklim.

5. Melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat dan pelaku pembangunan mengenai pentingnya mematuhi rencana tata ruang untuk mencegah penyalahgunaan lahan.

Program-program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran “Tersedianya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas, Layak dan Merata Untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Konektivitas”, yaitu:

Tabel. 3.38
Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2025
Yang Mendukung sasaran Tersedianya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan
Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas, Layak dan Merata Untuk Penanggulangan
Kemiskinan dan Konektivitas

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	36.974.674.629,91	35.148.522.806,00	95,06
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	19.751.648.135,00	17.070.822.721,00	86,43
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	4.770.569.879,00	4.650.202.421,00	97,48
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.598.738.000,00	3.524.658.945,00	97,94
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	38.797.694.544,00	37.026.301.156,00	95,43
Penataan Bangunan Gedung	106.545.118.844,21	98.936.651.087,00	92,86
Penataan Bangunan dan Lingkungannya	45.083.791.611,23	43.539.120.606,00	96,57
Penyelenggaraan Jalan	200.677.977.940,19	192.879.030.261,00	96,11
Pengembangan Jasa Konstruksi	1.369.379.675,00	455.208.126,00	33,24
Penyelenggaraan Penataan Ruang	4.050.482.100,00	3.514.798.357,00	86,77
Pengembangan Perumahan	400.114.000,00	322.254.000	80,54
Kawasan Permukiman	2.671.944.900,00	2.564.750.276,00	95,99
Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	10.695.569.840,00	9.109.891.140,00	85,17
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	73.384.000,00	70.342.695,00	95,86
Pengelolaan Tanah Kosong	49.700.100,00	46.703.600,00	93,97
Penatagunaan Tanah	50.944.500,00	29.498.480,00	57,90
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	18.828.634.287,00	15.841.976.881,00	84,14
Pengelolaan Pelayaran	642.557.400,00	578.450.350,00	90,02

Informasi dan Komunikasi Publik	1.950.081.200,00	1.465.534.763,00	94,33
Aplikasi Informatika	25.279.681.750,00	25.131.173.523,00	99,41
Jumlah	522.262.687.335,54	491.905.892.194,00	94,19

Sumber : Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, Dinas Perhubungan, DKISP Kab.Banggai, 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran meningkatnya tersedianya infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur wilayah yang berkualitas, layak dan merata untuk penanggulangan kemiskinan dan konektivitas diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 98,17% dengan persentase anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar 94,19%.

Sasaran Strategis : Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah Melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana

Tabel 3.39
Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025

	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Nilai	Rendah	Rendah	100
	Rata-rata capaian kinerja				100

Sumber : BPBD Kab.Banggai, 2025

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menggambarkan seberapa tangguh atau kuat suatu daerah dalam menghadapi tantangan, seperti bencana alam, krisis ekonomi, dan faktor lainnya. Nilai indeks ketahanan daerah ini biasanya dihitung berdasarkan beberapa indikator, seperti aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan.

Penilaian Indeks Ketahanan Daerah yaitu dengan mengisi kuisioner 7 parameter Indeks Ketahanan Daerah. Dalam 7 parameter Indeks Ketahanan Daerah sendiri, terdapat 7 prioritas dan 71 indikator. Setiap indikator, diturunkan menjadi 4 pertanyaan kunci. 7 prioritas tersebut terdiri dari :

- Prioritas Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan
- Prioritas Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu
- Prioritas Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik
- Prioritas Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
- Prioritas Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana

- Prioritas Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
- Prioritas Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

Nilai indeks ketahanan daerah berada pada rentang nilai 0 – 1, dengan pembagian kelas tingkat ketahanan daerah:

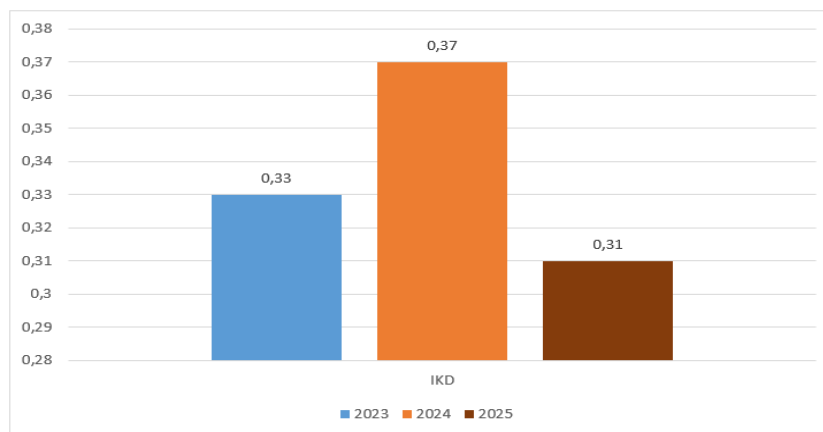
- Indeks $\leq 0,4$ adalah Rendah
- Indeks 0,4 – 0,8 adalah Sedang
- Indeks 0,8 – 1 adalah Tinggi

Nilai indeks ketahanan daerah merepresentasikan tingkat ketahanan daerah dalam suatu wilayah kabupaten/kota, sehingga hal tersebut secara spasial dianggap bahwa seluruh wilayah dalam 1 daerah memiliki nilai indeks yang sama. Namun, nilai indeks tersebut memiliki skala pembagian rentang nilai yang berbeda terhadap indeks bahaya dan kerentanan.

Pemerintah Kabupaten Banggai mencatat capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) tahun 2025 sebesar 0.31, angka tersebut menunjukkan tingkat ketahanan daerah berada pada kategori rendah.

Grafik 3.18

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Terakhir



Tabel 3.40

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD 2021-2026

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Target Akhir RPJMD 2026	Capaian (%)
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Nilai	Rendah	Sedang	50

Tabel 3.41
Nilai IKD dan IRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2025

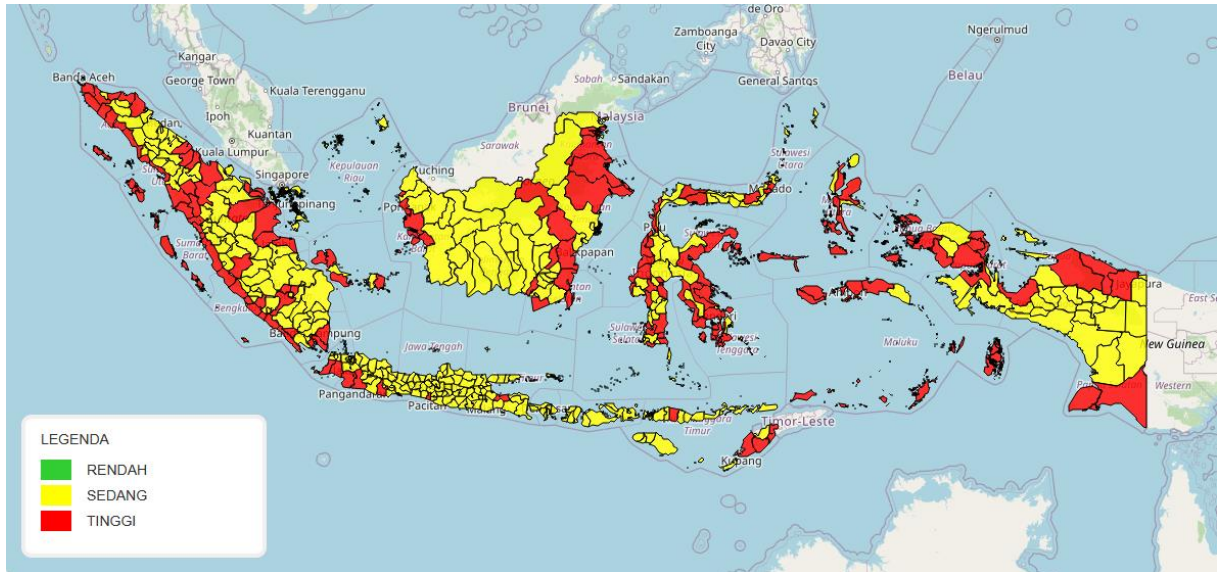
Kabupaten/Kota	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks Resiko Bencana (IRB)
Banggai Kepulauan	Tidak Menilai	197,45
Banggai	0,31	249,33
Morowali	0,35	230,08
Poso	0,43	159,09
Donggala	0,44	199,74
Toli-Toli	0,44	189,16
Buol	0,25	242,93
Parigi Moutong	0,48	121,08
Tojo Una-Una	0,30	264,05
Sigi	0,55	126,74
Banggai Laut	0,20	209,98
Morowali Utara	0,30	232,94
Kota Palu	0.74	132,58

Sumber : BPBD Kota Palu, 2025

Tabel diatas menunjukkan adanya disparitas yang cukup besar antara ketahanan daerah dan tingkat risiko bencana di berbagai kabupaten/kota. Nilai indeks ini berkisar antara 0 hingga 1, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat ketahanan yang lebih baik. Nilai Tertinggi yaitu Kota Palu (0,74) memiliki nilai Indeks Ketahanan Daerah tertinggi di antara kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.

Indeks ketahanan daerah Kabupaten Banggai tahun 2025 dengan Nilai 0,31 menunjukkan bahwa Kabupaten Banggai memiliki tingkat ketahanan yang relatif rendah atau sangat rentan, meskipun tidak berada di posisi terendah. Dengan nilai 0,31 menunjukan Kabupaten Banggai menghadapi tantangan dalam hal pengembangan infrastruktur yang kuat dan pengelolaan sumber daya secara efisien. Hal ini dapat mencakup masalah dalam ketersediaan fasilitas dasar, ketahanan ekonomi, serta akses terhadap layanan publik. Kabupaten Banggai masih perlu meningkatkan sistem dan kebijakan yang dapat memperkuat ketahanan daerah, baik dalam menghadapi bencana alam, perubahan iklim, atau krisis sosial dan ekonomi.

Gambar 3.3
Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2025



Sumber : <https://inarisk.bnpb.go.id/irbi>, 2025

Indeks Resiko Bencana menunjukkan potensi tingkat risiko bencana yang dihadapi daerah. Nilai 249,33 menunjukkan bahwa Kabupaten Banggai memiliki risiko bencana yang cukup tinggi. Nilai yang relatif tinggi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banggai memiliki tingkat kerentanannya terhadap bencana alam yang cukup besar. Bencana yang bisa terjadi antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, atau longsor, mengingat letak geografis dan kondisi alamnya. Karena itu Kabupaten Banggai perlu meningkatkan upaya mitigasi bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Peningkatan kapasitas dalam merespon bencana, seperti pelatihan untuk masyarakat, perencanaan infrastruktur tahan bencana, serta sistem peringatan dini, sangat penting untuk mengurangi dampak dari bencana yang dapat terjadi.

Tabel 3.42
Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Banggai, Tahun 2025

Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam - Banjir	Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam - Gempa Bumi	Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam - Tanah Longsor
Toili	5	15	-
Toili Barat	3	7	-
Moilong	2	15	-
Toli Jaya	2	10	-
Batui	8	11	-
Batui Selatan	2	2	-
Bunta	1	-	-
Nuhon	2	9	-
Simpang Raya	-	-	-

Kintom	11	14	-
Luwuk	-	2	1
Luwuk Timur	7	13	-
Luwuk Utara	-	9	-
Luwuk Selatan	1	9	-
Nambo	3	8	-
Pagimana	4	7	4
Bualemo	5	-	-
Lobu	1	-	-
Lamala	1	12	-
Masama	3	12	1
Mantoh	-	9	-
Balantak	-	3	-
Balantak Selatan	2	11	-
Balantak Utara	-	-	-
Banggai	63	178	6

Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2025

Bencana yang paling sering terjadi di Kabupaten Banggai adalah gempa bumi, dengan total 178 kejadian tersebar di berbagai kecamatan. Beberapa kecamatan relatif lebih aman, seperti Simpang Raya dan Balantak Utara yang tidak ada kejadian bencana sama sekali. Kecamatan dengan tingkat kejadian bencana tinggi seperti Toili, Kintom, dan Luwuk Timur, dengan seringnya terjadi bencana dapat mengindikasikan tingkat kerentanan yang tinggi dan kapasitas mitigasi yang perlu ditingkatkan. Sedangkan kecamatan dengan sedikit atau tanpa kejadian bencana menunjukkan kondisi geografis yang lebih stabil atau sistem mitigasi bencana yang lebih efektif. Jenis bencana yang sering terjadi di Kabupaten Banggai adalah banjir dan gempa bumi, menunjukkan perlunya peningkatan infrastruktur drainase, reboisasi, serta mitigasi perubahan iklim untuk mengurangi dampaknya.

Capaian indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) tersebut tidak lepas dari adanya factor pendukung, sebagai berikut:

1. Melakukan peningkatan SDM Tim Reaksi Cepat (TRC) penanggulangan bencana melalui kegiatan bimtek dan sosialisasi.
2. Sinergitas dan komitmen bersama antar Perangkat Daerah dalam penanganan kejadian kedaruratan/bencana.
3. Melaksanakan workshop lintas sektor yang bertujuan memberikan pemahaman kepada dinas, Lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya terkait IKD sebagai alat ukur kapasitas penanggulangan bencana daerah, untuk membangun koordinasi lintas sektor guna penyusunan strategi penanggulangan bencana yang terintegrasi, dan untuk menghasilkan rekomendasi penyusunan kajian risiko

bencana atau KRB dan rencana penanggulangan bencana yang lebih efektif dalam rangka mengurangi risiko bencana daerah.

4. Penyediaan jalur evakuasi dan pemasangan rambu-rambu keselamatan.

Untuk mencapai IKD tersebut, erdapat beberapa kendala yang dihadapi, serta solusi yang telah atau dapat dilakukan, yaitu:

➤ Kendala-Kendala yang dihadapi:

- Belum tersedianya Balai Latihan dan Pusat Simulasi Bencana untuk pelatihan Masyarakat dan petugas.
- Belum tersedia Alat Komunikasi Darurat berupa telepon satelit, internet darurat.
- Belum tersedia Kendaraan Operasional seperti kendaraan berat (eskavator, truk serbaguna/truk logistik).
- Belum tersedia Penerangan darurat seperti lampu tenaga surya.
- Belum tersedia Sarana Pemulihan Psikososial (ruang trauma healing, pusat konseling, layanan psikolog).
- Peningkatan SDM Tim Reaksi Cepat (TRC) penanggulangan bencana yang belum memadai.
- Keterbatasan Infrastruktur Mitigasi Bencana, sistem drainase yang kurang optimal menyebabkan genangan air dan memperparah banjir di wilayah rawan.
- Keterbatasan Sumber Daya, kekurangan tenaga ahli dalam manajemen kebencanaan dan pemetaan risiko.
- Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat terhadap mitigasi bencana
- Perubahan Iklim yang memperburuk kondisi, Perubahan pola hujan dan peningkatan suhu global memperparah kejadian banjir, dan tanah longsor.

➤ Alternative Solusi yang dilakukan, sebagai berikut:

1. Membangun komitmen lintas Perangkat Daerah dalam penanganan kejadian kedaruratan/bencana yang lebih intens.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana & prasarana penanggulangan bencana.
3. Peningkatan Infrastruktur Mitigasi Bencana
 - Pembangunan dan rehabilitasi drainase di daerah rawan banjir.
 - Pembangunan tanggul dan penguatan garis pantai untuk mencegah abrasi di daerah pesisir.

- Reboisasi dan penghijauan kembali kawasan rawan longsor.
4. Penguatan Kapasitas Masyarakat dan Edukasi Mitigasi Bencana

- Sosialisasi dan simulasi bencana secara rutin, bekerja sama dengan BNPB dan BPBD.
- Pelatihan relawan bencana di tingkat desa agar masyarakat lebih siap menghadapi bencana.
- Penyediaan jalur evakuasi yang jelas dan pemasangan rambu-rambu keselamatan.



5. Optimalisasi Sumber Daya, dengan peningkatan jumlah tenaga ahli di bidang kebencanaan melalui pelatihan dan rekrutmen.

6. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum

Pada sasaran strategis Meningkatnya ketahanan bencana daerah melalui peningkatan kapasitas pemda dan masyarakat dalam penanggulangan bencana dilaksanakan melalui program penanggulangan bencana. Pada program ini melakukan kegiatan yaitu :

1. Melaksanakan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana kepada masyarakat termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana. Sebagai upaya meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi ancaman bencana yang ada di wilayahnya, sehingga dapat mendukung upaya pengurangan risiko bencana serta peningkatan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana, sehingga dampak kerugian yang ditimbulkan dapat diminimalkan.



2. Melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota, melalui pelatihan, bimtek, simulasi penanganan bencana, serta penguatan pemahaman terkait prosedur

tetap dan sistem komando penanganan darurat bencana. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis dalam melakukan asesmen cepat, pengumpulan dan analisis data lapangan, penyampaian laporan situasi, serta koordinasi dengan instansi terkait dan relawan kebencanaan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas dan kesiapsiagaan Tim Reaksi Cepat dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang terjadi di wilayah kabupaten/kota. Dengan meningkatnya kapasitas TRC, proses penanganan awal bencana dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien sehingga dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat, lingkungan, dan infrastruktur.

3. Melaksanakan kegiatan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana, dengan sasaran masyarakat dan kelompok rentan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah daerah maupun masyarakat, dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman, pengetahuan, serta keterampilan kepada peserta terkait langkah-langkah strategis dalam mengidentifikasi potensi ancaman bencana, mengurangi risiko bencana, serta melakukan tindakan pencegahan secara efektif dan terkoordinasi.

Pelaksanaan kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kesiapsiagaan daerah terhadap bencana serta meningkatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang efektif, terpadu, dan berkelanjutan.



4. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana yang diwujudkan dengan pembentukan desa tangguh bencana. Kegiatan ini merupakan upaya strategis dalam meningkatkan kapasitas dan efektivitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Penguatan kelembagaan dilakukan melalui



peningkatan koordinasi, sinkronisasi, serta penguatan peran perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terpadu, terencana, dan berkelanjutan.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Melalui penguatan kelembagaan, diharapkan terwujud sistem penanggulangan bencana yang responsif, koordinatif, dan mampu meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana.

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi berbagai aktivitas antara lain fasilitasi koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas aparatur dan relawan



kebencanaan, penguatan peran forum pengurangan risiko bencana, serta pengembangan mekanisme kerja sama antar lembaga dalam penanggulangan bencana. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung

penguatan struktur organisasi, tata kelola, serta sistem kerja dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah semakin kuat, sehingga mampu meningkatkan kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan pascabencana secara lebih efektif serta mendukung terwujudnya masyarakat yang tangguh terhadap bencana.

Program yang mendukung sasaran “Meningkatnya ketahanan bencana daerah melalui peningkatan kapasitas pemda dan masyarakat dalam penanggulangan bencana”, sebagai berikut :

Tabel 3.43

Program yang mendukung sasaran Meningkatkan Ketahanan Bencana Daerah Melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.852.125.040,00	1.692.869.800,00	91,40
Penanggulangan Bencana	5.960.414.925,00	5.421.981.445,00	90,97
Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	5.260.109.224,00	4.784.569.235,00	90,96
Jumlah	13.072.649.189,00	11,899,420,480,00	91,03

Sumber : BPBD, SatPolPP, Dinas Damkar Kab.Banggai, 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran meningkatnya ketahanan bencana daerah melalui peningkatan kapasitas Pemda dan masyarakat dalam penanggulangan bencana diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dengan persentase anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar 91,03 %.

Sasaran Strategis : Meningkatnya Investasi dan Pengelolaan Potensi Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah

Tabel. 3.44
Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025

	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Kontribusi Sektor Pertanian, perikanan dan pertambangan terhadap PDRB	%	35,30	45,44	128,73
2	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	89,53	76,35	85,28
Rata-rata capaian kinerja					107,00

Sumber : BPS Kabupaten Banggai, BKP Kementan, 2025

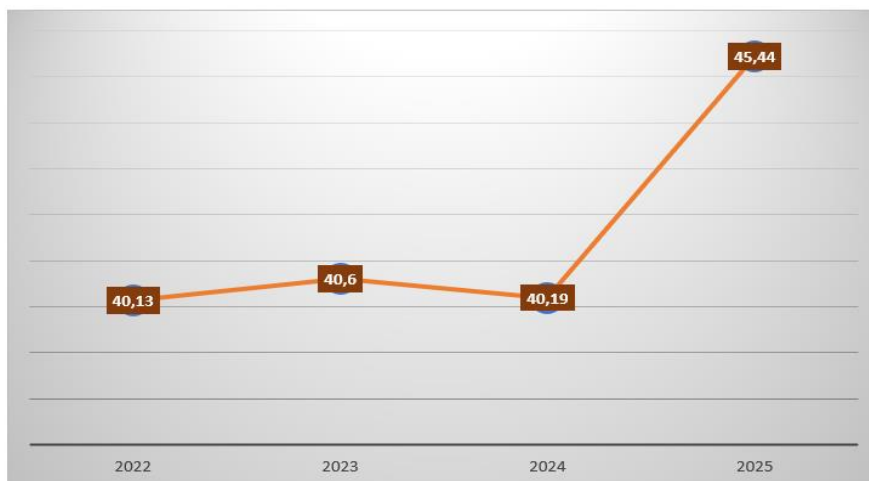
Pencapaian atas sasaran meningkatnya investasi dan pengelolaan potensi pertanian, perikanan dan kelautan serta pertambangan untuk mendukung perekonomian daerah terhadap kedua indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 107,00% dengan kategori "Sangat Memuaskan".

1. Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan, dan Pertambangan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian, perikanan dan pertambangan terhadap PDRB diperoleh dari kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 22,49% dan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian sebesar 22,95%. Sektor pertambangan dan penggalian tetap menjadi kontributor terbesar PDRB Kabupaten Banggai di tahun 2025, dengan adanya aktivitas industri pengolahan nikel, migas, dan komoditas tambang lainnya. Sektor pertanian dan perikanan sebagai penggerak utama ekonomi terbesar kedua. Sehingga sektor ini merupakan tulang punggung ekonomi kerakyatan.

Grafik 3.19

Perbandingan realisasi indikator kinerja Kontribusi Sektor Pertanian, perikanan dan pertambangan terhadap PDRB tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir



Sumber : BPS Kab.Banggai, 2025

Perkembangan kontribusi sektor pertanian, perikanan, dan pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Banggai selama periode tahun 2022 hingga 2025 menunjukkan dinamika yang relatif stabil pada tiga tahun awal, kemudian mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun terakhir. Perubahan yang paling mencolok terjadi pada tahun 2025, di mana kontribusi sektor pertanian, perikanan, dan pertambangan melonjak signifikan menjadi 45,44 persen. Kenaikan sebesar 5,25 poin persentase dibandingkan tahun 2024 ini menunjukkan adanya penguatan yang sangat besar pada sektor primer (berasal dari aktivitas pemanfaatan sumber daya alam baik bersifat hayati maupun non-hayati). Lonjakan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain peningkatan produksi komoditas unggulan, naiknya harga komoditas di pasar, ekspansi aktivitas pertambangan, atau bahkan penurunan relatif kontribusi sektor lain sehingga proporsi sektor primer menjadi lebih besar.

Tabel 3.45

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Banggai, 2021–2025

Lapangan Usaha/Industry		2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	22,53	18,52	21,61	21,72	22,49
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	22,12	21,61	19,01	18,47	22,95

Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2025

Sektor Pertanian masih merupakan sektor yang sangat menentukan perekonomian Kabupaten Banggai, karena sebagian besar penduduk mempunyai mata pencaharian dengan bercocok tanam, dari keseluruhan desa/kelurahan di Kabupaten Banggai sekitar 93,98% merupakan daerah dengan potensi sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan.

Secara keseluruhan, sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan menjadi salah satu motor utama dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai. Perkebunan dan perikanan memberikan kontribusi besar melalui ekspor dan industri olahan, sementara tanaman pangan dan hortikultura berperan penting dalam ketahanan pangan.

Tabel 3.46
Potensi Sektor Pertanian dan Perikanan
di Kabupaten Banggai

Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Perikanan
Padi Jagung Ubi Kayu Ubi Jalar Kacang Tanah Kacang Hijau	Bawang Merah Cabai Besar Kentang Kubis Bawang Putih Petsai Tomat	Kelapa Sawit Kelapa Cengkeh Kopi Kakao Jambu Mente Kapuk Tembakau Kemiri Sagu Pala Lada	a. Ternak Besar meliputi : ▪ Sapi ▪ Kerbau ▪ Kuda b. Ternak Kecil meliputi : ▪ Kambing ▪ Domba ▪ Babi	a. Perikanan Tangkap meliputi : ▪ Ikan Cakalang ▪ Tongkol ▪ Tuna ▪ Udang b. Perikanan Budidaya meliputi : ▪ Jaring apung laut ▪ Jaring apung tawar ▪ Jaring tangkap tawar ▪ Keramba ▪ Kolam air deras ▪ Kolam air tenang ▪ Minapadi sawah ▪ Rumput Laut ▪ Tambak intensif ▪ Tambak sederhana ▪ Tambak semi intensi

Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2025

Tabel 3.47
Produksi dan Produktivitas
Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan
Tahun 2025

Produksi dan Produktivitas	Jumlah
Produksi Tanaman Pangan per hektar per tahun	296.13,84 ton
Produktivitas Tanaman Pangan per hektar per tahun	5.21 ton/ha
Produksi Tanaman Hortikultura per hektar per tahun	6.604.00 ton
Produktivitas Tanaman Hortikultura per hektar per tahun	5.67 ton/ha

Produksi Tanaman Perkebunan per hektar per tahun	73.329,31 ton
Produktivitas Tanaman Perkebunan per hektar per tahun	1.01 ton/ha

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 2025

Pencapaian hasil produksi dan produktivitas tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan disebabkan oleh dukungan yang intens oleh dinas terkait yaitu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam melakukan pembinaan terhadap petani dan pelaku usaha disektor pertanian, khususnya dibidang tanaman pangan dan tanaman perkebunan.

Tanaman Pangan

Tanaman Pangan adalah sektor yang paling efisien dan berhasil mencapai produksi dan produktivitas yang baik. Hal ini dipengaruhi oleh profil budidaya yang dijalankan oleh petani, seperti jenis lahan, teknik penanaman, penggunaan sarana dan prasarana produksi, serta faktor lain, seperti program bantuan pemerintah, keanggotaan kelompok tani (institusi petani) dan dampak perubahan iklim.

Usaha Tanaman Pangan dari tahun ke tahun tetap mengalami perkembangan, hal ini di tunjang oleh program pemerintah yaitu melalui program intensifikasi yang bertujuan mendorong para petani agar melakukan usaha pertanian dengan berpedoman pada Panca Usaha Tani, yaitu menggunakan bibit unggul, pemupukan, pengendalian hama dan pengairan serta cara bercocok tanam yang baik. Disamping usaha intensifikasi juga dilakukan program ekstensifikasi melalui perluasan areal-areal pertanian. Keberhasilan produksi tanaman pangan selain adanya intensifikasi dan ekstensifikasi juga sangat ditentukan oleh keadaan musin yang terjadi pada saat musim tanam yang bersangkutan.

Pencapaian hasil produksi tanaman pangan disebabkan adanya penambahan luas lahan dan penambahan jumlah kali tanam dalam setahun, bukan karena peningkatan produktivitas lahan. Adapun jenis tanaman pangan di Kabupaten Banggai yaitu: Padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman Pangan di Kabupaten Banggai:

1. Perubahan iklim dan kondisi cuaca. Kekeringan atau curah hujan yang tidak terprediksi menyebabkan penurunan hasil.
2. Serangan hama dan penyakit dapat mengurangi hasil produksi.
3. Adopsi teknologi yang belum merata, seperti penggunaan benih unggul dan

alsintan modern sehingga menyebabkan hasil panen kurang maksimal.

4. Pengelolaan lahan yang kurang tepat, misalnya irigasi tidak efisien atau pemupukan tidak seimbang berdampak pada kualitas hasil panen.

Solusi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman Pangan di Kabupaten Banggai :

1. Memperbanyak/mengembangkan variasi tanaman pangan yang ditanam agar tidak bergantung pada satu komoditas.
2. Peningkatan penyuluhan kepada petani.
3. Memfasilitasi pelatihan untuk petani mengenai teknologi pertanian modern.
4. Memfasilitasi penyediaan benih unggul, pupuk, pestisida dan alsintan agar produksi pangan bertambah dan kualitasnya bisa menembus pasar modern.

Hortikultura

Hortikultura merupakan gabungan bahasa Latin, *hortus* yang mengandung arti kebun dan *culture* yang berarti bercocok tanam. Tanaman hortikultura adalah sebuah cara atau metode budidaya pertanian modern, atau kegiatan bercocok tanam seperti sayuran, buah ataupun tanaman hias yang menggunakan lahan dari kebun atau pekarangan rumah sebagai tempatnya.

Tanaman sayur-sayuran yang ada di Kabupaten Banggai terdiri dari bawang, merah, cabai besar, kentang, kubis, bawang putih, petsai, dan tomat. Melihat jenisnya tanaman sayur-sayuran di Kabupaten Banggai cukup bervariasi, ini menandai pengetahuan masyarakat akan sayur-sayuran cukup baik.

Berikut Data produksi tanaman hortikultura di Kabupaten Banggai selama tahun 2025:

Tabel 3.48
Produksi Tanaman Buah-Buahan Tahunan Menurut Jenis Tanaman
di Kabupaten Banggai (kuintal) Tahun 2025

Jenis Tanaman	Produksi Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan	Jenis Tanaman	Produksi Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan
Alpukat	1.696,00	Pepaya	27.586,00
Belimbing	598,00	Pisang	30.890,70
Jambu Air	1.452,00	Salak	200,00
Jambu Biji	41.120,00	Sawo	730,00
Jeruk Besar	80,00	Sirsak	1.021,00
Jeruk Siam	10.269,00	Sukun	1.014,00
Mangga	11.877,20	Buah Naga	3.844,00
Nangka	19.601,00	Jeruk Lemon	197,00
Nenas	1.254,00	Lengkeng	70,00

Sumber: BPS Kabupaten Banggai, 2025

Berdasarkan data produksi buah-buahan di Kabupaten Banggai pada tahun 2025, jambu biji mencatatkan produksi tertinggi dengan 41.120,00 kuintal, diikuti oleh pisang memiliki produksi yaitu 30.890,70 kuintal. Buah-buahan ini menunjukkan dominasi dalam sektor pertanian Kabupaten Banggai. Sementara itu, lengkung menempati posisi dengan produksi terendah hanya 70,00 kuintal, yang menunjukkan bahwa lengkung memiliki pasar yang lebih terbatas. Secara keseluruhan, buah-buahan tropis seperti pisang dan jambu biji menjadi komoditas unggulan di daerah ini.

Adapun jumlah produksi hortikultura Kabupaten Banggai Tahun 2025 sebagai berikut :

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Produksi Tanaman Biofarmaka, berupa: - Jahe (36.653 Kg) - Kencur (15.076 Kg) - Kunyit (48.230 Kg) - Laos/Lengkuas (15.768 Kg) - Lidah Buaya (550 Kg) - Sambiloto (5.000 Kg) - Temuireng (25 Kg) - Temukunci (25 Kg) - Temulawak (6.924 Kg) - Jeruk Nipis (147.625 Kg) - Serai (159.480 Kg) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim, berupa : - Bawang Daun (235 kuintal) - Bawang Merah (26.355 kuintal) - Bayam (2.205 kuintal) - Buncis (4.079 kuintal) - Kembang Kol (442 kuintal) - Cabai Rawit (14.736,70 kuintal) - Kacang Panjang (4.653 kuintal) - Kangkung (8.216,75 kuintal) - Ketimun (5.230 kuintal) - Kubis (2.245 kuintal) - Labu Siam (846 kuintal) - Melon (220 kuintal) - Petsai/Sawi (6.008 kuintal) - Stroberi (219 kuintal) - Terung (5.428 kuintal) - Tomat (12.784,80 kuintal) - Cabai Besar (3.358,50 kuintal) - Cabai Keriting (2.102,50 kuintal) - Semangka (865 kuintal) |
|---|---|

Sumber: BPS Kabupaten Banggai, 2025

Pencapaian hasil Produksi dan produktivitas tanaman hortikultura mengalami kendala yang disebabkan karena cuaca ekstrim dan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang tinggi sehingga menyebabkan sebagian besar tanaman hortikultura, khususnya jenis tanaman buah-buahan terjadi gugur bunga dan gagal panen yang pada akhirnya mengakibatkan produksi mengalami penurunan. Akan tetapi terjadi peningkatan yang signifikan terutama komoditi sayur-sayuran untuk kegiatan pengembangan kampung sayur dalam rangka mendukung program satu juta satu pekarangan.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman Hortikultura yaitu:

1. Melakukan pembinaan terhadap petani dan pelaku usaha disektor pertanian, khususnya dibidang tanaman pangan.
2. Peningkatan produksi karena penambahan luas lahan.
3. Pemberian bantuan alat pertanian dan bibit.
4. Melaksanakan penyuluhan kepada petani

Kendala-kendala yang dihadapi dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman Hortikultura di Kabupaten Banggai:

- a. Terkendala dalam distribusi hasil panen dan sistem pemasaran yang efisien.
- b. Kualitas benih dan penggunaan pupuk yang tidak sesuai atau kurang optimal.
- c. Ketergantungan pada harga pasar yang fluktuatif
- d. Permintaan yang tidak konsisten dapat mempengaruhi produksi.

Solusi dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman Hortikultura di Kabupaten Banggai:

- a. Membangun infrastruktur yang lebih baik, seperti jalan, fasilitas penyimpanan, dan pasar yang terorganisir dengan baik.
- b. Menyediakan pelatihan kepada petani tentang pemilihan benih yang baik, penggunaan pupuk yang tepat, serta teknik budidaya yang efisien untuk meningkatkan hasil dan kualitas produk.
- c. Mendorong petani untuk membangun hubungan langsung dengan pasar atau toko grosir sehingga mereka dapat memperoleh harga yang lebih baik.

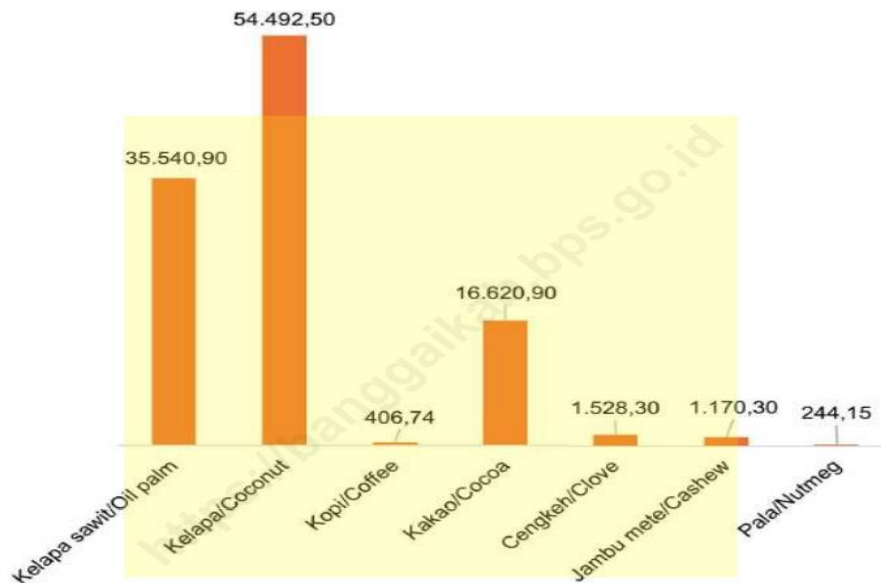
Perkebunan

Komoditas tanaman perkebunan adalah merupakan tanaman perdagangan yang cukup strategis di Kabupaten Banggai, karena tidak saja merupakan sumber penghasilan devisa disektor pertanian, tetapi lebih penting lagi adalah rangkaian kegiatan produksinya termasuk pengusaha dan pemasarannya dapat menciptakan lapangan kerja sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak.

Tanaman perkebunan yang ada di Kabupaten Banggai di dominasi oleh kelapa sawit, kelapa, cengkeh, kopi, kakao, jambu mente, kapuk, tembakau, kemiri, sagu, pala dan lada. Jika melihat dari luas dan produksinya, umumnya tanaman tersebut mengalami peningkatan, walaupun ada beberapa jenis tanaman perkebunan mengalami penurunan baik dari segi luas areal maupun produksinya. Hal ini

menunjukkan bahwa tanaman-tanaman lain tersebut telah mulai diperhatikan oleh para petani. Seluas 309.113 ha atau 32,86 persen terluas kedua adalah hutan produksi tetap seluas 55.526 ha atau 5,90 persen total luas hutan yang ada. Secara keseluruhan, sektor perkebunan memberikan kontribusi penting terhadap ekonomi daerah dan berpotensi terus meningkat produksinya.

Grafik 3.20
Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman
di Kabupaten Banggai (ton) Tahun 2025



Sumber : BPS, Banggai Dalam Angka 2026

Kendala-kendala yang dihadapi dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman Perkebunan di Kabupaten Banggai:

1. Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada tanaman perkebunan.
2. Infrastruktur perkebunan seperti irigasi dan jalan usaha tani belum seluruhnya dalam kondisi baik dan fungsional.
3. Perubahan Iklim dan Kerusakan Alam

Solusi yang dilakukan dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman Perkebunan di Kabupaten Banggai:

1. Meningkatkan sistem pertanian berkelanjutan.
2. Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Infrastruktur Pertanian.
3. Memberikan pelatihan kepada pekerja tentang teknik budidaya yang lebih baik, serta penerapan prinsip-prinsip manajemen yang efisien untuk meningkatkan hasil.
4. Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian dengan memastikan distribusi alat, benih, dan pupuk tepat sasaran.

5. Peningkatan koordinasi dengan kelompok tani agar bantuan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan.
6. meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan sarana pertanian.

Peternakan

Jenis-jenis ternak yang diusahakan di Kabupaten Banggai diklasifikasikan kedalam tiga bagian yaitu:

1. Ternak besar meliputi : sapi, kerbau, kuda
2. Ternak kecil meliputi: kambing, domba dan babi
3. Ternak unggas meliputi: ayam kampung, ayam ras, dan itik.

Sektor peternakan memiliki peran penting dalam perekonomian daerah, terutama dalam menunjang pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kabupaten Banggai memiliki potensi besar dalam bidang peternakan, yang dapat dilihat dari jumlah populasi ternak sapi, kerbau, kuda, kambing, dan babi. Selain dari jumlah populasi ternak, populasi unggas juga menunjang pertumbuhan PDRB Kabupaten Banggai.

Adapun jumlah populasi ternak dan unggas di Kabupaten Banggai Tahun 2025 sebagai berikut :

▪ Populasi Ternak menurut jenis Ternak:	▪ Populasi Unggas menurut jenis Unggas:
- Sapi (46.036 ekor)	- Ayam Buras (161.167 ekor)
- Kerbau (5 ekor)	- Itik dan Itik Manila (34.668 ekor)
- Kuda (6 ekor)	
- Kambing (10.261 ekor)	
- Babi (23.945 ekor)	

Sapi merupakan ternak dengan populasi tertinggi di Kabupaten Banggai, dengan total 46.036 ekor. Populasi sapi yang tinggi dikarena memiliki lahan luas yang cocok untuk padang penggembalaan dan peternakan intensif. Ternak Kambing merupakan ternak dengan populasi terbesar kedua, mencapai 10.261 ekor. Peternakan kambing umumnya lebih fleksibel dibandingkan sapi, sehingga dapat berkembang di daerah dengan lahan terbatas. Ternak Babi memiliki populasi total 23.945 ekor.

Produksi daging sapi dapat memberikan kontribusi positif terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banggai, terutama jika

lanjutan ini berkelanjutan dan didukung oleh kebijakan pemerintah daerah. Berikut jumlah produksi daging sapi menurut jenis produksi tahun 2025 : produksi daging-karkas 674.812,32 Kg, Produksi Daging – Skeletal 532.284,48 Kg, Produksi Daging – Jeroan 141.086,40 Kg, Produksi Daging - Daging Variasi 38.261,86 Kg, Produksi Daging - Jumlah Produksi Daging (Karkas) 854.160,58 Kg, Produksi Daging - Jumlah Produksi Daging (Meatyield) 711.632,74 Kg.

Unggas yang terdiri dari ayam buras, itik dan itik manila. Ayam buras menjadi unggas yang paling banyak dibudidayakan di Kabupaten Banggai dengan total populasi mencapai 161.167 ekor. Populasi itik dan itik manila di Kabupaten Banggai mencapai 34.668 ekor. Produksi daging unggas dapat memberikan kontribusi positif terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banggai. Berikut jumlah produksi daging unggas menurut jenis unggas : produksi daging ayam buras 277.913 Kg, produksi daging ayam ras petelur 205.607,53 Kg, produksi daging itik dan itik manila 22.131,22 Kg.

Faktor keberhasilan yang dicapai meliputi:

1. Optimalisasi Teknologi Produksi melalui Inseminasi Buatan (IB)
2. Peningkatan kapasitas SDM melalui Bimtek pelatihan juru sembelih halal bagi pelaku usaha peternakan yang memiliki usaha pemotongan.
3. Pemberian bantuan pakan ternak berkualitas dan alat mesin peternakan pada kelompok ternak
4. Pembangunan Kandang Layak Hewan: Keberhasilan pembangunan kandang untuk sapi, ayam KUB, dan ayam petelur yang sesuai dengan standar biosekuriti dan kesehatan hewan.
5. Pelayanan Kesehatan melalui inovasi Mantri Healing.
6. Pengendalian Pemotongan Betina Produktif
7. Pengawasan Lalu Lintas Ternak dengan Pengetatan izin usaha untuk menjamin keamanan produk peternakan.
8. Penyediaan Obat-Obatan dan Vaksin
9. Penyuluh yang responsif dan memiliki kompetensi teknis yang kuat

Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja indikator terdapat hambatan yang dihadapi :

1. Ancaman wabah (PMK/ASF)

2. Tidak semua jenis ternak dapat didatangkan dari luar daerah akibat kendala regulasi lalu lintas ternak SDM peternak dengan mentalitas ketergantungan bantuan.
3. Minimnya pengawasan pemasukan dan pengeluaran ternak hidup.

Adapun program yang mendukung dalam meningkatkan sumber daya peternakan di Kabupaten Banggai:

1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
 - a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - b. Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kab/Kota.
 - c. Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer
 - d. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota lain
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - a. Pengembangan prasarana pertanian.
 - b. Pembangunan prasarana pertanian.
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kab/Kota.
 - b. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kab/Kota.
 - c. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kab/Kota.
 - d. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner.
4. Program Perizinan Usaha Pertanian
 - a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kab/kota.
5. Program Penyuluhan Pertanian
 - a. Pelaksanaan penyuluhan pertanian.

Dengan adanya capaian yang dilakukan tersebut, sektor peternakan di Kabupaten Banggai diharapkan dapat:

1. Meningkatkan populasi dan produksi ternak, sehingga berkontribusi lebih besar terhadap PDRB daerah.

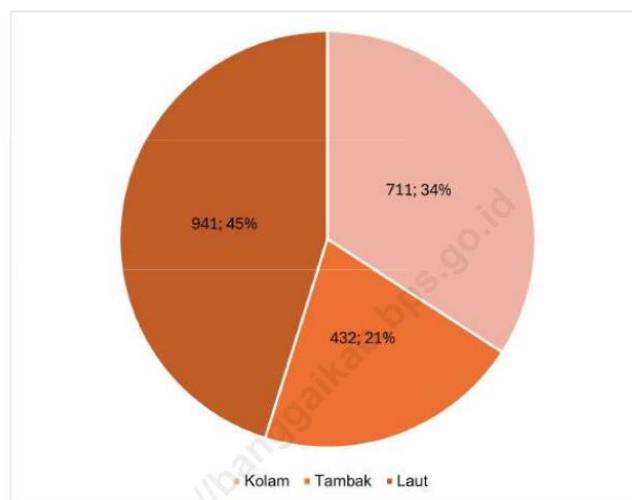
2. Menekan angka kematian ternak akibat penyakit dan faktor lingkungan, sehingga meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil ternak.
3. Meningkatkan kesejahteraan peternak melalui pendampingan usaha, pelatihan, dan akses pasar yang lebih luas.
4. Memastikan keberlanjutan usaha peternakan, baik untuk skala kecil maupun besar, dengan penerapan regulasi dan standar peternakan yang lebih baik.

Dengan berjalannya program-program ini, diharapkan Kabupaten Banggai dapat menjadi pusat peternakan yang maju dan mandiri, serta memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Kabupaten Banggai.

Perikanan

Jenis-jenis ikan yang sebagian besar diusahakan perikanan tangkap di kabupaten Banggai adalah cakalang, tongkol, tuna dan udang. Untuk perikanan budidaya dibagi menjadi jaringan apung laut, jaring apung tawar, jaring tangkap tawar, keramba, kolam air deras, kolam air tenang, minapadi sawah, rumput laut, tambak intensif, tambak sederhana, dan tambak semi intensi.

Gambar 3.4
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Pembudidaya di Kabupaten Banggai (%)
Tahun 2025



Sumber: BPS, Banggai Dalam Angka 2026

Sektor perikanan merupakan salah satu potensi sumber daya yang memberikan dampak signifikan pada perekonomian Kabupaten Banggai. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dengan senantiasa memberikan dukungan dalam mengoptimalkan potensi sektor perikanan melalui berbagai program dan inovasi dengan tetap mengindahkan aspek berkelanjutan bagi generasi mendatang. Selain itu Wilayah kabupaten Banggai

memiliki perairan yang sangat luas, serta memiliki jumlah nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan yang cukup besar, sehingga Kabupaten Banggai bisa menghasilkan produk perikanan yang melimpah serta memiliki nilai jual di pasar internasional.

Kontribusi sektor perikanan dapat diperoleh dari kontribusi jumlah rumah tangga perikanan tangkap, jumlah rumah tangga perikanan budidaya, budidaya perikanan tambak.

Tabel. 3.49
Jumlah Produksi olahan hasil perikanan, perikanan tangkap, perikanan budidaya Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	2025
1	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan	Ton	17.800
3	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	28.685
4	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	6.619

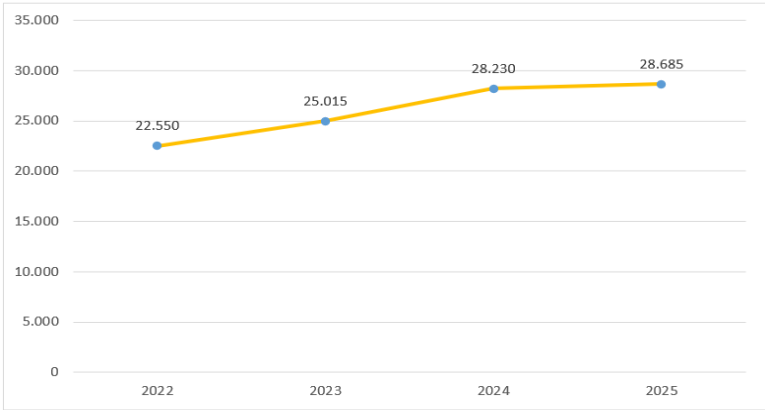
Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Banggai, 2025

a. Perikanan Tangkap

Perikanan tangkap merupakan indikator penting dalam mengukur produksi perikanan.

Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Banggai mencapai 28.685 ton berdasarkan wilayah penangkapan ikan. Pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk menyediakan fasilitas yang memadai. Meski hasil tangkapan ikan cukup besar, beberapa fasilitas pendukung masih kurang memadai. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dan penyediaan fasilitas yang layak agar sektor perikanan dapat berkembang secara optimal. Adapun perkembangan produksi perikanan tangkap dari tahun 2022 – tahun 2025 sebagai berikut:

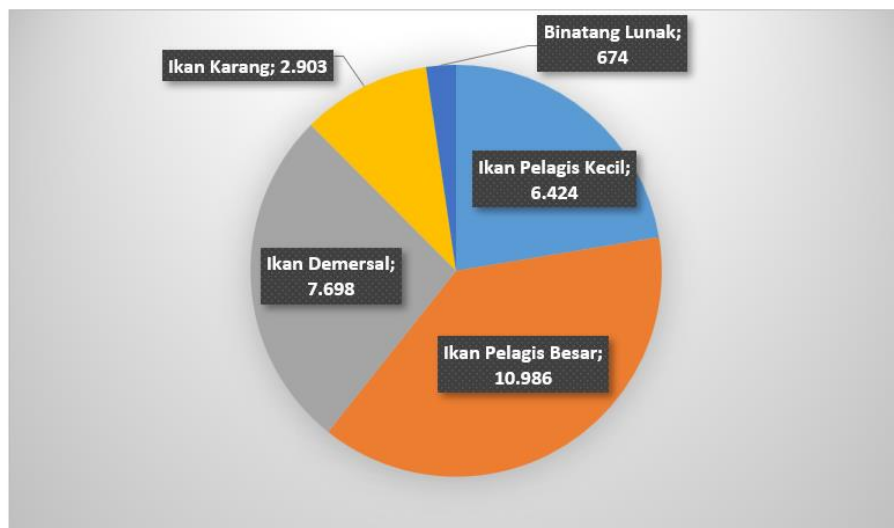
Grafik 3.21
Produksi Perikanan Tangkap (ton/tahun) Tahun 2022 – 2025



Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Banggai, 2025

Berdasarkan data produksi perikanan tangkap selama 4 tahun terakhir, peningkatan produksi perikanan tidak lepas dari kontribusi Pemerintah Kabupaten Banggai dalam bentuk bantuan yang diberikan kepada nelayan berupa sarana dan prasarana perikanan tangkap seperti perahu fiber, alat penangkapan ikan, mesin pendukung untuk penangkapan ikan, pelatihan peningkatan SDM nelayan.

Gambar 3.5
Produksi Perikanan Menurut Jenis Ikan (ton), 2025



Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Banggai, 2025

Produksi perikanan menurut jenis ikan meliputi Ikan Pelagis Kecil Ikan Pelagis Besar, Ikan Demersal, Ikan Karang, dan Binatang Lunak. Produksi ikan pelagis besar menjadi yang terbesar di Kabupaten Banggai. Jenis-jenis ikan seperti tuna, tenggiri, tongkol, cakalang, lamadang, dan layaran banyak ditemukan di perairan wilayah penangkapan ikan di daerah ini. Ikan pelagis besar umumnya memiliki nilai ekonomi tinggi dan memainkan peran penting dalam industri perikanan, sedangkan Binatang Lunak seperti Cumi – cumi, Sotong, gurita memiliki produksi paling rendah di karenakan hidup di habitat tertentu tidak begitu tersebar luas, Penangkapan binatang lunak sering kali memerlukan teknik dan alat khusus yang berbeda dari penangkapan ikan. Ini dapat membatasi jumlah tangkapan ikan, serta Siklus hidup dan reproduksi binatang lunak mungkin lebih lambat dibandingkan ikan, sehingga populasi mereka tidak bertambah secepat ikan.

Peningkatan ini menunjukkan efektivitas program bantuan yang diberikan pemerintah dan kontribusi positif terhadap kesejahteraan nelayan serta keberlanjutan industri perikanan di Kabupaten Banggai. Beberapa faktor yang mendukung tercapainya produksi perikanan tangkap yaitu:

1. Kondisi sumber daya ikan yang relatif stabil

2. Peningkatan sarana dan prasarana penangkapan bantuan alat tangkap, perahu, dan mesin kepada nelayan meningkatkan kapasitas produksi.
3. Akses pasar yang cukup baik permintaan ikan yang stabil mendorong nelayan lebih aktif melaut.
4. Dukungan program pemerintah daerah dan pusat Sinkronisasi program (bantuan, pemberdayaan) berdampak langsung pada produksi.
5. Dukungan program pemerintah daerah dan pusat Sinkronisasi program (bantuan, pemberdayaan, BBM subsidi) berdampak langsung pada produksi.

Meskipun produksi perikanan tangkap mengalami kenaikan, masih ada beberapa masalah yang dihadapi oleh nelayan kecil maupun besar, antara lain:

1. Keterbatasan BBM bagi nelayan dikarenakan tingginya biaya operasional BBM.
2. Fluktuasi cuaca ekstrem pada periode tertentu, gelombang tinggi dan angin kencang menyebabkan nelayan tidak dapat melaut secara optimal.
3. Keterbatasan sarana tangkap modern sebagian nelayan masih menggunakan alat tangkap tradisional.
4. Pemanfaatan bantuan yang belum maksimal
5. Harga ikan yang fluktuatif, ketidakstabilan harga
6. Akses permodalan nelayan masih terbatas, nelayan kecil kesulitan meningkatkan skala usaha

b. Produksi Perikanan Budidaya

Perikanan budidaya merupakan indikator penting dalam mengukur produksi perikanan. Hasil Budidaya ikan di Kabupaten Banggai terus meningkat dari tahun 2021 hingga tahun 2025. Dengan Jumlah RTP Pembudidaya dan Pembudidaya ikan sebagai berikut:

Tabel 3.50
Jumlah Rumah Tangga Pembudidaya dan Pembudidaya Ikan

Jenis Pembudidaya Ikan	Jumlah RTP	Jumlah PI
Tambak Brakkiswater pond	47	56
Tambak Intensif	20	48
Budidaya RL. Cottoni	39	69
Budidaya RL. Spinosum	41	47
Budidaya JA. Laut	1	2
Kolam Freshwater pond	678	1.119
Karamba Crage	1	4

Budidaya Mina Padi	-	
Lainnya	-	
Jumlah	827	1.345

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Banggai, 2025

Tabel 3.51
Jumlah RTP Menurut Kategori Teknologi yang digunakan

Jenis Pembudidaya Ikan	Jumlah RTP	Semi Intensif	Tradisional (Sederhana)	Luas Areal Pemeliharaan (M ²)
Tambak Brakkiswater pond	47			680
Tambak Intensif	20			800
Budidaya RL. Cottoni	39			43
Budidaya RL. Spinosum	41			60
Budidaya JA. Laut	1			5
Kolam Freshwater pond	678			87,5
Karamba Crage	1			2
Lainnya				
Jumlah	827			1.677,5

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Banggai, 2025

Tabel 3.52
Produksi Perikanan Budidaya

Jenis Ikan	Jumlah Produksi (Ton)	Laut	Tambak Tradisional	Tambak Intensive	Kolam	Keramba	Jr. Apung	Sawah
Nila	16,25				16,25			
Mujair	2,918				2,918			
Ikan Mas	4,26				4,26			
Ikan Lele	75,315				75,315			
Gurame	1,24				1,24			
Belut	0,805				0,805			
Patin								
Gabus	0,748				0,748			
Kuwe	40,8	40,8						
Kerapu								
Bandeng	4,45		4,45					
Udang Vaname	6.434		300,08	6,134				

Rumput Laut	37,92	37,92						
Jumlah	6.619	78	304,53	6.134	101,536			

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Banggai, 2025

Meskipun ada peningkatan, persentase kenaikan ini lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan pada tahun sebelumnya yang mencapai 14,92%. Penurunan laju peningkatan produksi ini disebabkan oleh turunnya produksi budidaya rumput laut. Penurunan ini terjadi karena harga jual rumput laut mengalami fluktuasi dibandingkan dengan biaya operasional yang dikeluarkan. Akibatnya, banyak pembudidaya rumput laut yang beralih ke budidaya jenis ikan lainnya.

Distribusi Produksi Berdasarkan Lingkungan total produksi semua jenis ikan dan hasil laut 6.619 ton:

1. Lingkungan Laut: Total produksi di lingkungan laut adalah 78 ton, yang sepenuhnya terdiri dari rumput laut dan kuwe.
2. Tambak: Total produksi di tambak mencapai 6.438,45 ton, dengan kontribusi terbesar dari udang (6.434 ton) dan bandeng (4,45 ton).
3. Kolam: Produksi di kolam mencapai 101,536 ton, dengan jenis ikan terbanyak adalah ikan lele (75,315 ton), disusul nila (16,25 ton).

Tabel 3.53
Pembenihan Perikanan Tahun 2025

Jenis Pembenihan	Luas/Area (m ²)	Produksi/Siklus (ekor)
Nila, Mas, Koi, Udang, Lele	87,5	1.238.100
Bandeng	680	166.100
Jumlah	767,5	1.404.200

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Banggai, 2025

Program bantuan dari Pemerintah Kabupaten Banggai yaitu Program "Satu Juta Satu Pekarangan" menyediakan bantuan sarana prasarana budidaya, pakan ikan, dan benih ikan lele. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan Cetak kolam ikan, kolam bioflok, serta pelatihan peningkatan sumber daya manusia (SDM) bagi para pembudidaya ikan. Penyuluh perikanan juga berperan aktif dalam mendampingi pembudidaya ikan untuk mengembangkan usaha mereka.

Dalam peningkatan produksi perikanan budidaya, terdapat faktor pendukung, meliputi :

1. Ketersediaan lahan budidaya yang cukup potensial sehingga pemanfaatan kolam, tambak, dan perairan umum berjalan optimal.
2. Dukungan sarana dan prasarana budidaya bantuan benih, pakan, dan sarana produksi meningkatkan produktivitas pembudidaya.
3. Peningkatan kapasitas pembudidaya ikan melalui pelatihan dan pendampingan teknis budidaya.
4. Penerapan teknologi budidaya yang semakin baik seperti manajemen pakan, dan pengendalian kualitas air.
5. Peningkatan aktivitas pembudidaya.
6. Dukungan program pemerintah pusat dan daerah termasuk program ketahanan pangan dan peningkatan konsumsi ikan

Namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh para pembudidaya ikan, berperan penting dalam peningkatan produksi perikanan, antara lain:

1. Harga pakan yang relatif tinggi menjadi beban utama biaya produksi pembudidaya.
2. Serangan penyakit ikan menyebabkan potensi penurunan produksi dan kerugian usaha.
3. Keterbatasan akses permodalan pembudidaya kesulitan mengembangkan skala usaha.
4. Fluktuasi harga jual hasil budidaya berdampak pada keberlanjutan usaha.
5. Pemanfaatan bantuan yang belum maksimal.
6. Kualitas benih yang belum merata mempengaruhi tingkat kelangsungan hidup ikan.
7. Belum optimalnya sistem pemasaran dan distribusi terutama di wilayah terpencil.

c. Volume Produksi Pengolahan Hasil Perikanan

Produk Pengolahan Hasil Perikanan adalah indikator pengukur keberhasilan sasaran dinas perikanan dalam meningkatkan Nilai Tambah Hasil Perikanan. Peningkatan pengolahan hasil perikanan di dukung beberapa perusahaan yang Sertifikasi SJMKHP/HACCP dan beberapa UMKM dan POKLAHSAR di pengolahan hasil perikanan.

Tabel 3.54
UPI Sertifikasi SJMKHP/HACCP

No	Nama Perusahaan UPI	Jenis Produk	Grade
1.	CV. Indotropic Fishery	Frozen Cephalopods Frozen Demersal Fish Frozen Tuna	A
2.	PT. Kelola Mina Laut	Frozen Cephalopods Fish Frozen Tuna	A
3.	PT. Inti Jaya Bahari	Frozen Pelagic Fish	A

Sumber data : Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu KKP

Tiga Perusahaan UPI serta enam belas Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR) berperan penting dalam peningkatan hasil olahan perikanan di Kabupaten Banggai. Beberapa jenis produk hasil olahan ini bahkan menjadi oleh-oleh khas daerah. Produk-produk ini meliputi berbagai macam olahan ikan, seperti ikan asin, abon ikan, kerupuk ikan, dan berbagai produk olahan lainnya yang memiliki cita rasa khas dan kualitas tinggi. Hasil olahan perikanan ini tidak hanya dipasarkan secara lokal, tetapi juga memiliki potensi besar untuk diekspor. Kabupaten Banggai telah mulai mengeksport produk olahan perikanan ke berbagai negara, meningkatkan pendapatan daerah serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Ekspor produk olahan perikanan ini diharapkan dapat terus meningkat seiring dengan peningkatan kualitas dan produksi yang berkelanjutan

Tabel 3.55
UMKM dan POKLAHSAR

No	Nama UMKM dan POKLAHSAR	Jenis Produk Olahan
1.	Anumami	Abon Ikan, Sambal Cakalang Fufu
2.	Mama Gilang	Kripik Ikan
3.	Kelola Beppa	Abon Ikan
4.	Baronang Food	Stik Ikan
5.	Wanita Mandiri	Abon Ikan, Bade'o
6.	Sintuvu Singkeni	Abon Ikan
7.	Candana	Bade'o Ikan
8.	Mario Pulana	Bakso Ikan, Mpek-Mpek, Nugget
9.	Rufyka	Bajabu Ikan Malalugis

10.	As-Syifa	Abon Ikan Cakalang, Suwir-suwir Ikan Malalugis, Sambal Ikan Roa
11.	Bilijo- Disini	Ikan Suwir Alus Tore
12.	Aulia Food	Abon Ikan Tuna, abon Ikan Tengiri, Abon Ikan Cakalang Fufu, Bajabu
13.	Pore Tuu	Abon Ikan
14.	Syb	Keripik Rumput Laut, Sambal Ikan Roa, Sambal Ikan teri, Sambal Ikan Asin, Sambal Ikan Tuna
15.	Matami	Abon Tuna, Abon Ikan Asin, Abon Ikan Roa, Sambal Roa Pedas, Sambal Roa Ori, Sambal Ikan Asin
16.	Mom's Najwa	Keripik Ikan

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Banggai, 2025

Tabel 3.56
Data Ekspor Upi Tahun 2025

DATA EKSPOR PER KOMODITAS STASIUN PPMHKP LUWUK BANGGAI TAHUN 2025				
Nama UPI	Negara	Komoditas	Total Nilai (Rp)	Total Berat Bersih (KGM)
CV. INDOTROPIC FISHERY	Australia	Lutjanus sebae	45.562.500	250
		Pristipomoides Multidens	45.375.000	275
		Gymnocranius Grandoculis	112.297.500	805
		Scarus Ghobban	232.987.500	1.635
		Octopus Vulgaris	1.507.912.500	14.990
	USA	Octopus Vulgaris	1.655.775.000	17.883
	Vietnam	Octopus Vulgaris	1.405.845.000	22.650
	Japan	Octopus Cyanea	2.056.488.750	16.926
		Sepia SPP	1.024.500	14
		Octopus Vulgaris	471.654.000	4.946
	Mexico	Octopus Vulgaris	8.034.755.550	84.597

Sumber data : Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu KKP

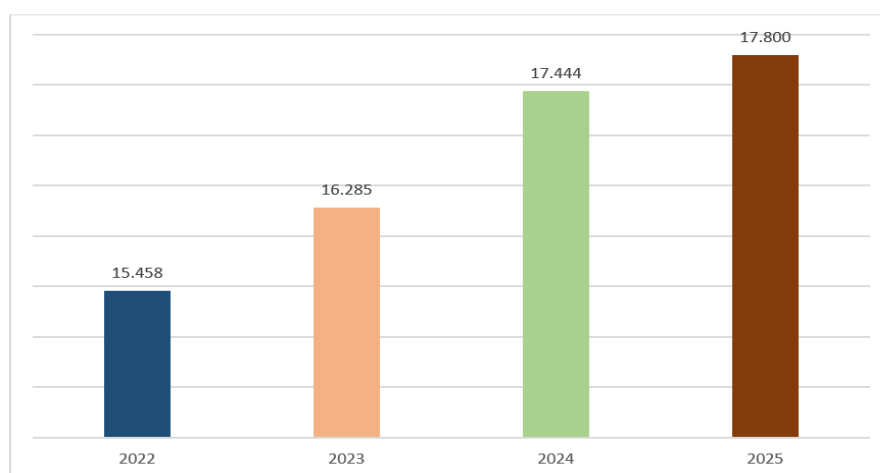
Pada tahun 2025, Kabupaten Banggai menunjukkan kinerja yang signifikan dalam sektor ekspor hasil perikanan. Pencapaian ekspor ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Banggai. Permintaan yang tinggi dari pasar internasional mendorong peningkatan produksi dan pengolahan perikanan. Selain itu, kualitas produk yang memenuhi standar ekspor internasional turut berperan dalam meningkatkan reputasi hasil perikanan Kabupaten Banggai di pasar global.

Dukungan pemerintah melalui program-program peningkatan kapasitas, pelatihan, dan penyediaan sarana prasarana juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan sektor perikanan. Kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan UMK/POKLAHSAR membantu menciptakan produk-produk olahan perikanan yang berkualitas tinggi dan memiliki nilai tambah. Beberapa jenis produk

olahan ini bahkan telah menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banggai, menarik minat wisatawan dan meningkatkan pendapatan daerah.

Dengan adanya peningkatan hasil ekspor dan pengolahan perikanan, Kabupaten Banggai diharapkan dapat terus mengembangkan sektor perikanan ini dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dukungan pemerintah dalam bentuk pelatihan, fasilitas, dan akses pasar juga berperan penting dalam mendorong sektor olahan perikanan untuk mencapai pasar internasional. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan UMK, sektor olahan perikanan di Kabupaten Banggai diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah.

Grafik 3.22
Pertumbuhan produksi Pengolahan Hasil Perikanan



Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Banggai, 2025

Peningkatan jumlah produksi pengolahan hasil perikanan ini disebabkan oleh tumbuhnya kebutuhan ikan segar oleh industri pengolahan hasil perikanan, UMKM pengolahan hasil perikanan, serta kelompok Pengolahan Hasil Perikanan. Faktor-faktor tersebut berkontribusi pada peningkatan jumlah produksi pengolahan hasil perikanan dari tahun sebelumnya.

Para pelaku usaha di sektor ini masih menghadapi sejumlah permasalahan yang menghambat optimasi hasil dan keberlanjutan usaha mereka dalam produksi pengolahan hasil perikanan, antara lain:

1. Harga bahan baku, seperti ikan segar dan bahan pengolahan lainnya, mengalami fluktuasi yang menyebabkan ketidakstabilan biaya produksi.

2. Biaya produksi yang tinggi, termasuk tenaga kerja, listrik, dan peralatan, sering kali tidak sebanding dengan harga jual produk olahan.
3. Kurangnya akses terhadap teknologi pengolahan yang modern dan efisien
4. Menjaga kualitas produk olahan perikanan tetap konsisten
5. Terbatasnya pemasaran dan akses pasar produk olahan
6. Adanya Persaingan Pasar, dikarenakan sebagian besar hasil produksi masih dijual dalam bentuk segar.
7. Kesulitan dalam mendapatkan modal untuk investasi dalam peralatan, teknologi, dan pengembangan usaha, terutama bagi UMK dan POKLAHSAR.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan Peningkatan Produksi Perikanan yaitu sebagai berikut :

1. Pemberiaan bantuan alat penangkapan ikan oleh dinas perikanan.
2. Peningkatan Kapasitas Nelayan dengan di adakanya Pelatihan kecakapan nelayan
3. Pemberian bantuan Armada Penangkapan Ikan Oleh Pemerintah melalui Dinas Perikanan Kabupaten Banggai.
4. Pemberian Mesin Penangkapan Ikan bagi nelayan
5. Pemberian sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan melalui Program satu juta satu pekarangan
6. Penerapan cara Budidaya Ikan baik dan Benar (CBIB) dikalangan Pembudidaya ikan
7. Penggunaan benih ikan unggul yang berkualitas, dimana benih ikan unggul sangat berpengaruh pada proses Produksi Perikanan

Pertambangan

Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, di bawah permukaan bumi, dan di bawah permukaan air. Kawasan pertambangan di Kabupaten Banggai diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan mineral dan batubara serta minyak dan gas bumi. Kawasan pertambangan mineral dan batubara diarahkan (sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan/IUP pada Kecamatan Nuhon, Bunta, Pagimana, Bualemo, Balantak, Balantak Utara, Masama, Toili dan Toili Barat. Kawasan pertambangan gas alam dialokasikan di daerah Batui, sedang pertambangan yang lain berlokasi di kawasan yang memiliki bahan mineral yang potensial. Untuk kegiatan eksplorasi gas

alam sendiri yang berlokasi di Batui, Toili dan Toili Barat. Potensi pertambangan kabupaten banggai cukup luas dimana Daerah Penghasil Tambang antara lain:

1. Tambang Nikel berada di Kecamatan Bunta, Desa Siuna Kecamatan Pagimana, Kecamatan Masama
2. Pasir Batu berada di Kecamatan Balantak Utara dan Luwuk Timur
3. Batugamping berada di Kecamatan Luwuk Timur, Masama, Lamala dan Balantak (belum produksi).

Kendala-kendala yang dihadapi terkait sektor pertambangan antara lain:

1. Kewenangan Pertambangan ada di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi namun lokasi tambang berada di Kabupaten. Termasuk kewenangan pengawasan tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kabupaten hanya dapat melaksanakan fasilitasi dan mediasi saat terjadi permasalahan pertambangan
2. Sengketa lahan masyarakat dalam areal Izin Usaha Pertambangan
3. Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan

Berikut adalah solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai untuk mengatasi kendala dalam sektor pertambangan:

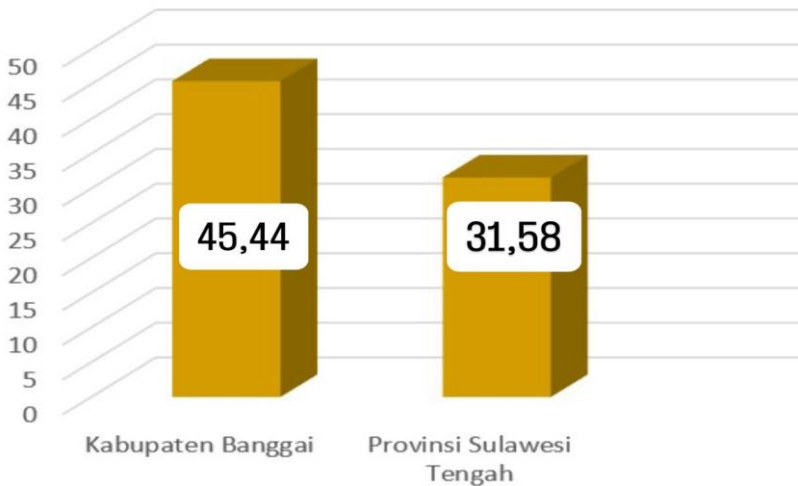
1. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk memastikan pengawasan berjalan optimal serta mendorong peran masyarakat dan media dalam pengawasan independen dengan menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses.
2. Memfasilitasi mediasi antara masyarakat dan perusahaan tambang dengan melibatkan pemerintah provinsi, lembaga adat, dan pihak berwenang lainnya serta meningkatkan transparansi perizinan dengan menyediakan data publik terkait status kepemilikan lahan dan izin usaha pertambangan.
3. Menyusun kebijakan perlindungan lingkungan dengan mengacu pada regulasi pusat dan provinsi.
4. Mendorong perusahaan tambang untuk menjalankan reklamasi pascatambang melalui mekanisme insentif dan sanksi.
5. Menyediakan pendampingan bagi masyarakat dalam proses negosiasi agar hak mereka tetap terlindungi.
6. Membuat kebijakan daerah yang mengatur CSR agar lebih transparan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mengawasi pelaksanaan CSR dengan

membentuk forum masyarakat yang dilibatkan dalam perencanaan dan evaluasi program serta memastikan CSR berdampak nyata melalui program berkelanjutan di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur masyarakat sekitar tambang.

Tabel 3.57
Perbandingan realisasi indikator kinerja tahun 2025 dengan target Akhir RPJMD 2021-2026

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Target Akhir RPJMD 2026	Capaian (%)
Kontribusi Sektor Pertanian, perikanan dan pertambangan terhadap PDRB	%	45,44	35,99	126,26

Grafik 3.23
Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan, dan Pertambangan Terhadap PDRB di Kabupaten Banggai dengan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Kabupaten Banggai memiliki ketergantungan yang lebih tinggi pada sektor pertanian, perikanan, dan pertambangan dibandingkan Provinsi Sulawesi Tengah secara keseluruhan. Struktur ekonomi yang berbeda menyebabkan kontribusi sektor ini lebih besar di Banggai dibandingkan rata-rata provinsi.

2. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan indeks komposit yang mengukur ketahanan dan kerentanan pangan wilayah dari 3 (tiga) aspek, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang digunakan dalam penyusunan FSVA.

IKP memiliki peran yang sangat strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah, dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah dan prioritas intervensi program.

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai pada tahun 2025 memperoleh nilai indeks sebesar 76,35. Adapun Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai berdasarkan oleh 3 (tiga) aspek yaitu aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan, sebagai berikut:

Tabel 3.58
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Berdasarkan
Aspek Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Pemanfaatan

Indeks Ketersediaan	Indeks Keterjangkauan	Indeks Pemanfaatan	Indeks Komposit	Peringkat
73,79	82,15	73,19	76,35	134

Aspek Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan, untuk itu diperlukan informasi mengenai situasi pangan disuatu negara/daerah pada periode tertentu. Informasi mengenai situasi penyediaan pangan secara menyeluruh disuatu negara/wilayah digambarkan melalui Neraca Bahan Makanan (*Food Balance Sheet*), yang sekaligus menjadi salah satu Indikator Tersedianya Pangan dalam jumlah yang cukup.

Kabupaten Banggai mengoptimalkan potensi sumber daya alam, khususnya komoditas pertanian dan kelapa, mencakup peningkatan produksi pangan pokok (beras, jagung) dan diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis sumber pangan.

Pola Pangan Harapan Ketersediaan Kabupaten Banggai Tahun 2025 berdasarkan hasil penghitungan Neraca Bahan Makanan dan perbandingannya dengan skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan Nasional sebagai berikut:

Tabel 3.59
Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Kabupaten Banggai
Tahun 2025

Kelompok Bahan Pangan	Skor PPH Kab.Banggai	Skor PPH Maksimal
Padi-Padian	25,0	25,0
Umbi-Umbian	1.70	2,5
Pangan Hewani	19.28	24,0
Minyak dan Lemak	5,0	5,0
Buah/Biji berminyak	7.9	1,0
Kacang-Kacangan	5.15	10,0
Gula	1,88	2,5
Sayuran dan Buah	30,0	30,0
Jumlah	95.91	100,0

Sumber : Neraca Bahan Makanan Dinas Ketahanan Pangan Kab.Banggai, 2025

Berdasarkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2025, aspek ketersediaan pangan Kabupaten Banggai mencapai nilai 95,91 dari skor maksimal 100,00. Capaian ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan secara umum sudah sangat baik dan mendekati kondisi ideal. Kelompok padi-padian, minyak dan lemak, serta sayuran dan buah telah mencapai skor maksimal, sementara kelompok pangan hewani, kacang-kacangan, dan umbi-umbian masih memerlukan penguatan untuk meningkatkan keseimbangan komposisi pangan. Untuk mencapai skor maksimal, diperlukan intervensi atau strategi pengelolaan yang lebih baik, seperti perbaikan teknologi pertanian, kebijakan pengembangan sektor tertentu, atau peningkatan infrastruktur pendukung.

Perbandingan antara angka kecukupan energi dan protein Kabupaten Banggai dengan standar nasional sebagai berikut:

Tabel 3.60
Angka Kecukupan Energi dan Protein Kabupaten Banggai
Tahun 2025

Ketersediaan	Tahun 2025	Nasional
Energi (kkal/kapita/hari)	2.009	2.100
Protein (gram/kapita/hari)	61,50	57

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab.Banggai, 2025

Ketersediaan protein di Kabupaten Banggai tahun 2025 telah melampaui standar nasional, menunjukkan kondisi yang baik dari sisi pemenuhan gizi. Namun, ketersediaan energi masih sedikit di bawah standar nasional sehingga perlu

penguatan, terutama melalui peningkatan produksi dan distribusi pangan sumber energi.

Tabel 3.61
Cadangan Pangan Kabupaten Banggai
Tahun 2025

Uraian	Kabupaten Banggai	Permentan No.11 tahun 2018
Cadangan Pangan Kabupaten	20,00 Ton	110,04 ton

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab.Banggai, 2025

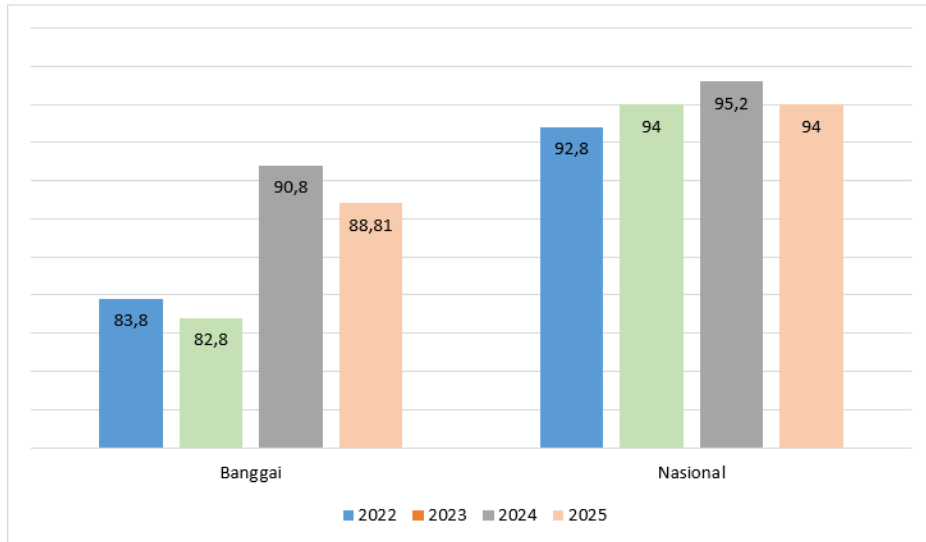
Cadangan pangan merupakan salah satu sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan dalam negeri atau daerah. Stabilitas pasokan pangan dapat dijaga dengan pengelolaan cadangan yang tepat. Cadangan pangan terdiri atas cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan masyarakat diarahkan untuk mengembangkan lumbung pangan masyarakat yang mencakup pembangunan lumbung pangan, pengisian lumbung pangan, dan penguatan modal untuk pengembangan usaha kelompok.

Cadangan Pangan Kabupaten Banggai Tahun 2025 sebesar 20 ton masih belum memenuhi standar minimal 110,04 ton sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2018. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas cadangan pangan pemerintah daerah masih relatif terbatas dibandingkan dengan ketentuan nasional.

Keberadaan dan besaran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) mencerminkan tingkat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi kerentanan pangan transien sebagai dampak dari perubahan iklim serta guncangan sosial ekonomi yang datang secara mendadak. Semakin memadai jumlah cadangan pangan yang dimiliki, semakin kuat pula kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan stabilisasi pasokan dan harga, serta dalam menangani kondisi darurat seperti bencana alam, gagal panen, inflasi pangan, dan gangguan distribusi.

Dengan capaian yang baru sekitar 18,17% dari standar yang dipersyaratkan, maka diperlukan penguatan kebijakan dan peningkatan alokasi cadangan pangan daerah guna mendukung ketahanan pangan Kabupaten Banggai, khususnya pada aspek ketersediaan dan kesiapsiagaan menghadapi risiko kerentanan pangan.

Grafik 3.24
Perbandingan Skor PPH Konsumsi Kabupaten Banggai dengan
Target Nasional. 2022-2025



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab.Banggai, 2025

Skor PPH konsumsi Kabupaten Banggai menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat, meskipun secara umum masih berada di bawah target nasional. Secara keseluruhan, capaian skor PPH konsumsi Kabupaten Banggai menunjukkan adanya upaya perbaikan kualitas dan keragaman konsumsi pangan masyarakat. Namun demikian, masih diperlukan penguatan program diversifikasi pangan, pemanfaatan sumber daya pangan lokal, serta edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) agar kesenjangan dengan target nasional dapat terus diperkecil.

Aspek Keterjangkauan Pangan

Aspek keterjangkauan (akses) pangan didasarkan indikator persentase penduduk dibawah garis kemiskinan, persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran, dan persentase rumah tangga tanpa akses listrik. Indikator ini menunjukkan nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk hidup secara layak. Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak memiliki daya beli yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga akan mempengaruhi ketahanan pangan.

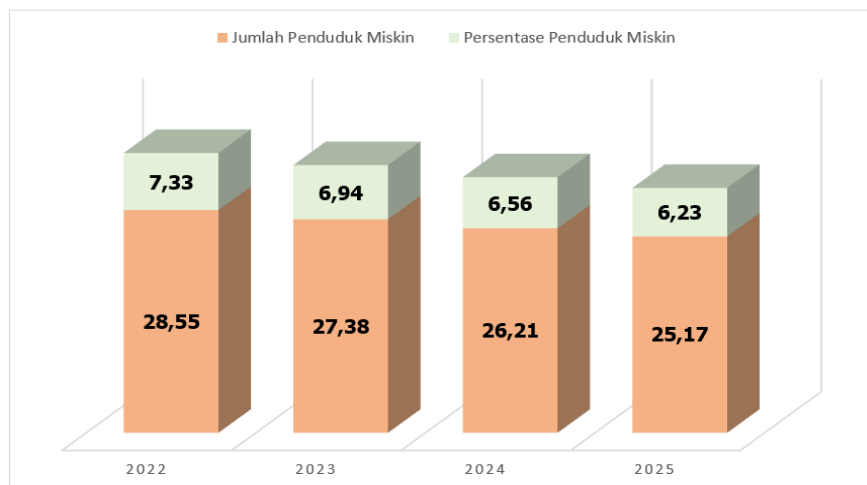
Aspek keterjangkauan (akses) berfokus pada perbaikan distribusi pangan, stabilitas harga pangan pokok. Pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil menjadi kunci untuk memastikan aksesibilitas pangan yang merata.

- Persentase Penduduk dibawah Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Banggai periode Maret 2022 sampai dengan Maret 2025 ditunjukkan oleh Grafik berikut:

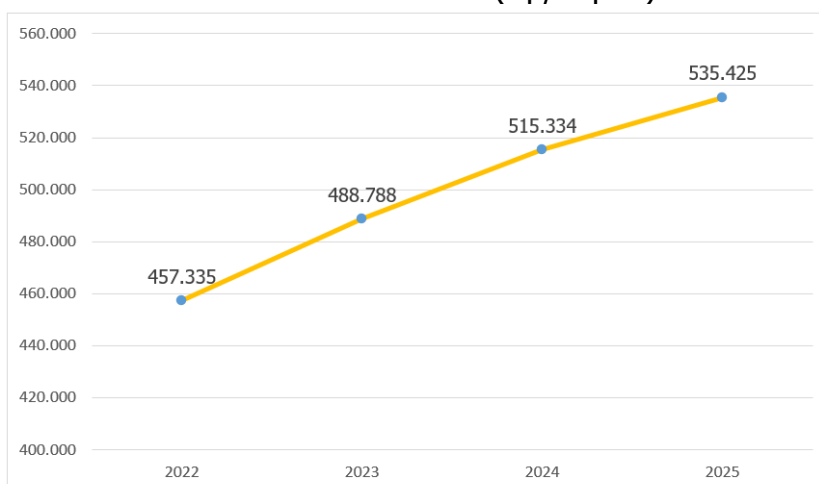
Grafik 3.25
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banggai, 2022-2025



Sumber : BPS Kab.Banggai, 2025

Secara umum, pada periode Maret 2022 sampai dengan Maret 2025 tingkat kemiskinan di Kabupaten Banggai mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Angka kemiskinan yang tinggi dapat menurunkan indeks ketahanan pangan, karena masyarakat yang miskin lebih rentan terhadap masalah keterjangkauan pangan, akses terhadap pangan yang berkualitas, dan stabilitas pangan. Jika pendapatan rendah, masyarakat cenderung hanya mampu membeli makanan yang murah, yang sering kali tidak cukup bergizi. Kualitas pangan menjadi salah satu indikator ketahanan pangan, dan apabila kualitas pangan yang tersedia buruk (misalnya, lebih banyak pangan yang mengandung kalori kosong atau makanan olahan dengan gizi rendah), maka indeks ketahanan pangan akan menurun.

Grafik 3.26
Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Banggai
Tahun 2021—2024 (Rp/Kapita)



Sumber : BPS Kab.Banggai, 2025

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Semakin tinggi garis kemiskinan, maka keterjangkauan pangan akan semakin terbatas. Karena Pangan yang ada di pasar akan semakin sulit dijangkau oleh mereka yang berpendapatan rendah. Keterjangkauan pangan ini menjadi salah satu aspek utama dalam ketahanan pangan, karena tanpa daya beli yang memadai, masyarakat tidak dapat memperoleh pangan yang cukup dan bergizi. Garis kemiskinan di Kabupaten Banggai adalah Rp. 535.425 per bulan, maka setiap rumah tangga yang pengeluarannya per bulan di bawah jumlah tersebut akan dianggap sebagai rumah tangga miskin. Orang atau keluarga yang penghasilannya berada di bawah garis kemiskinan dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, seperti pangan, sandang, dan papan, sehingga mereka tergolong miskin.

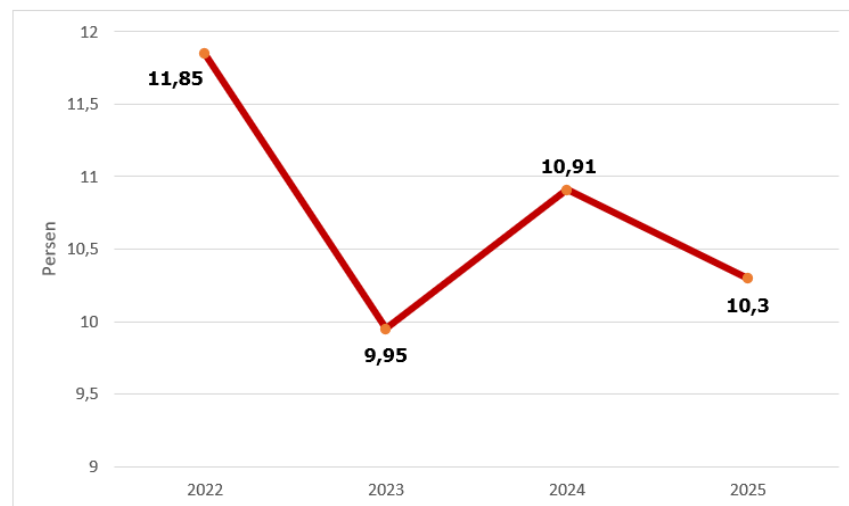
Kesimpulannya adalah Kabupaten Banggai berhasil mengurangi angka kemiskinan, namun kenaikan garis kemiskinan menunjukkan bahwa biaya hidup semakin tinggi. Pemerintah Kabupaten Banggai perlu terus meningkatkan upaya untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok, meningkatkan akses pendidikan, serta menyediakan peluang ekonomi yang lebih baik untuk masyarakat agar mereka bisa keluar dari garis kemiskinan secara berkelanjutan.

- Prevalence Ketidacukupan Pangan (PoU)

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mendefinisikan PoU adalah merupakan suatu kondisi seseorang, secara reguler, mengkonsumsi jumlah makanan yang tidak cukup untuk memenuhi energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat. Berdasarkan data ketersediaan pangan Kabupaten Banggai tahun 2025, ketersediaan energi tercatat sebesar 2.009 kkal per kapita per hari, masih di bawah standar nasional sebesar 2.100 kkal per kapita per hari. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan energi masyarakat belum sepenuhnya mencapai target nasional.

Grafik 3.27

Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan di Kabupaten Banggai, 2022-2025



Sumber : BPS Nasional, 2025

Prevalensi ketidacukupan pangan (PoU) di Kabupaten Banggai pada tahun 2025 sebesar 10,3%. Ini artinya, penduduk di Kabupaten Banggai yang mengkonsumsi makanan, tetapi kebutuhan energinya kurang, tidak sampai 10,3% dari total penduduk. Angka tersebut turun 0,61% dari tahun sebelumnya 10,91%.

Dibanding 12 kabupaten/kota lain di Provinsi Sulawesi Tengah, PoU di Kabupaten Banggai ada di urutan ke-6. Wilayah dengan PoU terendah (urutan teratas) yakni Kota Palu (6,41%) dan tertinggi (urutan terakhir) yakni Kabupaten Banggai Kepulauan (19,4%). Berikut ini daftar PoU terendah di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025:

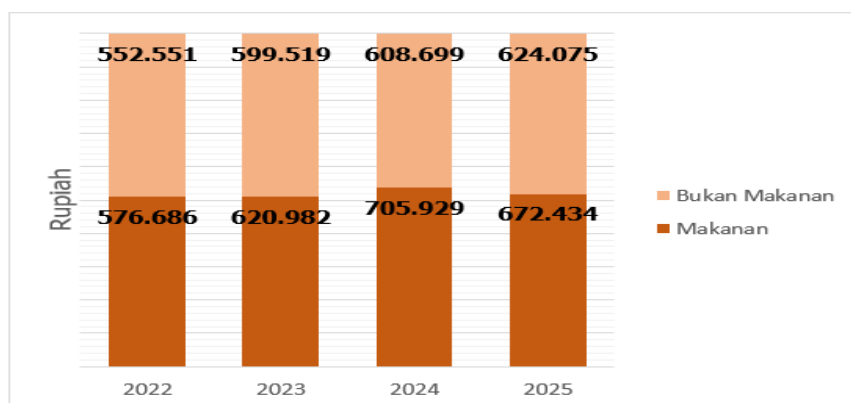
1. Kota Palu: 6,41%
2. Kabupaten Morowali: 6,42%
3. Kabupaten Morowali Utara: 7,4%
4. Kabupaten Poso: 8,37%
5. Kabupaten Parigi Moutong: 9,63%
6. Kabupaten Banggai: 10,3%
7. Kabupaten Buol: 10,33%
8. Kabupaten Tojo Una Una: 12,38%
9. Kabupaten Donggala: 12,44%
10. Kabupaten Sigi: 13,33%
11. Kabupaten Banggai Laut: 16,64%
12. Kabupaten Toli-Toli: 16,83%
13. Kabupaten Banggai Kepulauan: 19,4%

Rata-rata PoU Indonesia sebesar 7,89% pada tahun 2025, berarti PoU di Kabupaten Banggai lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.

- Persentase Rumah Tangga Dengan Proporsi Pengeluaran Untuk Pangan Lebih dari 65% Terhadap Total Pengeluaran

Apabila dilihat menurut jenis pengeluaran, maka akan tampak komposisi pengeluaran yang digunakan untuk komoditas makanan maupun bukan makanan. Pada tahun 2025, pengeluaran makanan sebesar Rp. 672.434 (51,86%), sedangkan bukan makanan sebesar Rp. 624.075 (48,14%). Pengeluaran untuk Makanan yang lebih dari separuh dari total pengeluaran (51,86%) menunjukkan bahwa rumah tangga di Kabupaten Banggai masih mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan pangan. Ini mencerminkan tingkat ketergantungan pada pangan yang cukup tinggi. Pengeluaran untuk bukan makanan yang sebesar 48,14% menunjukkan bahwa meskipun rumah tangga menghabiskan hampir setengah pengeluarannya untuk kebutuhan lain, kebutuhan pangan tetap menjadi prioritas utama. Rumah tangga lebih kesulitan untuk mengalokasikan lebih banyak dana untuk kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, dan investasi, karena sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan.

Grafik 3.28
Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan di Kabupaten Banggai,
2022-2025



Sumber: BPS Prov.Sulteng, 2025

Proporsi pengeluaran yang lebih tinggi untuk pangan bisa juga menjadi tanda bahwa rumah tangga tersebut mungkin menghadapi keterbatasan ekonomi atau keterjangkauan pangan yang rendah, yang sering terjadi pada masyarakat dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi.

Lebih dalam lagi, dari pengeluaran masyarakat berdasarkan daerah tempat tinggal diketahui bahwa rata-rata pengeluaran penduduk di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Perbedaan ini selain karena kemampuan finansial yang berbeda, kebutuhan barang dan jasa lebih banyak tersedia di perkotaan daripada perdesaan, sehingga konsumsi masyarakat di daerah perdesaan lebih terbatas dibandingkan dengan masyarakat di perkotaan.

Dari sisi pola konsumsi, dapat dilihat bahwa rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di perdesaan lebih banyak digunakan untuk kebutuhan makanan, karena penduduk di daerah perdesaan masih terfokus pada pemenuhan kebutuhan makanan daripada bukan makanan. Sebaliknya, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang tinggal di perkotaan cenderung lebih banyak digunakan untuk konsumsi bukan makanan.

Ketersediaan barang dan jasa di perkotaan yang lebih beragam, terutama untuk komoditas bukan makanan, membuat pola konsumsi masyarakat perkotaan terhadap komoditas bukan makanan lebih beragam pula. Kondisi ini sedikit banyak menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat di perkotaan yang lebih tinggi daripada di perdesaan. Hal ini juga menjadi salah satu pendorong penduduk di perdesaan melakukan migrasi ke perkotaan untuk mendapatkan hidup yang lebih sejahtera. Ketimpangan ini perlu terus diminimalisasi dengan cara memperkuat pembangunan di daerah perdesaan, sesuai dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs) yang merupakan salah satu pilar ekonomi, yaitu mengurangi ketimpangan.

- **Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik**

Fasilitas perumahan lainnya yang juga tidak kalah penting yaitu penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah listrik (PLN dan non-PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Pemerintah melalui PLN akan terus berupaya agar ketersediaan listrik dapat menjangkau hingga ke pelosok daerah di seluruh Indonesia.

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Banggai dalam publikasinya di Indikator Kesejahteraan Rakyat tahun 2025, sumber penerangan utama listrik berupa PLN di Kabupaten Banggai tahun 2025 adalah sebesar 99,52 persen, sedangkan sumber penerangan utama lainnya berupa listrik non-PLN atau bukan listrik sebesar 0,48 persen.

Secara umum, tingginya akses listrik di Kabupaten Banggai (99,52%) dapat mendukung peningkatan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) karena meningkatkan kualitas hidup, memperbaiki kondisi ekonomi, dan memperluas akses terhadap informasi dan teknologi yang mendukung ketahanan pangan. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan infrastruktur listrik hingga mencakup seluruh rumah tangga agar dapat mendukung ketahanan pangan yang lebih merata di seluruh Kabupaten Banggai.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dan persentase rumah tangga tanpa akses listrik memiliki hubungan yang erat, karena keduanya berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi dan infrastruktur yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Beberapa aspek yang dapat menjelaskan hubungan ini adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya

Rumah tangga tanpa akses listrik cenderung berada di daerah yang lebih terpencil atau kurang berkembang, yang sering kali juga memiliki ketahanan pangan yang rendah. Di daerah tersebut, infrastruktur yang terbatas bisa mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk memperoleh, menyimpan, dan mengolah pangan dengan baik. Ketidaktersediaan listrik, misalnya, bisa mempersulit penyimpanan makanan yang membutuhkan pendinginan, seperti sayuran atau produk hewani, yang dapat menurunkan kualitas dan keberlanjutan ketahanan pangan.

2. Pengaruh Ekonomi

Keluarga yang tidak memiliki akses listrik sering kali menghadapi tantangan ekonomi yang lebih besar. Ketidakmampuan untuk mengakses layanan dasar seperti listrik bisa menunjukkan bahwa mereka juga memiliki pendapatan yang terbatas. Pendapatan yang rendah biasanya berkorelasi dengan ketahanan pangan yang rendah, karena rumah tangga dengan penghasilan rendah lebih sulit untuk membeli makanan bergizi atau memenuhi kebutuhan pangan yang seimbang.

3. Kualitas Hidup

Ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan jumlah makanan, tetapi juga dengan kualitasnya. Rumah tangga tanpa listrik seringkali kurang memiliki akses ke informasi tentang pola makan yang sehat atau teknologi pertanian yang lebih efisien. Akses ke informasi dan teknologi dapat membantu rumah tangga meningkatkan ketahanan pangan mereka. Ketika ada listrik, rumah tangga bisa memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas pertanian atau mendapatkan informasi yang berguna untuk meningkatkan kualitas hidup dan ketahanan pangan mereka.

Aspek Pemanfaatan Pangan

Aspek Pemanfaatan berkaitan dengan konsumsi pangan yang aman, bergizi, dan beragam. Hal ini ditargetkan untuk menurunkan angka *stunting* dengan memaksimalkan konsumsi pangan lokal yang potensial.

Aspek pemanfaatan pangan didasarkan indikator rata-rata lama sekolah perempuan berusia diatas 15 tahun, persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk, persentase balita stunting, dan angka harapan hidup pada saat lahir.

- **Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses ke Air Bersih**

Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, yaitu persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses ke air minum yang berasal dari air leding/PAM, pompa air, sumur atau mata air yang terlindung dan air hujan (termasuk air kemasan) dengan memperhatikan jarak ke jamban minimal 10 m. Akses terhadap air bersih memegang peranan yang sangat penting untuk pencapaian ketahanan pangan daerah. Dengan akses terhadap air bersih rendah memiliki kejadian malnutrisi yang tinggi. Peningkatan akses terhadap fasilitas sanitasi dan air layak minum sangat penting untuk mengurangi masalah kesehatan khususnya diare, sehingga dapat memperbaiki status gizi melalui peningkatan penyerapan zat-zat gizi oleh tubuh.

Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih tahun 2025, dimana terlihat bahwa dari 107.839 jumlah rumah tangga yang ada di Kabupaten Banggai, ada 8.122 rumah tangga/KK yang belum memiliki akses air ke air bersih (pengelolaan air bersih yang belum layak) atau sekitar 7,5%. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih di Kabupaten Banggai dapat mempengaruhi indeks

ketahanan pangan, terutama pada aspek pemanfaatan pangan, karena dampaknya terhadap kualitas pangan, kesehatan masyarakat, serta kemampuan rumah tangga dalam memanfaatkan pangan yang mereka miliki secara optimal. Upaya untuk meningkatkan akses terhadap air bersih, selain memperbaiki kesehatan masyarakat, juga dapat memperkuat ketahanan pangan dengan meningkatkan pemanfaatan pangan yang lebih bergizi dan aman.

- Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk

Ketersediaan tenaga kesehatan (dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, dan tenaga keteknisian medis) yang cukup di suatu wilayah akan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat yang pada gilirannya dapat menekan penyakit-penyakit infeksi yang berdampak pada masalah gizi, sekaligus mengkampanyekan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk akan mempengaruhi tingkat kerentanan pangan suatu wilayah.

Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk saling berhubungan dan memiliki dampak langsung pada Indeks Ketahanan Pangan (IKP) suatu wilayah. Rasio yang tinggi (lebih banyak penduduk per tenaga kesehatan) akan mengurangi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, yang bisa berdampak pada penurunan kesehatan dan penurunan ketahanan pangan. Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi sering kali memperburuk kondisi tersebut, karena ada lebih banyak orang yang membutuhkan sumber daya terbatas, termasuk tenaga kesehatan dan distribusi pangan.

Tabel 3.62
Rasio Jumlah Penduduk per Tenaga
Kesehatan terhadap Tingkat Kepadatan Penduduk

Tenaga Kesehatan	Jumlah	Rasio Jumlah Penduduk Pertenaga Kesehatan Terhadap Tingkat Kepadatan Penduduk (Rasio Terhadap 100.000 Penduduk)
Dokter Spesialis	35	9,3
Dokter Umum	78	20,7
Dokter gigi dan Dokter Spesialis Gigi	32	8,5
Perawat	873	2,3

Bidan	842	2,2
Tenaga Kesmas	305	80,8
Tenaga Kesling	73	19,3
Tenaga Gizi	62	16,4
Ahli Teknologi Laboratorium Medik	70	18,5
Tenaga Teknik Biomedik Lainnya	16	4,2
Tenaga Keterampilan Fisik	16	4,2
Tenaga Keteknisian Medik	46	12,2
Tenaga Kefarmasian	44	11,7
Tenaga Apoteker	53	14,00
Jumlah	2.545	98,0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Tahun 2025

Apabila dihitung rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk, maka jumlah tenaga kesehatan tersebut masih kurang memadai. Salah satunya dengan jumlah dokter yang masih kurang, sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Banggai sebanyak 382.009 ribu jiwa, berarti 1 (satu) dokter terbebani sekitar tiga ribu lebih penduduk. Beban ini masih terlalu besar sehingga jumlah dokter masih perlu ditambah lagi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di Kabupaten Banggai. Selain itu, jumlah penduduk juga terus meningkat sehingga kebutuhan atas tenaga kesehatan juga akan terus meningkat. Hal yang penting lainnya terkait fasilitas kesehatan yaitu ketersediaan pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak, seperti pelayanan untuk persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang profesional (dokter, bidan dan tenaga kesehatan lainnya). Persalinan yang ditolong oleh tenaga terdidik dan terlatih akan meningkatkan kesehatan dan kelangsungan hidup ibu dan bayi. Dalam hal tenaga persalinan, masyarakat Kabupaten Banggai umumnya sudah memiliki pilihan untuk menggunakan tenaga kesehatan/medis, terutama bidan. Selain bidan, masyarakat yang memilih dokter kandungan dalam hal penolong persalinan juga cukup banyak. Adapun masyarakat yang menggunakan jasa dokter kandungan sebagian besar merupakan masyarakat perkotaan karena akses pelayanan dokter kandungan di perkotaan relatif lebih mudah dibandingkan di perdesaan. Masyarakat perkotaan lebih memilih dokter kandungan karena mempertimbangkan pengetahuan kesehatan dokter kandungan yang lebih terpercaya.

▪ Persentase Balita Stunting

Balita stunting adalah anak di bawah lima tahun yang tinggi badannya kurang dari -2 Standar Deviasi (-2 SD) dengan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U)

dari referensi khusus untuk tinggi badan terhadap usia dan jenis kelamin. Di mana kondisi anak mengalami gagal tumbuh yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih rendah dibandingkan dengan usia mereka, yang disebabkan oleh kekurangan gizi dalam periode 1.000 hari pertama kehidupan (sejak kehamilan hingga usia dua tahun). Jika ketersediaan pangan di suatu wilayah rendah, maka pasokan pangan bergizi untuk balita menjadi terbatas. Kondisi ini meningkatkan risiko kekurangan gizi pada balita, yang dapat menyebabkan stunting. Penelitian menunjukkan bahwa ketahanan pangan rumah tangga yang buruk berhubungan dengan tingginya prevalensi stunting pada balita.

Tabel 3.63
Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks BB/U, TB/U dan BB/TB Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Banggai Tahun 2025

NO	Kabupaten/Kota	PUSKESMAS	JUMLAH BALITA YANG DIUKUR TINGGI BADAN	BALITA PENDEK	
				JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1	Nuhon	Nuhon	487	50	10,3
		Saiti	561	74	13,2
2	Simpang Raya	Simpang Raya	577	40	6,9
3	Bunta	Bunta	830	55	6,6
		Toima	220	9	4,1
4	Lobu	Lobu	184	8	4,3
5	Pagimana	Pagimana	1.038	85	8,2
6	Bualemo	Bualemo	769	80	10,4
		Tikupon	185	24	13,0
7	Balantak Utara	Teku	358	19	5,3
8	Balantak	Balantak	299	77	25,8
9	Balantak Selatan	Tongke	275	22	8,0
10	Mantok	Mantok	415	46	11,1
11	Lamala	Bonebobakal	405	65	16,0
12	Masama	Tangeban	666	49	7,4
13	Luwuk Timur	Hunduhon	605	91	15,0
14	Luwuk Utara	Biak	864	64	7,4
15	Luwuk	Kampung Baru	1.369	36	2,6
16	Luwuk Selatan	Luwuk	1.520	68	4,5
17	Nambo	Nambo	489	45	9,2
18	Kintom	Kintom	582	50	8,6
19	Batui	Batui	1.169	33	2,8
20	Batui Selatan	Sinorang	1.016	56	5,5
21	Toili I	Toili I	1.094	125	11,4
22	Toili II	Toili II	1.882	192	10,2
23	Toili III	Toili III	1.731	178	10,3
JUMLAH (KAB/KOTA)			19.590	1.641	8,4

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, 2025

Faktor-faktor yang mempengaruhi stunting antara lain adalah tidak hanya disebabkan oleh gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil atau anak balita, namun terdapat beberapa faktor yang paling berpengaruh terjadinya stunting di antaranya :

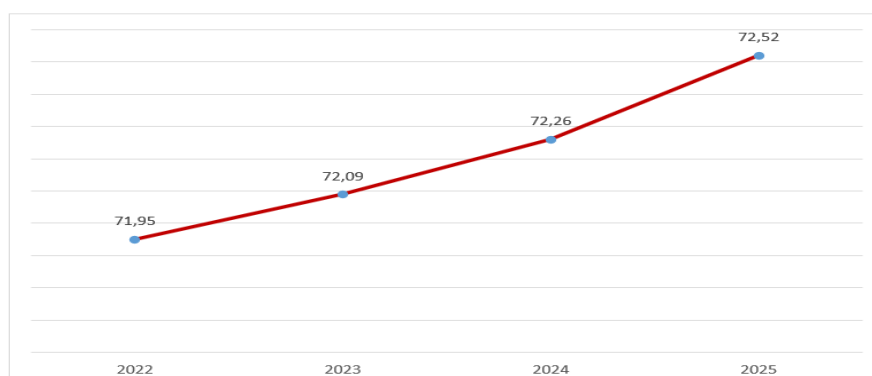
Pertama, praktik pengasuhan yang tidak baik terhadap balita dan anak. Hal ini biasanya disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang gizi pada pra kehamilan, masa kehamilan dan setelah melahirkan, dari para orang tua. Pentingnya

ASI adalah contoh sederhananya. Banyak kasus di mana balita yang tidak mendapatkan ASI secara memadai karena kurangnya pengetahuan tentang betapa pentingnya ASI bagi bayi. Kedua, terbatasnya layanan kesehatan, termasuk layanan ante natal care (ANC), post natal dan pembelajaran dini yang berkualitas. Ketiga, kurangnya akses kepada makanan bergizi. Di Indonesia banyak ditemui ibu hamil yang mengalami anemia karena makanan bergizi yang tidak terjangkau. Kurangnya usaha untuk memenuhi gizi dengan memanfaatkan kondisi lingkungan juga termasuk di dalam faktor ini. Keempat, kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi sehingga saat ini masih ada wilayah yang kesulitan mengakses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu kita juga masih menemui perilaku masyarakat yang membuang kotoran di tempat terbuka. Ini juga mempengaruhi kualitas air bersih yang pada gilirannya berpengaruh terhadap kesehatan anak.

Pemerintah Kabupaten Banggai telah berkomitmen untuk menurunkan prevalensi stunting pada tahun 2025. Upaya ini melibatkan berbagai program peningkatan ketahanan pangan, seperti diversifikasi pangan, peningkatan produksi pangan lokal, dan edukasi gizi kepada masyarakat serta adanya inovasi terintegrasi melalui gerakan 1000 HPK serta pendekatan intervensi dengan 10 lokus desa stunting telah berhasil mencapai target yang ditandai dengan capaian data stunting yang menurun hingga mencapai 8,4% pada tahun 2025.

- Umur Harapan Hidup Pada Saat Lahir

Grafik 3.29
Perkembangan Umur Harapan Hidup Saat Lahir
Kabupaten Banggai, 2022—2025



Sumber : BPS Indonesia, 2025

Ketahanan pangan mengacu pada ketersediaan pangan yang cukup, bergizi, dan dapat diakses oleh semua orang. Ketahanan pangan yang baik berperan sangat penting dalam mendukung kondisi kesehatan masyarakat, yang langsung

mempengaruhi umur harapan hidup (UHH). Jika ketahanan pangan tinggi, orang cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap makanan bergizi yang dapat memperbaiki kondisi kesehatan, menurunkan angka kematian bayi, serta meningkatkan kualitas hidup secara umum.

Secara keseluruhan kita dapat melihat tren positif secara perlahan dengan kenaikan kecil yang konsisten setiap tahun. Dimana data UHH di Kabupaten Banggai cenderung meningkat secara perlahan. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan secara perlahan dalam kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Banggai, hal tersebut sejalan dengan indeks ketahanan pangan Kabupaten Banggai yang mencapai 85,14.

IKP yang tinggi mengindikasikan adanya ketersediaan pangan yang cukup dan bergizi. Di Kabupaten Banggai, jika terjadi peningkatan ketahanan pangan pada tahun 2025, ini dapat berkontribusi pada perbaikan status gizi masyarakat, yang secara langsung mendukung peningkatan kesehatan dan mengurangi angka kematian terkait kekurangan gizi. Umur harapan hidup merupakan salah satu dampak dari status kesehatan di suatu wilayah. Meningkatnya Umur harapan hidup menandakan adanya perbaikan kualitas konsumsi dan kesehatan ibu hamil, status kesehatan secara fisik dan psikis masyarakat pada umumnya, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

- Rata-rata lama sekolah Perempuan di atas 15 tahun

Rata-rata lama sekolah perempuan adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk Perempuan berusia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Tingkat pendidikan perempuan terutama ibu dan pengasuh anak sangat berpengaruh terhadap status kesehatan dan gizi, dan menjadi hal yang sangat penting dalam pemanfaatan pangan.

Grafik 3.30
Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten, 2022-2025



Sumber : BPS Sulteng, 2025

Tabel. 3.64
Indeks Ketahanan Pangan di Wilayah Sulawesi Tengah
Tahun 2025

KAB/KOTA	INDEKS KETAHANAN PANGAN	PERINGKAT KAB/KOTA
Banggai	76,35	134
Poso	68,69	344
Kota Palu	69,73	315
Morowali	77,54	104
Morowali Utara	71,75	262
Sigi	76,23	136
Buol	67,64	363
Toli-Toli	66,07	386
Parigi Moutong	70,96	286
Donggala	61,94	427
Tojo Una-Una	69,24	327
Banggai Kepulauan	69,73	316
Banggai Laut	64,31	404

Sumber : <https://satudata.badanpangan.go.id>

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) untuk wilayah Sulawesi Tengah tahun 2025, secara umum semakin tinggi nilai indeksnya, semakin baik ketahanan pangan di wilayah tersebut. Kabupaten Banggai adalah salah satu pilar ketahanan pangan utama di Sulawesi Tengah. Posisi Kabupaten Banggai berada di kelompok atas bersama Kabupaten Morowali dan Sigi, sementara sebagian besar wilayah lainnya masih berada di bawah skor 70.

Walaupun belum memenuhi target yang telah ditetapkan indikator kinerja Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai masih tergolong baik, Beberapa kondisi yang mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Banggai antara lain:

1. Ketersediaan pangan relatif baik, tercermin dari skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 95,91 yang mendekati skor ideal.
2. Ketersediaan protein masyarakat telah melampaui standar nasional, yaitu 61,50 gram/kapita/hari dibandingkan standar nasional 57 gram/kapita/hari.
3. Penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6,23%, yang meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan.
4. Akses listrik rumah tangga yang sangat tinggi (99,52%), mendukung pengolahan, penyimpanan, dan keamanan pangan.
5. Penurunan prevalensi stunting menjadi 8,4%, lebih rendah dari target 12%, menunjukkan perbaikan dalam pemanfaatan pangan dan status gizi masyarakat.

Adapun Kendala yang dihadapi dalam mencapai Indeks Ketahanan Pangan antara lain:

1. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah masih rendah, yaitu 20 ton, jauh di bawah standar minimal 110,04 ton.
2. Ketersediaan energi pangan masih di bawah standar nasional, yaitu 2.009 kkal/kapita/hari dari standar 2.100 kkal/kapita/hari.
3. Diversifikasi pangan belum optimal, terlihat dari skor beberapa kelompok pangan seperti umbi-umbian dan kacang-kacangan yang masih rendah.
4. Akses sanitasi rumah tangga belum sepenuhnya memadai, dimana masih terdapat 16,69% rumah tangga yang belum memiliki fasilitas buang air besar sendiri.

Untuk meningkatkan capaian Indeks Ketahanan Pangan, Pemerintah Kabupaten Banggai telah melakukan beberapa upaya, antara lain:

1. Peningkatan produksi dan diversifikasi pangan lokal melalui program pengembangan pangan lokal dan penganekaragaman konsumsi pangan.
2. Penguatan cadangan pangan pemerintah daerah secara bertahap untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kerawanan pangan.
3. Peningkatan edukasi gizi dan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) kepada masyarakat.
4. Peningkatan akses air bersih dan sanitasi guna mendukung kesehatan masyarakat dan kualitas pemanfaatan pangan.

Adapun program yang mendukung sasaran "Meningkatnya kualitas tata ruang, lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan rakyat" adalah :

Tabel 3.65

Program yang mendukung sasaran "Meningkatnya Investasi dan Pengelolaan Potensi Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah"

Program	Anggaran	Realisasi	Serapan (%)
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	65.060.262.720	62.592.962.251	96,21
Penyediaan dan Pengembangan prasarana Pertanian	2.575.581.750	2.397.131.190	93,07
Perizinan Usaha Pertanian	210.000.000	190.859.580	90,89
Pengendalian dan	560.509.800	543.884.500	97,03

Penanggulangan Bencana Pertanian			
Penyuluhan Pertanian	3.233.830.577	2.693.575.849	83,29
Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.126.747.320	1.018.996.208	
Pengelolaan perikanan tangkap	7.337.403.700	6.478.848.679	88,30
Pengelolaan Perikanan Budidaya	5.175.417.753	4.788.048.529	92,52
Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	991.140.600	887.364.793	89,53
Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	1.749.417.318	1.138.030.245	65,05
Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	2.567.204.729	2.105.594.228	82,02
Penanganan kerawanan pangan	458.635.740	350.917.940	76,51
Pengawasan keamanan pangan	508.288.726	484.449.532	95,31
Jumlah	91.554.440.733	85.670.663.524	93,57

Sumber : Dinas TPHP, Dinas Peternakan dan Keswan, Dinas Perikanan, Dinas Ketapang, 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Investasi dan Pengelolaan Potensi Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah” diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 107,00% dengan persentase anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar 93,57%.

Sasaran Strategis : Meningkatkan Kualitas Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Untuk Kesejahteraan Rakyat

Tabel. 3.66
Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025

	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	82,818	86,60	104,56
	Rata-rata capaian kinerja				104,56

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab.Banggai, Data Diolah, 2025

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Banggai tahun 2025 merupakan indikator komposit yang menggambarkan kondisi kualitas lingkungan secara menyeluruh yang dibentuk dari tiga komponen utama, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL). Tujuan digunakannya indikator ini adalah sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagai bentuk pertanggung-jawaban kepada publik terkait pencapaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sebagai instrumen keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai tahun 2025 terealisasi sebesar 86,60 yang menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup berada pada kategori sangat baik. Pada tabel dibawah ini menunjukkan Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Vegetasi Hutan/Lahan Serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai:

Tabel 3.67
Komponen Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Banggai Tahun 2025

Indikator	Nilai
Indeks kualitas air	85,51
Indeks kualitas udara	85,83
Indeks kualitas tutupan lahan	89,89

Indeks Kualitas Air (IKA) diukur menggunakan 8 (delapan) parameter, yaitu pH, BOD, COD, TSS, DO, NO₃-N, Total Phospat, dan Fecal Coliform. Pengambilan sampel untuk setiap parameter dilakukan dengan metode pengujian yang telah diregulasikan sesuai standar pemantauan kualitas air yang berlaku. Berdasarkan hasil pengukuran pada tahun 2025, Kabupaten Banggai memperoleh nilai IKA sebesar 85,51, yang termasuk dalam kategori baik. Nilai ini menunjukkan bahwa kondisi kualitas air di wilayah Kabupaten Banggai secara umum masih berada dalam kondisi yang terjaga dan mampu mendukung keberlanjutan fungsi lingkungan.

Indeks Kualitas Udara (IKU) diukur menggunakan 2 (dua) parameter utama, yaitu Nitrogen Dioksida (NO₂) dan Sulfur Dioksida (SO₂). Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode passive sampler dengan periode pengukuran selama 14 hari untuk memperoleh gambaran kualitas udara ambien secara

representatif. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kualitas udara di Kabupaten Banggai relatif bersih dan tingkat pencemaran udara masih berada dalam batas yang aman.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) diukur berdasarkan dua parameter utama, yaitu tutupan vegetasi hutan dan tutupan vegetasi non-hutan. Tutupan vegetasi hutan meliputi Hutan Lahan Kering Primer, Hutan Lahan Kering Sekunder, Hutan Mangrove Primer, Hutan Mangrove Sekunder/Bekas Tebangan, Hutan Rawa Primer, Hutan Rawa Sekunder/Bekas Tebangan, serta Hutan Tanaman. Sementara itu, tutupan vegetasi non-hutan meliputi belukar dan belukar rawa pada kawasan hutan dan fungsi lindung, kawasan dengan kemiringan lahan lebih dari 25%, sempadan sungai, pantai, dan danau, serta Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terdiri dari kebun raya, taman keanekaragaman hayati, hutan kota, taman kota, serta kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan pada Area Penggunaan Lain (APL).

Pengukuran IKL dilakukan melalui pengolahan data tutupan lahan berdasarkan kegiatan pemantauan dan pengukuran yang dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait. Pada tahun 2025, Kabupaten Banggai memperoleh nilai IKL sebesar 89,89, yang menunjukkan kondisi tutupan lahan yang masih terjaga dengan baik.

Perhitungan IKLH sebagai berikut:

$$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$$

Dengan nilai komponen sebagai IKA (Indeks Kualitas Air) sebesar 85,51, IKU (Indeks Kualitas Udara) sebesar 85,83 dan IKL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan) sebesar 89,89 sehingga:

$$IKLH = (0,376 \times 85,51) + (0,405 \times 85,83) + (0,219 \times 89,89) = 86,60$$

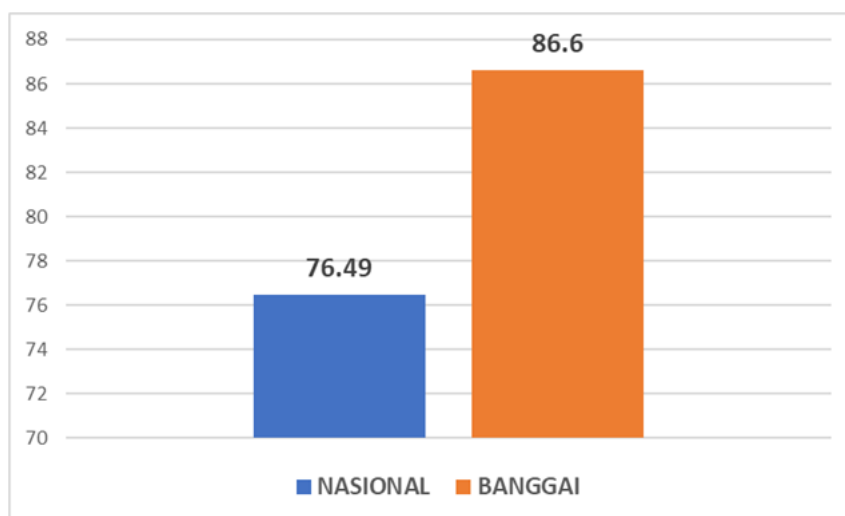
Nilai IKLH Kabupaten Banggai sebesar 86,60 menunjukkan bahwa kondisi kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan berada pada kategori sangat baik. Hal tersebut mencerminkan bahwa upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai telah berjalan secara efektif, meskipun tetap diperlukan upaya berkelanjutan dalam pengawasan kualitas lingkungan, pengendalian aktivitas yang berpotensi menimbulkan pencemaran, serta peningkatan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Tabel 3.68
Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Terakhir dan
Target Akhir RPJMD 2021-2026

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi				Target Akhir RPJMD 2026	Capaian (%)
		2022	2023	2024	2025		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	79,20	77,75	81,16	86,60	83,618	103,57

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Banggai dari tahun ke tahun menunjukkan tren kinerja yang cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan tata ruang, serta pengendalian dampak perubahan iklim di Kabupaten Banggai telah berjalan efektif dan memberikan hasil yang sangat baik. Peningkatan ini disebabkan pula oleh pengurangan polusi udara, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penerapan teknologi yang ramah lingkungan.

Grafik 3.31
KLH Kabupaten Banggai dan Nasional Tahun 2025



Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2025

Beberapa faktor penyebab keberhasilan, dalam pencapaian IKLH yaitu:

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya dalam mengurangi membuang sampah dan limbah rumah tangga ke badan air seperti sungai khususnya yang bermukim di pinggir sungai.
2. Kondisi tutupan vegetasi hutan dan non-hutan di Kabupaten Banggai yang masih relatif terjaga sehingga mampu menjaga keseimbangan ekosistem serta mendukung kualitas udara dan air.

3. Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan secara berkala melalui pengukuran kualitas air, udara, dan tutupan lahan oleh perangkat daerah terkait.
4. Meningkatnya kesadaran Masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup antara lain :

1. Masih terdapat potensi pencemaran dari limbah domestik rumah tangga, khususnya pada wilayah permukiman yang berada di sekitar aliran sungai.
2. Peningkatan mobilitas kendaraan bermotor dan aktivitas sektor industry yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan teknologi rendah emisi.
3. Tekanan terhadap pemanfaatan lahan akibat pembangunan dan aktivitas ekonomi yang berpotensi menimbulkan alih fungsi lahan.
4. Kurangnya sistem pengelolaan sampah yang baik, termasuk kurangnya tempat pembuangan akhir (TPA) yang memadai.

Solusi yang dilakukan untuk meningkatkan tercapainya IKLH, maka perlu langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kampanye dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan serta pengelolaan limbah rumah tangga yang baik.
2. Pemantauan dan pengawasan terhadap industri dan usaha/kegiatan yang berpotensi menghasilkan emisi udara.
3. Melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan secara berkala untuk memastikan kondisi lingkungan tetap terjaga.
4. Mendorong peningkatan ruang terbuka hijau serta pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan.
5. Memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatan ruang agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang dan mendukung keberlanjutan lingkungan.
6. Melaksanakan Gerakan penanaman pohon di area perkotaan guna menyerap polutan secara alami.
7. Membangun fasilitas pengelolaan sampah yang lebih efektif, termasuk daur ulang dan pengurangan limbah

Adapun program yang mendukung sasaran "Meningkatnya kualitas tata ruang, lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan rakyat" adalah :

Tabel 3.69

Program yang mendukung sasaran meningkatnya kualitas tata ruang, lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan rakyat

Program	Anggaran	Realisasi	Serapan (%)
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	2.886.754.933,00	2.803.590.107,00	97,12
Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.154.261.770,00	.974.321.378,00	91,65
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	196.906.600,00	190.916.940,00	96,96
Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	218.734.290,00	218.348.460,00	99,82
Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	212.104.820,00	205.408.420,00	96,84
Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	51.871.140,00	50.459.940,00	97,28
Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	12.689.500,00	11.438.000,00	90,14
Pengelolaan Persampahan	17.297.727.101,30	16.661.958.268,00	96,32
Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	92.030.800,00	83.960.229,00	95,80
Jumlah	23.123.080.954,30	20.226.080.364,00	87,47

Sumber : DLH Kab.Banggai, 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas tata ruang, lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan rakyat diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 104,56% dengan persentase anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar 87,47 %.

Sasaran Strategis : Meningkatkan Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah

Tabel. 3.70
Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	%	2,92	0,33	11,30
Rata-rata capaian kinerja					11,30

Sumber : BPS Kabupaten Banggai

Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB adalah persentase nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah pada periode tertentu berdasarkan harga berlaku.

Empat indikator yang mendukung keberhasilan pembangunan sektor pariwisata yaitu: jumlah kunjungan wisatawan, besaran belanja wisatawan (*spending of money*), lama tinggal (*length of stay*), dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keempat indikator menjadi acuan strategi agar pengembangan pariwisata berdampak nyata terhadap perekonomian daerah.

Kabupaten Banggai dikenal dengan keindahan alamnya, yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai daya Tarik wisata. Destinasi wisata unggulan yang menarik wisatawan domestik maupun mancanegara yang ada di Kabupaten Banggai, seperti:

- Pulau Dua – Salah satu ikon wisata laut dengan keindahan alam bawah laut yang luar biasa.
- Pantai Kilo Lima – Destinasi favorit dengan panorama pantai yang eksotis.
- Air Terjun Piala, Air Terjun Laumarang, Air Terjun Salodik – Wisata alam yang semakin populer.
- Wisata Bahari – Kabupaten Banggai memiliki banyak pulau kecil dengan ekosistem laut yang kaya, menarik bagi wisata selam dan snorkeling



Tabel 3.71
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Domestik Menurut Bulan di
Kabupaten Banggai, Tahun 2025

Bulan Months	Wisatawan Mancanegara Foreign Tourist	Wisatawan Domestik Domestic Tourist	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari	183	11.206	11.389
Februari	186	5.710	5.896
Maret	131	3.613	3.744
April	116	18.000	18.116
Mei	168	9.044	9.212
Juni	126	7.129	7.255
Juli	222	2.667	2.889
Agustus	96	2.029	2.125
September	45	3.844	3.889
Oktober	62	4.749	4.811
November	48	4.954	5.002
Desember	68	9.787	9.855
Banggai	1.451	82.732	84.183

Sumber: BPS Kab.Banggai (Banggai Dalam Angka 2026)

Wisatawan mancanegara (wisman) ialah setiap pengunjung yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi dan lamanya kunjungan tersebut tidak lebih dari satu tahun (12 bulan). Sedangkan wisatawan Nusantara ialah setiap pengunjung yang datang dari seluruh penjuru Nusantara, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi.

Salah satu aspek yang diminati wisatawan adalah kuliner khas daerah. Peluang ini dimanfaatkan oleh masyarakat dengan membuka usaha rumah makan dan restoran. Sehingga Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB dapat dilihat dari sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Penyediaan Akomodasi merupakan Penyediaan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha Penyediaan Akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan fasilitas lainnya. Hotel terdiri dari Hotel Berbintang dan Non Bintang.

Sektor pariwisata, terutama yang berhubungan dengan kunjungan wisatawan, memberikan dampak signifikan terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banggai melalui peningkatan Pendapatan Daerah melalui Pajak Hotel dan Restoran (PHR) dari wisatawan yang menginap di hotel atau makan di restoran meningkatkan pendapatan daerah, maka sektor perhotelan menyumbang pemasukan yang cukup besar, selain itu kunjungan wisatawan dapat meningkatkan Aktivitas Ekonomi dengan menghabiskan uang untuk transportasi, makanan, oleh-oleh, dan aktivitas lainnya hal ini mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Banggai, serta mendorong investasi di sektor pariwisata, peluang investasi dalam bidang perhotelan, restoran, dan objek wisata semakin meningkat. Investor akan lebih tertarik untuk berinvestasi di sektor ini jika tren kunjungan terus meningkat dan juga menciptakan lapangan kerja baik langsung (di hotel, restoran, agen wisata) maupun tidak langsung (pengrajin, pedagang oleh-oleh, transportasi lokal).

Jumlah rumah makan dan restoran di Kabupaten Banggai mencapai 538 unit, dengan sebaran terbanyak di Kecamatan Luwuk Selatan (159 unit), diikuti oleh Kecamatan Luwuk (154 unit) dan Kecamatan Luwuk Utara (42 unit).

Tabel 3.72
Jumlah Rumah Makan/Restoran menurut Kecamatan
di Kabupaten Banggai Tahun 2022-2025

Kecamatan District	2022	2023	2024 ¹	2025 ¹
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Toili	22	22	28	28
Toili Barat	9	9	10	10
Moilong	24	24	26	26
Toili Jaya	—	—	—	—
Batui	9	9	5	5
Batui Selatan	12	12	14	14
Bunta	7	7	10	10
Nuhon	10	10	17	17
Simpang Raya	—	—	4	4
Kintom	—	—	4	4
Luwuk	127	127	154	160
Luwuk Timur	8	8	10	10
Luwuk Utara	24	24	42	42
Luwuk Selatan	171	171	159	186
Nambo	4	4	6	6
Pagimana	11	11	14	14
Lobu	2	2	4	4
Bualemo	4	4	4	4
Lamala	—	—	2	2
Masama	12	12	14	14
Mantoh	—	—	3	3
Balantak	—	—	3	3
Balantak Selatan	—	—	4	4
Balantak Utara	—	—	1	1
Banggai	456	456	538	571

Sumber : BPS Kab.Banggai (Banggai Dalam Angka 2026)

Rumah makan/restoran di Kabupaten Banggai mengalami peningkatan di tahun 2025 sebanyak 33 unit dari tahun 2024, dengan sebaran terbanyak di Kecamatan Luwuk Selatan (186 unit), diikuti oleh Kecamatan Luwuk (160 unit) dan Kecamatan Luwuk Utara (42 unit). Ketiga wilayah ini merupakan pusat aktivitas ekonomi dan bisnis di Kabupaten Banggai. Hal ini mengindikasikan pertumbuhan ekonomi daerah perkotaan, sementara stagnasi di beberapa kecamatan bisa disebabkan oleh minimnya pertumbuhan ekonomi atau preferensi konsumsi masyarakat. Secara keseluruhan, sektor kuliner dan restoran dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai.

Tabel. 3.73
Jumlah Akomodasi Penginapan menurut Kecamatan di Kabupaten Banggai
Tahun 2022- 2025

Kecamatan District	2022	2023	2024 ¹	2025 ¹
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Toili	1	2	8	8
Toili Barat	5	5	9	9
Moilong	2	2	1	1
Toili Jaya	—	—	—	—
Batui	2	2	5	5
Batui Selatan	—	—	—	—
Bunta	4	4	8	8
Nuhon	—	—	1	1
Simpang Raya	—	—	—	—
Kintom	—	—	—	—
Luwuk	37	45	39	39
Luwuk Timur	—	—	—	—
Luwuk Utara	—	—	—	—
Luwuk Selatan	2	1	16	16
Nambo	—	—	—	—
Pagimana	2	2	2	2
Lobu	—	—	—	—
Bualemo	—	—	—	—
Lamala	1	1	1	1
Masama	2	2	2	2
Mantoh	—	—	—	—
Balantak	—	—	—	—
Balantak Selatan	1	2	2	2
Balantak Utara	1	2	3	3
Banggai	60	70	98	98

Sumber: BPS Kab.Banggai (Banggai Dalam Angka 2026)

Berikut adalah daftar hotel berbintang di Kabupaten Banggai, beserta klasifikasi bintangnya:

1. Estrella Hotel & Conference Luwuk

Hotel ini menawarkan fasilitas lengkap seperti kolam renang, pusat kebugaran, dan ruang konferensi. Terletak strategis di dekat pantai dan pusat kota.

2. Swiss-Belinn Luwuk

Menyediakan kamar-kamar modern dengan pemandangan laut, restoran, dan fasilitas pertemuan. Cocok untuk pelancong bisnis dan wisatawan.

3. Hotel Santika Luwuk - Sulawesi Tengah

Hotel ini memiliki fasilitas seperti kolam renang, pusat kebugaran, dan restoran. Terletak dekat dengan pantai dan menawarkan pemandangan indah.

Ketiga hotel ini berperan penting dalam mendukung sektor pariwisata dan bisnis di Kabupaten Banggai, ketiga hotel ini tentunya sangat mendukung sektor pariwisata dengan menyediakan akomodasi berkualitas bagi wisatawan dan pelaku bisnis., menyerap tenaga kerja dengan memberikan lapangan kerja bagi masyarakat setempat, baik dalam operasional hotel maupun sektor pendukung (transportasi, kuliner, dan jasa lainnya) dan juga meningkatkan pendapatan daerah Melalui pajak hotel, pajak restoran, serta kontribusi ekonomi dari tamu yang menginap.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB di dukung juga dengan adanya kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banggai di tahun 2025 sebesar Rp 335.826.062,00.

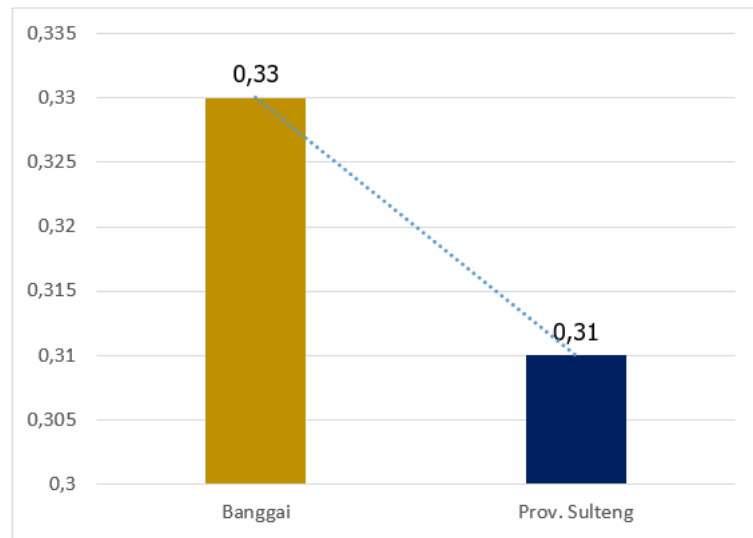
Pariwisata di Banggai saat ini berada pada tahap pembangunan infrastruktur, namun belum pada tahap optimalisasi pendapatan. Tantangan ke depan bukan lagi menambah jumlah hotel atau restoran, melainkan bagaimana menarik wisatawan mancanegara dan meningkatkan lama menginap agar uang yang berputar di daerah menjadi lebih besar.

Tabel 3.74
Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Terakhir dan Target Akhir RPJMD 2021-2026

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi				Target Akhir RPJMD 2026	Capaian (%)
		2022	2023	2024	2025		
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	0,30	0,33	0,34	0,33	3,10	10,65

Secara umum tren kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB menunjukkan peningkatan bertahap pada periode 2022–2024, kemudian stagnan pada tahun 2025. Untuk capaian terhadap target akhir RPJMD masih belum memenuhi target, sehingga diperlukan penguatan pengembangan destinasi, promosi pariwisata, serta dukungan terhadap ekonomi kreatif berbasis budaya dan sejarah.

Grafik 3.32
Perbandingan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Kabupaten Banggai
dengan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025



Sumber : BPS Kabupaten Banggai

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Banggai masih tinggi 0,02 poin dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata di Kabupaten Banggai memiliki peran yang cukup signifikan terhadap perekonomian daerah.

Pencapaian atas kinerja indikator kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tidak lepas dari dukungan program yang di laksanakan yaitu:

- Program pemasaran pariwisata melalui promosi digital, partisipasi pada pameran/event pariwisata, serta optimalisasi Tourism Information Center (TIC) di bandara memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Selain itu, penyelenggaraan berbagai event dan festival daerah mampu meningkatkan daya tarik destinasi sekaligus mendorong perputaran ekonomi lokal.
- Program pengembangan destinasi wisata melalui peningkatan aksesibilitas, amenitas, dan sarana prasarana di destinasi unggulan juga berkontribusi terhadap meningkatnya lama tinggal dan belanja wisatawan. Di sisi lain, program pengembangan ekonomi kreatif melalui pelatihan, pendampingan pelaku usaha, fasilitasi pemasaran produk lokal, serta pelaksanaan pasar ekonomi kreatif terbukti efektif meningkatkan nilai tambah ekonomi kreatif

Terdapat beberapa kendala dalam pencapaian kinerja yaitu:

1. Keterbatasan aksesibilitas menuju destinasi wisata unggulan
2. Masih terbatasnya atraksi wisata yang dapat meningkatkan lama tinggal wisatawan
3. Masih terbatasnya pengembangan destinasi wisata baru yang berpotensi meningkatkan daya tarik kunjungan wisatawan
4. Belum optimalnya akses pasar dan jaringan pemasaran pariwisata
5. Belum optimalnya promosi pariwisata secara terintegrasi di tingkat nasional maupun internasional
6. Terbatasnya jumlah destinasi wisata yang menjadi sumber PAD melalui retribusi
7. Keterbatasan kualitas data potensi PAD sektor pariwisata
8. Peraturan daerah terkait retribusi destinasi wisata yang belum mengakomodasi seluruh potensi destinasi wisata unggulan
9. Kurangnya SDM Profesional di Bidang Pariwisata dimana masih terbatasnya tenaga kerja dengan keterampilan dalam hospitality, pemandu wisata, dan manajemen destinasi.

Alternative dan solusi yang dilakukan, yaitu :

1. Peningkatan infrastruktur dasar seperti akses jalan, transportasi umum, dan jaringan internet di lokasi wisata.
2. Pengembangan atraksi wisata berbasis budaya dan event daerah
3. Pengembangan amenities dan fasilitas pendukung di destinasi wisata unggulan
4. Optimalisasi fungsi Pusat Informasi Pariwisata di Bandar Udara Luwuk
5. Keikutsertaan dalam pameran dan event promosi pariwisata baik di dalam maupun luar daerah
6. Pengembangan potensi wisata kuliner dan produk ekonomi kreatif lokal
7. Penguatan promosi digital melalui media sosial dan platform digital lainnya
8. Penguatan branding pariwisata Banggai melalui kampanye media sosial, pembuatan website, dan aplikasi wisata.
9. Kolaborasi dengan travel influencer, vlogger, dan media untuk memperkenalkan destinasi unggulan Banggai.
10. Kemudahan akses permodalan melalui program kredit usaha rakyat (KUR) atau hibah bagi UMKM kreatif di sektor pariwisata dan kuliner.
11. Identifikasi dan pengembangan destinasi wisata baru sebagai sumber PAD
12. Peningkatan kapasitas SDM pariwisata melalui pelatihan dan pembinaan

13. Pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan keterampilan dalam produksi pangan yang dapat mendukung sektor pariwisata.

Program-program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran “Meningkatnya Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah”, yaitu:

Tabel 3.75
Program yang mendukung sasaran Meningkatkan Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah

Program	Anggaran	Realisasi	Serapan (%)
Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.626.801.911,00	1.595.350.700,00	98,07
Pemasaran Pariwisata	2.372.146.470,00	2.318.926.237,00	97,76
Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)	523.701.940,00	511.340.456,00	97,64
Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	333.385.000,00	309.422.976,00	92,81
Jumlah	4.856.035.321,00	4.735.040.369,00	97,51

Sumber : Dinas Pariwisata Kab.Banggai, 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah” diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 11,30% dengan persentase anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar 97,51%.

Sasaran Strategis : Meningkatkan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Daerah Melalui Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Babasalan serta Moderasi Beragama.

Tabel. 3.76
Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1 Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	54,26	27,74	51,12
Rata-rata capaian kinerja				51,12

Tabel 3.77
Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Terakhir dan
Target Akhir RPJMD 2021-2026

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi				Target Akhir RPJMD 2026	Capaian (%)
		2022	2023	2024	2025		
Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	23,04	28,28	27,17	27,74	56,31	49,26

Sumber : Disdikbud, Dispursipan, DP2KBP3A, 2025

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrument untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan.

Saat ini capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Banggai dihitung berdasar representasi dari prosentase capaian dari indikator yaitu : indikator ekonomi budaya, indikator pendidikan, indikator warisan budaya, indikator gender, dan budaya literasi.

Dimensi pertama, ekonomi budaya menunjukkan penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan, dapat terepresentasi dari jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pertunjukan seni berjumlah 1.797 orang dari jumlah penduduk Kabupaten Banggai 382.009 jiwa, sehingga diperoleh nilai dimensi ekonomi budaya 0,47.

Dimensi kedua, warisan budaya terepresentase dari persentase warisan budaya baik benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan yaitu 18 warisan budaya benda cagar budaya benda terhadap 24 warisan budaya yang ada sehingga diperoleh nilai dimensi warisan budaya 75,00.

Dimensi ketiga, pendidikan dapat terepresentasi dari Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 8,94 , Harapan Lama Sekolah (HLS) 13,43 dan diperoleh nilai dimensi pendidikan 11,18.

Dimensi keempat, Gender dapat terepresentasi dari jumlah anggota parlemen perempuan 13 orang terhadap anggota parlemen 35 orang diperoleh Rasio sebesar 37,14% dan dimensi gender terepresentasi dari tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 59,54% terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki

sebesar 89,45% diperoleh rasio sebesar 66,56%, sehingga diperoleh nilai dimensi gender sebesar 51,85

Dimensi Kelima yaitu Budaya Literasi, Budaya literasi adalah suatu budaya di dalam masyarakat yang meliputi segala usaha manusia yang berkaitan dengan kegiatan membaca dan menulis. Budaya literasi terepresentase dari persentase penduduk yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik yaitu 776 orang terhadap 324.354 jiwa penduduk usia 10 tahun keatas sebesar 0,24%, budaya literasi juga terepresentase dari persentase jumlah pengunjung perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat yaitu 299 orang terhadap 324.354 jiwa penduduk usia 10 tahun keatas sebesar 0,09%, dan budaya literasi juga terepresentase dari jumlah penduduk yang pernah mengakses internet yaitu 838 orang terhadap 324.354 jiwa penduduk usia 10 tahun keatas sebesar 0,25%, sehingga diperoleh nilai dimensi budaya literasi 0,19%

Tabel 3.78
Jumlah penduduk/pengunjung perpustakaan tahun 2025

No	Uraian	Jumlah
1	Penduduk yang membaca buku selain kitab suci baik cetak maupun elektronik	776 Orang
2	Penduduk yang mengunjungi perpustakaan/ memanfaatkan taman bacaan masyarakat	299 Orang
3	Penduduk yang mengakses internet	838 Orang

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Banggai, 2025

Tabel 3.79
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Tahun 2025

No	Dimensi	Nilai
1	Ekonomi Budaya	0,47
2	Warisan Budaya	75,00
3	Pendidikan	11,18
4	Gender	51,85
5	Budaya Literasi	0,19
IPK Total		27,74

Adapun faktor pendukung untuk mencapai sasaran meningkatnya revolusi mental dan pembangunan kebudayaan daerah melalui pemajuan dan pelestarian kebudayaan babasalan serta moderasi beragama dengan indikator indeks pembangunan kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Pemeliharaan cagar budaya
2. Melakukan pembinaan pada kelompok-kelompok kesenian secara kontinyu dan mendorong untuk menyelenggarakan event secara mandiri.
3. Keterlibatan masyarakat untuk melestarikan budaya yang tinggi
4. Adanya pertunjukan seni sebagai ajang untuk menunjukkan potensi objek kebudayaan sekaligus menampung bakat seni tradisi masyarakat.
5. Menggunakan media sosial dan platform digital untuk mempromosikan kebudayaan lokal.

Pada tahun 2025 pemerintah Kabupaten Banggai melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai menggelar Festival Lipu Celebes 2025. Festival ini adalah momentum penting untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan potensi daerah yang ada di daerah kita. Festival ini diikuti oleh delegasi budaya dari empat negara, yakni Estonia, Meksiko, Korea Selatan, dan Filipina, serta partisipasi empat Kabupaten tetangga : Morowali, Buol, Toli-Toli, dan Tojo Una-Una, Keikutsertaan mereka menambah semarak pertunjukan seni dan memperkuat semangat persahabatan antarbangsa.



Beragam acara menarik disuguhkan dalam Festival Lipu Celebes 2024, beragam tarian dan pertunjukan tradisional yang menampilkan keunikan budaya masing-masing peserta. Selain pertunjukan seni budaya, Festival Lipu ceelbes 2025 diisi juga dengan berbagai kegiatan pendukung, seperti workshop kesenian, pameran etnografi, serta lomba-lomba untuk pelajar, termasuk mendongeng dalam Bahasa daerah dan pembacaan puisi. Para delegasi juga diberi kesempatan mengikuti ritual adat Suku Andio, mongkaan pae bu'o, di Kecamatan Masama. Festival ini tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga peluang untuk mempromosikan potensi Kabupaten Banggai ke Tingkat nasional dan internasional.

Dalam proses upaya pencapaian pembangunan kebudayaan, terdapat hambatan/kendala yang dihadapi diantaranya :

1. Masyarakat tidak sepenuhnya menyadari pentingnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan, sehingga partisipasi mereka cenderung rendah.
2. Kurangnya fasilitasi atau pembinaan bagi kelompok seni guna menguatkan pengetahuan mereka terkait seni dan tradisi
3. Pemanfaatan objek-objek budaya masih minim.
4. Pengaruh budaya asing dan globalisasi dapat mengancam keberadaan dan pelestarian kebudayaan lokal.

Terkait permasalahan tersebut maka solusi yang dilakukan yaitu :

1. Menyelenggarakan pelatihan bagi pelaku seni dan budaya
2. Melibatkan generasi muda dan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya.
3. Peningkatan sektor ekonomi kreatif bidang kebudayaan, dengan menjalin kerjasama sektor pariwisata dalam hal promosi dan penataan wilayah.
4. Perlunya dukungan infrastruktur digital, berupa sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi guna mempromosikan budaya yang ada.

Program-program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran “Meningkatnya Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Daerah Melalui Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Babasalan serta Moderasi Beragama”, yaitu:

Tabel 3.80

Program yang mendukung sasaran Meningkatkan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Daerah Melalui Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Babasalan serta Moderasi Beragama

Program	Anggaran	Realisasi	Serapan (%)
Pengembangan Kebudayaan	1.014.867.000,00	1.005.255.755,00	99,05
Pengembangan Kesenian Tradisional	153.636.000,00	139.438.100,00	90,76
Pembinaan Sejarah	646.235.500,00	629.271.532,00	97,37
Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	75.318.000,00	66.734.460,00	88,60
Pengelolaan Permuseuman	746.837.253,00	496.810.698,00	66,52
Jumlah	2.636.893.753,00	2.337.510.545,00	88,65

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Banggai, 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Daerah Melalui Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Babasalan serta Moderasi Beragama” diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar

27,74% dengan persentase anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar 88,65%.

Sasaran Strategis : Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Inovasi Daerah dan Nilai SAKIP Kabupaten Banggai

Tabel. 3.81
Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	BB	BB*	100
2	Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif	Sangat** Inovatif	100
3	Nilai SAKIP	Predikat	AA	BB***	83,25
Rata-rata capaian kinerja					94,42

Sumber : *Menggunakan Hasil Evaluasi KemenPANRB, 2025
** Hasil Penilaian Kemendagri, 2025
*** Hasil Evaluasi KemenPANRB, 2025

Tabel 3.82
Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Terakhir dan Target Akhir RPJMD 2021-2026

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi				Target Akhir RPJMD 2026	Capaian (%)
		2022	2023	2024	2025		
Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	B	BB	BB*	A	100
Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat* Inovatif	Sangat Inovatif/ Terinovatif	100
Nilai SAKIP	Predikat	A	BB	BB	BB***	AA	82,34
Rata-rata capaian kinerja							94,11

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Banggai menggunakan hasil evaluasi reformasi birokrasi tahun 2024, dikarenakan penetapan nilai indeks RB belum rilis dari Kementerian PANRB, namun hasil nilai indikator pada subkomponen pelaksanaan kebijakan dan sasaran strategis atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) sudah rilis melalui portal RB KemenPANRB. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, kesimpulan hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Persentase Indikator Mencapai Target Baik

Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi 50,00% Indikator mencapai target baik: 7 Indikator dengan target baik: 14 Total indikator: 14 5 INDIKATOR DENGAN CAPAIAN BOBOT TERTINGGI <table><tr><td>Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik</td><td>96,00%</td></tr><tr><td>Indeks Tata Kelola Pengadaan</td><td>89,20%</td></tr><tr><td>Indeks Reformasi Hukum</td><td>88,00%</td></tr><tr><td>Indeks Kualitas Kebijakan</td><td>81,20%</td></tr><tr><td>Nilai SAKIP</td><td>75,25%</td></tr></table> 5 INDIKATOR DENGAN CAPAIAN BOBOT TERENDAH <table><tr><td>Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan</td><td>40,00%</td></tr><tr><td>Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI</td><td>42,86%</td></tr><tr><td>Indeks Sistem Merit</td><td>47,75%</td></tr></table>	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	96,00%	Indeks Tata Kelola Pengadaan	89,20%	Indeks Reformasi Hukum	88,00%	Indeks Kualitas Kebijakan	81,20%	Nilai SAKIP	75,25%	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	0,00%	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	0,00%	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	40,00%	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	42,86%	Indeks Sistem Merit	47,75%	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi 71,43% Indikator mencapai target baik: 5 Indikator dengan target baik: 7 Total indikator: 8 3 INDIKATOR DENGAN CAPAIAN BOBOT TERTINGGI <table><tr><td>Opini BPK</td><td>100,00%</td></tr><tr><td>Survei Kepuasan Masyarakat</td><td>87,88%</td></tr><tr><td>Capaian IKU Makro</td><td>81,25%</td></tr></table> 3 INDIKATOR DENGAN CAPAIAN BOBOT TERENDAH <table><tr><td>Capaian IKU Non Makro</td><td>57,83%</td></tr><tr><td>Survei Penilaian Integritas</td><td>70,60%</td></tr><tr><td>Indeks SPBE</td><td>71,67%</td></tr></table>	Opini BPK	100,00%	Survei Kepuasan Masyarakat	87,88%	Capaian IKU Makro	81,25%	Capaian IKU Non Makro	57,83%	Survei Penilaian Integritas	70,60%	Indeks SPBE	71,67%
Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	96,00%																																
Indeks Tata Kelola Pengadaan	89,20%																																
Indeks Reformasi Hukum	88,00%																																
Indeks Kualitas Kebijakan	81,20%																																
Nilai SAKIP	75,25%																																
Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	0,00%																																
Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	0,00%																																
Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	40,00%																																
Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	42,86%																																
Indeks Sistem Merit	47,75%																																
Opini BPK	100,00%																																
Survei Kepuasan Masyarakat	87,88%																																
Capaian IKU Makro	81,25%																																
Capaian IKU Non Makro	57,83%																																
Survei Penilaian Integritas	70,60%																																
Indeks SPBE	71,67%																																

RB General

Strategi Pelaksanaan RB General Total Score Index 8,50 Total Bobot 10,00 Persentase 85,00%	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi Total Score Index 38,56 Total Bobot 50,00 Persentase 77,12%	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi Total Score Index 22,18 Total Bobot 40,00 Persentase 55,45%
--	---	---

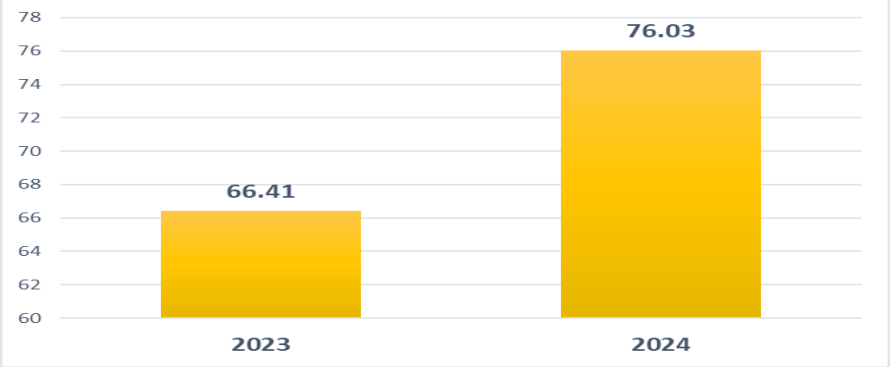
RB Tematik

Strategi Pembangunan Total Score Index 4,00 Total Bobot 5,00 Persentase 80,00%	Capaian Indikator Dampak Total Score Index 7,54 Total Bobot 15,00 Persentase 50,27%	Strategi Pembangunan Total Score Index 0,00 Total Bobot 0,04 Persentase 0,00%
--	---	---

Sumber : Portal RB KemnpanRB, 2026

Berikut perkembangan nilai reformasi birokrasi Kabupaten Banggai tahun 2023 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Grafik 3.33
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai, 2023-2024



Sumber: Hasil Evaluasi Kementerian PANRB

Reformasi Birokrasi dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Dengan strategi Reformasi Birokrasi yang baru diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis RB dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

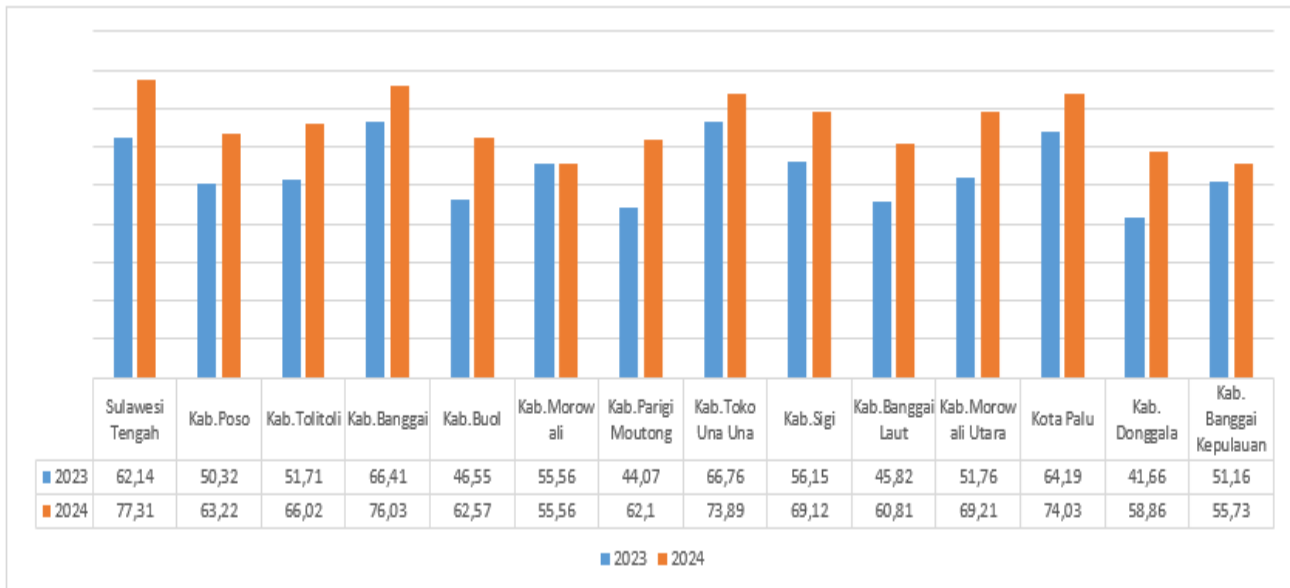
Secara lengkap rincian sementara atas catatan dan rekomendasi pada setiap indikator berdasarkan Kertas Kerja hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Banggai tahun 2025, dapat dilihat pada : https://bit.ly/CatatanLHERB_2025

Berdasarkan hasil evaluasi sementara reformasi birokrasi, terdapat beberapa pencapaian positif yang telah diraih oleh Kabupaten Banggai dengan rincian sebagai berikut:

- 5 Indikator dengan capaian bobot tertinggi terhadap capaian pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi
 1. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (96,00%)
 2. Indeks Tata Kelola Pengadaan (89,20%)
 3. Indeks Reformasi Hukum (88,00%)
 4. Indeks Kualitas Kebijakan (81,20%)
 5. Nilai SAKIP (75,25%)
- 5 Indikator dengan capaian bobot tertinggi terhadap sasaran strategis reformasi birokrasi
 1. Opini BPK (100,00%)
 2. Survei Kepuasan Masyarakat (87,88%)
 3. Capaian IKU Makro (81,25%)

Grafik 3.34

Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Banggai dengan Provinsi/Kab/Kota se Sulawesi Tengah tahun 2023, 2024



Sumber: Hasil Evaluasi Kementerian PANRB (Data di Olah Biro Organisasi Prov. Sulawesi Tengah)

Dari grafik tersebut terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten di tahun 2024 memperoleh nilai Reformasi Birokrasi tertinggi kedua setelah Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah sistem penilaian tahunan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengukur tingkat inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil penilaian ini menjadi dasar pemberian penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) kepada daerah yang paling inspiratif.

Tabel 3.83
Kategori Indeks Inovasi Daerah

Kategori	Rentang Skor
Sangat Inovatif	60,01 - 100,00
Inovatif	35,00 – 60,00
Kurang Inovatif	0,01 - 34,99
Tidak Dapat Dinilai	0

Kabupaten Banggai memperoleh Indeks Inovasi Daerah (IID) *Innovative Government Award* (IGA) 2025 dengan predikat Sangat Inovatif dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil

memenuhi sasaran kinerja dalam penguatan inovasi. Terdapat 75 jumlah Inovasi yang sedang berjalan dan telah di implementasikan di Kabupaten Banggai. Capaian kinerja sebesar 100% menunjukkan bahwa seluruh inovasi daerah telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan terdokumentasi serta terdaftar dalam aplikasi Inovation Government Award (IGA) tahun 2025. Kabupaten Banggai menjadi satu-satunya daerah dari Provinsi Sulawesi Tengah yang meraih predikat sangat inovatif.

Kegiatan penilaian inovasi daerah ini dimaksudkan agar dapat mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat. Adapun tujuan kegiatan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (Innovative Government Award) adalah:

1. Memotivasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan inovasi dalam pelayanan masyarakat sesuai dengan kategori sangat inovatif, inovatif, serta memotivasi pemerintah daerah kurang inovatif dan tidak dapat dinilai;
2. Mendorong penerapan good governance;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses-proses inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah; dan
4. Memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berhasil menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dalam upaya peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Tabel 3.84
Indeks Inovasi Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota
di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Kabupaten/Kota	Nilai	Predikat
Kabupaten Banggai	70,07	Sangat Inovatif
Kabupaten Morowali	64,43	Inovatif
Kota Palu	58,32	Inovatif
Provinsi Sulawesi Tengah	57,12	Inovatif
Kabupaten Tojo Una-Una	51,78	Inovatif
Kabupaten Buol	48,96	Inovatif
Kabupaten Morowali Utara	46,13	Inovatif
Kabupaten Banggai Kepulauan	44,10	Inovatif
Kabupaten Donggala	42,50	Inovatif
Kabupaten Banggai Laut	40,69	Inovatif
Kabupaten parigi Moutong	40,04	Inovatif

Kabupaten Toli-Toli	39,51	Kurang Inovatif
Kabupaten poso	36,02	Kurang Inovatif
Kabupaten Sigi	14,50	Kurang Inovatif

Sumber : Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6097 Tahun 2025

Pencapaian ini tidak hanya menjadi bukti atas keberhasilan pemerintah Kabupaten Banggai dalam mengimplementasikan kebijakan berbasis inovasi, tetapi juga menjadi inspirasi bagi daerah lain di Sulawesi Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi dapat menjadi motor penggerak untuk mencapai target pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan pencapaian ini, Kabupaten Banggai semakin mempertegas posisinya sebagai salah satu daerah yang unggul dalam hal inovasi di tingkat regional. Melalui kolaborasi yang kuat dan visi yang jelas, Kabupaten Banggai bertekad untuk terus menjadi pelopor dalam memajukan inovasi yang berdampak luas bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Banggai terus mendorong Perangkat daerah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Masyarakat, dengan terus berinovasi dan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat, salah satu bentuk apresiasi dan dorongan dari Pemerintah Kabupaten Banggai bagi perangkat daerah yang telah berkontribusi dan berpartisipasi dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun 2025.

Indeks Inovasi Pemerintah Kabupaten Banggai meraih predikat Sangat Inovatif dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tahun 2025, keberhasilan tersebut di dukung dengan upaya-upaya yang dilaksanakan meliputi:

1. Pendampingan dan pembinaan aktif inovasi Perangkat Daerah secara aktif dan berkelanjutan sejak perencanaan hingga evaluasi inovasi.
2. Komitmen Pimpinan Daerah serta Perangkat Daerah dalam mendorong budaya inovasi di seluruh Perangkat Daerah.
3. Perencanaan inovasi yang terstruktur dan berbasis permasalahan nyata.
4. Validasi dan kelengkapan evidence sesuai indikator penilaian inovasi.
5. Monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan keberlanjutan inovasi.
6. Kolaborasi antar Perangkat Daerah dalam pengembangan dan replikasi inovasi.
7. Fokus pada dampak dan peningkatan layanan publik, bukan sekadar administratif.
8. Peningkatan Kolaborasi dengan BRIN, LAN, BSKDN Kemendagri, BRIDA PROVINSI dan UNIVERSITAS.

9. Dalam rangka meningkatkan kualitas hasil kajian, Pemerintah Kabupaten Banggai melalui BRIDA melakukan Kerjasama/kolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Universitas baik Lokal maupun Nasional, antara lain :

- Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta
- Universitas Brawijaya Malang, Jatim
- Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung
- Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar
- Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung
- Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA)
- Universitas Tadulako (UNTAD) Palu
- Universitas Sulawesi Tenggara (UNSULTRA)
- Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu
- Universitas Tompotika (UNTIKA) Luwuk
- Universitas Muhammadiyah Luwuk
- Bskdn Kemendagri
- Badan Riset Inovasi Nasional
- Kantor Wilayah Kemenkum Provinsi Sulteng
- Brida Provinsi Sulteng

Meskipun capaian tahun 2025 sangat memuaskan, namun terdapat beberapa faktor risiko yang berpotensi menghambat keberlanjutan pencapaian indikator pada tahun-tahun mendatang, yaitu:

1. Pergantian Kepemimpinan dan Rotasi Jabatan

Mutasi atau rotasi pejabat struktural dan pengelola inovasi di perangkat daerah dapat menyebabkan terhentinya keberlanjutan inovasi, kurangnya komitmen terhadap inovasi yang telah berjalan, hilangnya knowledge transfer antar pejabat.

2. Keterbatasan Anggaran untuk Replikasi dan Pengembangan

Beberapa inovasi memerlukan dukungan pembiayaan lanjutan, pengembangan sistem/aplikasi, penguatan sarana dan prasarana.

3. Keterbatasan Kapasitas SDM Pengelola Inovasi

Belum meratanya kapasitas ASN dalam menyusun proposal inovasi yang berkualitas, mengukur dampak inovasi, mendokumentasikan dan melaporkan inovasi secara sistematis.

4. Sinkronisasi waktu riset dengan siklus perencanaan

Proses penelitian sering tidak selaras dengan jadwal penyusunan dokumen perencanaan daerah (RKPD dan KUA-PPAS), sehingga hasil riset belum optimal dimanfaatkan pada tahun berjalan dan baru digunakan pada periode berikutnya. Diperlukan perencanaan riset yang lebih antisipatif dan terintegrasi dengan kalender perencanaan daerah.

5. Variasi kapasitas OPD dalam memahami hasil kajian

Terdapat perbedaan kemampuan antar OPD dalam menginterpretasikan dan mengimplementasikan rekomendasi riset ke dalam program dan indikator kinerja. Hal ini mempengaruhi kualitas tindak lanjut, sehingga diperlukan pendampingan dan komunikasi yang lebih intensif.

6. Keterbatasan SDM fungsional peneliti

Jumlah dan kompetensi peneliti masih terbatas dibandingkan dengan beban kebutuhan kajian strategis daerah. Kondisi ini berdampak pada optimalisasi kualitas dan kuantitas riset berbasis evidence serta responsivitas terhadap isu pembangunan daerah.

Adapun strategi penguatan yang akan dilaksanakan ke depan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Roadmap Riset Daerah 5 Tahunan

Menyusun Roadmap Riset Daerah lima tahunan sebagai dokumen arah kebijakan penelitian yang terintegrasi dengan RPJMD dan prioritas pembangunan daerah. Roadmap ini berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan tema riset prioritas, sasaran penelitian, serta target luaran yang mendukung indikator kinerja daerah. Dengan adanya roadmap yang terstruktur, pelaksanaan riset akan lebih terarah, tidak parsial, dan berkelanjutan. Selain itu, roadmap menjadi instrumen pengendalian agar setiap kajian memiliki kontribusi nyata terhadap penyelesaian isu strategis daerah.

2. Pengembangan Dashboard Monitoring Rekomendasi Riset

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pemanfaatan hasil riset, Kabupaten Banggai melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah akan mengembangkan sistem dashboard monitoring rekomendasi riset. Sistem ini akan memuat data terkait hasil kajian, rekomendasi kebijakan, perangkat daerah penanggung jawab, serta status tindak lanjut implementasinya.

3. Penguatan Riset Berbasis Data Sektoral

Pemerintah Kabupaten Banggai melalui BRIDA akan memperkuat pemanfaatan data sektoral sebagai basis analisis dalam pelaksanaan riset dan penyusunan rekomendasi kebijakan. Strategi ini dilakukan melalui sinkronisasi data dengan perangkat daerah, optimalisasi pemanfaatan data statistik daerah, serta penguatan kualitas analisis berbasis evidence. Riset berbasis data sektoral diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang lebih tajam, terukur, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan. Selain itu, pendekatan ini mendukung penerapan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) secara lebih konsisten.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja, yaitu:

- Program Penelitian dan Pengembangan Daerah melalui kegiatan :
Kegiatan pengembangan Inovasi dan Teknologi. Untuk dapat meningkatkan jumlah dan kualitas inovasi daerah dalam rangka mendukung tercapainya target tahun 2025 RPJMD Kabupaten Banggai 2021-2026 yaitu sangat inovatif Pemerintah Kabupaten Banggai melalui Badan Riset dan Inovasi Kabupaten Banggai melakukan beberapa Langkah-langkah strategis yaitu :
 - 1) Melaksanakan Klinik Inovasi Mandiri dilakukan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi di perangkat daerah mempelajari permasalahan PD, Menyusun proposal inovasi dan memasukan inovasi dalam aplikasi IGA agar dapat terdaftar secara Nasional. Kegiatan ini di tahun 2024 mampu menjaring inovasi sebanyak 43 inovasi dan di tahun 2025 meningkat menjadi 73 Inovasi. Hasilnya di tahun 2024 penilaian Indeks Inovasi Daerah yang dilakukan oleh BSKDN Kemendagri Kabupaten Banggai meraih nilai 59,81 dengan predikat "inovatif" dan di tahun 2025 hasil Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banggai meraih nilai 70,07 dengan predikat "sangat inovatif".
 - 2) Pemerintah Kab. Banggai melalui BRIDA memberikan apresiasi penghargaan dan uang tunai, plakat dan piagam sebagai hadiah bagi perangkat daerah, inisiator dan admin inovasi pd, yang telah melakukan inovasi serta memberikan sertifikat hak cipta inovasi. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong semangat berkeaktivitas dan berinovasi sehingga tercipta inovasi-inovasi baru yang dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah dan mengembangkan produk-produk unggulan.

- 3) Memberikan layanan Inovasi dengan pendaftaran HaKI gratis untuk hak Merek, Hak Cipta dan Indikasi Geografis sampai dengan tahun 2025 jumlah Hak Merek yang telah didaftarkan sebanyak 108 dan Hak Cipta Sebanyak 50 dan indikasi geografis sebanyak 2. Banyaknya kontribusi pendaftaran Haki ini Kab. Banggai berhasil meraih penghargaan dari KemenkumHAM dan menjadi percontohan untuk fasilitasi HaKI gratis skala Kabupaten.
- 4) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Iptek dengan mengadakan workshop champion innovation yang bertujuan untuk menjaring dan mengembangkan talenta riset dan inovasi baik tenaga kependidikan, siswa, mahasiswa, asn, akademisi. melaksanakan banggai research n inovaton summit 2024 yaitu sebuah wadah pencarian bibit talenta riset dan inovasi unggul berbasis kompetensi dan apresiasi.

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan serta Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Penelitian dilakukan untuk mencari strategi penyelesaian permasalahan daerah dan juga untuk mengembangkan potensi unggulan daerah yang ada di Kabupaten Banggai sesuai dengan prioritas daerah sehingga dapat diimplementasikan dan menjadi solusi dalam kebijakan Pembangunan Daerah. Penelitian ini penting dilakukan agar rekomendasi kebijakan yang diambil bisa dipertanggungjawabkan dan berbasis bukti. Penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2025 yaitu :

- 1) Roadmap potensi tanaman perkebunan kabupaten banggai (gerbang pangan)
- 2) Riset implementasi teknologi pemecah gelombang ambang rendah untuk perlindungan dan reklamasi pantai secara alami di kabupaten banggai (gerbang layak, bersih dan lancar)
- 3) Riset identifikasi potensi sumber daya air masyarakat di wilayah sentra pangan (gerbang layak, bersih dan lancar)
- 4) Pengembangan teknopark pertanian kawasan keles desa lumpoknyo kabupaten banggai (gerbang pangan)
- 5) Kajian peta jalan pengembangan ekonomi daerah tangguh dan inklusi berbasis potensi di kabupaten banggai (gerbang pangan)
- 6) Riset pengelolaan sampah berbasis masyarakat di kabupaten banggai (gerbang layak, bersi dan lancar)

- 7) Dampak perubahan iklim terhadap produksi padi di kabupaten banggai (gerbang pangan)
- 8) Pemetaan potensi tanaman pangan berbasis citra satelit (gerbang pangan)
- 9) Dampak inovasi sektor kesehatan di kabupaten banggai (gerbang sehat)
- 10) Survei kepuasan masyarakat pada perangkat daerah di kabupaten banggai (gerbang amanah).

3. Nilai SAKIP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sehingga harus dilaksanakannya evaluasi akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan evaluasi pada tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk :

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi AKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi AKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Tabel 3.85
Komponen Penilaian SAKIP Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Komponen	Tahun 2024	Tahun 2025	Selisih	Tren
1	Perencanaan Kinerja	23,13	23,13	0,00	Tetap
2	Pengukuran Kinerja	22,82	22,92	+0,10	Naik
3	Pelaporan Kinerja	11,97	12,06	+0,09	Naik

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan AKIP yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/522/AA.05/2025, Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 Kabupaten Banggai menunjukkan nilai sebesar 75,30 dengan predikat "BB". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "sangat baik", yaitu mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, dan telah diimplementasikan pada sebagian besar unit kerja. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Komponen perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kabupaten Banggai masih dalam proses penyusunan RPJMD 2025-2029. Dokumen perencanaan jangka menengah yang telah diunggah di ESR masih merupakan Ranwal (Rancangan Awal) RPJMD 2025-2029, sehingga masih memungkinkan adanya banyak perubahan dan penyesuaian. Secara umum, rumusan tujuan dan sasaran pada Ranwal RPJMD sudah cukup baik dan menjawab isu strategis dengan dilengkapi indikator kinerja yang sebagian besar sudah memenuhi kriteria SMART dan cukup. Namun demikian, masih ada beberapa indikator kinerja yang masih belum dilengkapi dengan baseline dan target kinerja serta masih ada indikator kinerja yang redundan (menjadi indikator tujuan dan indikator sasaran di tingkat Pemda);
- 2) Pada turunan Misi IV, perlu dirumuskan indikator kinerja yang benar-benar menggambarkan "pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan";
- 3) Perencanaan jangka menengah/ Renstra di Perangkat Daerah masih dalam proses penyusunan. Pada beberapa draft Ranwal Renstra Perangkat Daerah, masih ada rumusan tujuan yang belum dilengkapi indikator tujuan;
- 4) Pada sebagian Ranwal Renstra PD, ada indikator kinerja yang tidak tepat jika diletakkan pada tingkat Perangkat Daerah, misalnya indikator RB pada Dinas TPHP.
- 5) Sebagian draft pohon kinerja pada tingkat Perangkat Daerah masih perlu disempurnakan, terutama pada level taktikal dan operasional.

Rekomendasi terkait komponen perencanaan Kinerja:

- 1) Menyelesaikan proses penyusunan RPJMD 2025–2029 dengan memastikan seluruh rumusan tujuan dan sasaran berorientasi hasil dengan indikator kinerja yang SMART dan cukup serta dilengkapi dengan baseline dan target kinerja yang realistis.
 - 2) Menyempurnakan rumusan tujuan dan sasaran pada turunan misi IV (pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan) dan melengkapinya dengan indikator kinerja yang SMART, berorientasi hasil dan cukup menggambarkan rumusan kinerjanya.
 - 3) Bappeda dan Perangkat Daerah bersama-sama mereviu perencanaan kinerja PD agar dapat selaras dengan RPJMD, perumusan sasaran strategis yang lebih berorientasi outcome sesuai dengan level kinerjanya dan juga memastikan agar indikator kinerja yang dimiliki dapat relevan dengan level kinerjanya serta memberikan continuous improvement pada pencapaian kinerja yang ditetapkan.
 - 4) Melengkapi rumusan tujuan dan sasaran dengan indikator kinerja yang tepat. Indikator tujuan pada tingkat Perangkat Daerah dapat diambil dari indikator sasaran pada RPJMD jika PD tersebut memiliki kinerja langsung terhadap pencapaian sasaran tersebut.
 - 5) Menyempurnakan pohon kinerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 dengan cara memastikan pohon kinerja telah mempertimbangkan Critical Success Factor (CSF) yang menjadi area atau aspek-aspek kunci dan kritis yang berpengaruh dalam mewujudkan kinerja, sehingga hubungan kinerja, strategi kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting) dapat terbangun secara cukup.
- b. Komponen pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:
- Seluruh PD telah menyusun rencana aksi dan melakukan pemantauan dan evaluasi atas rencana aksi per triwulanan. Evaluasi meliputi realisasi penyerapan anggaran, pelaksanaan program dan kegiatan hingga ke capaian kinerja utama, namun demikian seluruh proses pengukuran kinerja ini masih belum memanfaatkan teknologi informasi.

Rekomendasi terkait komponen pengukuran Kinerja:

Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi sederhana yang dapat digunakan bersama dengan seluruh Perangkat Daerah sehingga masing-masing Kepala Perangkat Daerah dan Bappeda dapat memantau ketercapaian kinerja secara berkala dan real time.

c. Komponen pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- 1) Masih ada beberapa LAKIP PD yang analisis keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerjanya belum dibuat per indikator;
- 2) Terhadap capaian kinerja yang jauh di bawah target, masih ada penjelasan yang kurang komprehensif;
- 3) Masih ditemukan LAKIP PD yang belum mengakomodasi informasi-informasi seperti perbandingan capaian tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya, perbandingan dengan tahun terakhir RPJMD, analisis terhadap efisiensi sumber daya, dll.

Berikut Rekomendasi Terkait Pelaporan Kinerja:

- 1) Untuk capaian kinerja yang belum sesuai/jauh dibawah target, penjelasan/analisisnya juga sebaiknya komprehensif supaya dapat direncanakan strategi yang lebih baik lagi untuk perencanaan di tahun berikutnya;
- 2) Memperbaiki kualitas dokumen Laporan Kinerja level PD sesuai dengan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014, diantaranya dengan menyajikan perbandingan data realisasi kinerja dengan target kinerja tahun berjalan, target kinerja akhir periode Renstra serta perbandingannya dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, menyajikan analisis faktor pendorong dan penghambat tercapainya target kinerja serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya secara lebih mendalam sehingga dapat dijadikan dasar untuk merumuskan rencana tindak lanjut/solusi atas hambatan-hambatan yang dihadapi sebagai upaya untuk mencapai atau meningkatkan capaian target kinerja di tahun selanjutnya;
- 3) Membuat format LAKIP untuk dapat diikuti oleh seluruh PD supaya kualitasnya dapat baik secara merata.

d. Komponen evaluasi internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

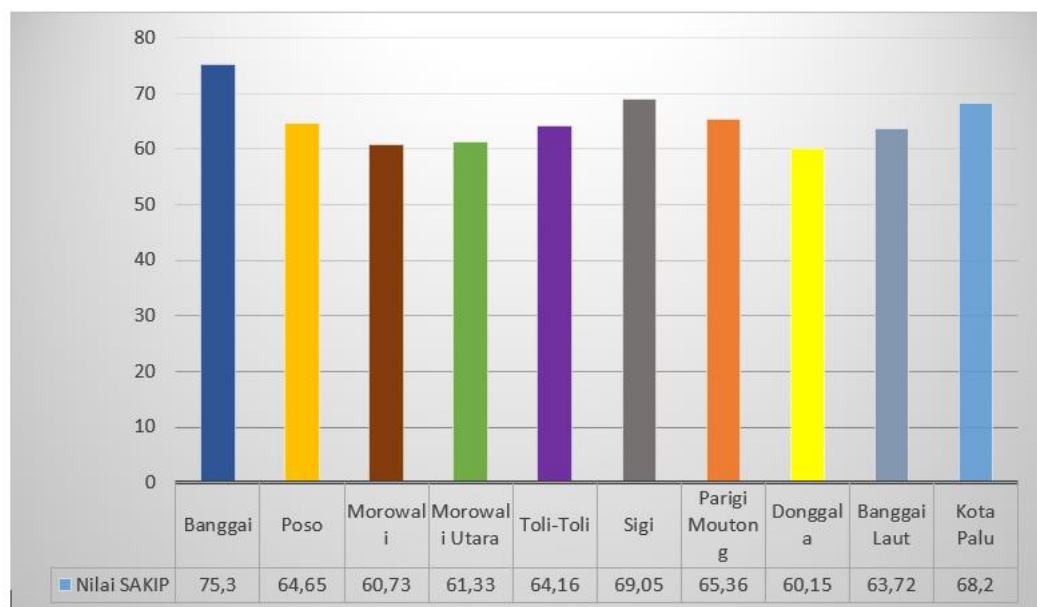
- 1) Inspektorat Kabupaten Banggai telah memiliki aplikasi untuk evaluasi AKIP internal Perangkat Daerah, yakni sakip.banggaikab.go.id namun demikian penggunaan aplikasi ini belum optimal, hal ini terlihat dari masih banyaknya PD yang belum/ tidak dilakukan evaluasi pada tahun 2024 dan 2025. Selain itu, terhadap PD yang telah dinilai pun LHE internalnya belum ada catatan dan dan rekomendasi, sehingga belum terlihat perbaikan atas manajemen kinerjanya
- 2) Belum terdapat mekanisme pemantauan terhadap tindak lanjut LHE internal Perangkat Daerah

Berikut Rekomendasi Terkait Evaluasi Internal :

- 1) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang telah dimiliki untuk melakukan evaluasi internal AKIP PD dengan memberikan catatan dan rekomendasi yang spesifik bagi PD dalam rangka peningkatan implementasi AKIP di PD.
- 2) Melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi dari inspektorat

Grafik 3.35

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2023-2025



Sumber: Hasil Evaluasi Kemenpan RB (Data di Olah Biro Organisasi Prov. Sulawesi Tengah)

Program-program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran “Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Inovasi Daerah dan Nilai SAKIP Kabupaten Banggai”, yaitu:

Tabel.3.86
Program yang mendukung sasaran Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Inovasi Daerah dan Nilai SAKIP Kabupaten Banggai

Program	Anggaran	Realisasi	Serapan (%)
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.531.689.724.828,38	1.291.870.762.994,00	84,34
Pendaftaran Penduduk	1.750.280.952,00	1.507.780.645,00	86,15
Pencatatan Sipil	443.545.390,00	392.436.403,00	88,48
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	741.811.160,00	644.273.502,00	86,85
Pengelolaan Profil Kependudukan	192.770.500,00	184.548.446,00	95,73
Pengembangan Iklim Penanaman Modal	807.889.400,00	804.593.670,00	99,59
Promosi Penanaman Modal	1.458.779.500,00	1.458.720.378,00	100,00
Pelayanan Penanaman Modal	1.287.206.400,00	1.268.883.051,00	98,58
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	852.222.200,00	851.992.400,00	99,97
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	234.499.450,00	234.488.400,00	100,00
Penyelenggaraan Statistik Sektor	374.653.640,00	370.295.030,00	98,84
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	345.672.720,00	338.697.457,00	97,98
Pengelolaan Arsip	382.166.600,00	380.796.080,00	99,64
Pembinaan Perpustakaan	1.632.117.273,00	1.603.628.808,00	98,25
Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	1.109.479.975,00	1.087.710.630,00	98,04
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	43.730.282.941,00	42.582.703.147,00	97,38
Perekonomian dan Pembangunan	6.149.762.106,00	5.576.499.005,00	90,68
Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	17.817.032.100,00	15.136.202.111,00	84,95
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.772.342.950,00	3.115.697.200,00	82,59
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	7.789.800.167,00	6.578.274.325,00	84,45
Pengelolaan Keuangan Daerah	8.639.030.250,00	7.188.208.061,00	83,21

Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.151.667.849,00	3.726.795.342,00	89,77
Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.873.054.325,00	4.685.454.833,00	79,78
Kepegawaian Daerah	9.127.986.800,00	6.903.537.179,00	75,63
Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.810.662.731,00	2.472.276.903,00	64,88
Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.279.302.598,00	6.013.080.841,00	95,76
Penyelenggaraan Pengawasan	6.054.254.750,00	2.808.406.051,00	46,39
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	60.680.086.992,80	50.898.734.790,00	83,88
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	24.456.447.373,79	21.464.602.925,00	87,77
Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	296.740.200,00	243.620.200,00	82,10
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	4.059.821.958,00	3.635.536.330,00	89,55
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14.333.500,00	9.300.500,00	64,89
Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	633.649.000,00	553.933.142,00	87,42
Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	14.659.259.472,00	11.617.649.288,00	79,25
Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	785.300.000,00	785.300.000,00	100,00
Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.277.909.780,00	1.198.665.860,00	93,80
Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	6.317.262.960,00	5.176.447.235,00	81,94
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	430.705.800,00	270.319.200,00	62,76
Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1.331.825.500,00	1.155.762.000,00	86,78
Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	2.102.724.200,00	2.032.041.080,00	96,64
Jumlah	1.783.544.066.291,97	1.508.828.655.442,00	84,60

Sumber : Setda, Setwan, Dinas Dukcapil, DPMPSTP, Dispursipan, Bakesbangpol, BPKAD, Bappeda, Bripda, Kecamatan, 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas pembangunan manusia kabupaten banggai yang produktif dan Sejahtera” diperoleh

rata-rata capaian kinerja sebesar 94,42% dengan persentase anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar 84,60%.

Tabel 3.87
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Kabupaten Banggai Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator	% Rata-Rata Capaian Kinerja	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	100,18	403.806.769.721,00	183.605.907.264,85	45,47
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)				
	Angka Kemiskinan				
	Gini Rasio				
Tingkat Efisiensi : 54,71%					
Tingkat Efektifitas : 220,32%					
Meningkatnya Kualitas Perdagangan, Industri Rumah Tangga, Perdagangan, Koperasi dan UMKM serta Pertumbuhan Wirausaha Baru	Kontribusi Usaha Perdagangan, Koperasi, UMKM dan IKM terhadap PDRB	99,42	8.506.905.783,00	7.899.153.697,00	92,86
Tingkat Efisiensi : 6,56%					
Tingkat Efektifitas : 107,06%					
Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Perdesaan	Persentase Desa Maju Berdasarkan IDM	64,94	10.308.464.150,00	9.960.543.897,00	96,62
Tersedianya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas, Layak dan Merata Untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Konektivitas	Persentase Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Wilayah Dalam Kondisi Baik	98,17	522.262.687.335,54	491.905.892.194,00	94,19
Tingkat Efisiensi : 3,98%					
Tingkat Efektifitas : 104,23%					
Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	100,00	13.072.649.189,00	11,899,420,480,00	91,03

melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana					
Tingkat Efisiensi : 8,97%					
Tingkat Efektifitas : 109,85%					
Meningkatnya Investasi dan Pengelolaan Potensi Pertanian, perikanan dan Kelautan serta Pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah	Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan dan pertambangan Terhadap PDRB	107,00	91.554.440.733	85.670.663.524	93,57
	Indeks Ketahanan Pangan				
Tingkat Efisiensi : 13,43%					
Tingkat Efektifitas : 114,35%					
Meningkatnya Kualitas Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan pengendalian Dampak Perubahan Iklim untuk Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	104,56	23.123.080.954,30	20.226.080.364,00	87,47
Tingkat Efisiensi : 17,09%					
Tingkat Efektifitas : 119,54%					
Meningkatnya Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	11,30	4.856.035.321,00	4.735.040.369,00	97,51
Meningkatnya Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Daerah Melalui Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Babasalan serta Moderasi Beragama	Indeks Pembangunan Kebudayaan	51,14	2.636.893.753,00	2.337.510.545,00	88,65
Meningkatnya	Indeks	94,42	1.783.544.066.291,97	1.508.828.655.442,00	84,60

Indrks Reformasi Birokrasi, Indeks Inovasi Daerah dan Nilai SAKIP Kabupaten Banggai	Reformasi Birokrasi				
	Indeks Inovasi Daerah				
	Nilai SAKIP				
Tingkat Efisiensi : 9,82%					
Tingkat Efektifitas : 111,61%					

3.3. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Banggai Nomor 22 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp 3.316.105.440.115,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.049.552.476.412,03 atau mencapai 91,96%. Dengan rincian adalah sebagai berikut :

3.3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2025

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Adapun komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai adalah meliputi:

Tabel 3.88
Realisasi Pendapatan Daerah

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
PENDAPATAN DAERAH	2.942.249.715.688,00	2.688.943.413.945,60	91,39
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	294.503.902.299,00	305.396.783.462,23	103,70
Pajak Daerah	138.118.188.864,00	136.006.576.494,97	98,47
Retribusi Daerah	27.915.711.026,00	24.692.811.821,00	88,45
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.714.244.284,00	7.865.079.064,00	137,64
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	122.755.758.125,00	136.832.316.082,26	111,47
Pendapatan Transfer	2.622.900.931.201,00	2.359.079.077.741,37	89,94
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.510.706.542.000,00	2.284.125.484.163,00	90,98
Dana Perimbangan	0	0	
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0	0	
Dana Transfer Umum-	0	0	

Dana Alokasi Umum (DAU)			
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0	0	
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0	0	
Dana Bagi Hasil (DBH)	1.133.302.981.000,00	922.601.133.440,00	81,41
Dana Alokasi Umum (DAU)	918.990.879.000,00	931.771.026.560,00	101,39
Dana Alokasi Khusus (DAK)	239.329.672.000,00	228.447.264.083,00	95,45
Dana Desa	219.083.010.000,00	201.306.060.080,00	91,89
Pendapatan Transfer Antar Daerah	112.194.389.201,00	74.953.593.578,37	66,81
Pendapatan Bagi Hasil	112.094.389.201,00	74.853.593.578,37	66,78
Bantuan Keuangan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	24.844.882.188,00	24.467.552.742,00	98,48
Pendapatan Hibah	0	0	
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	24.844.882.188,00	24.467.552.742,00	98,48

Sumber : BPKAD Kab. Banggai, 2025

Berdasarkan rincian tersebut diatas dapat diuraikan menurut sumber pendapatan dengan penjabaran bahwa :

Tabel. 3.89
Pendapatan Pajak Daerah

No	Jenis Pajak	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
1	Pajak Hotel	0	0	0
2	Pajak Restoran	0	0	0
3	Pajak Hiburan	0	0	0
4	Pajak Reklame	210.611.209,000	1.501.019.781,00	712,70
5	Pajak Penerangan Jalan	0	0	0
6	Pajak Parkir	0	0	0
7	Pajak Air Tanah	20.186.607.478,00	21.562.868.678,00	106,82
8	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000,00	318.020,00	0,32
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	13.000.000.000,00	14.571.539.485,97	112,09
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	13.360.359.155,00	10.831.788.781,00	81,07
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	9.142.682.484,00	7.372.948.209,00	80,64
12	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	45.522.427.657,00	41.262.012.676,00	90,64

13	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	17.200.000.000,00	19.889.971.435,00	115,64
14	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	17.500.000.000,00	19.014.109.429,00	108,65
Jumlah		294.503.902.299,00	305.396.783.462,23	103,70

Sumber : BPKAD Kab. Banggai 2025

Retribusi Daerah merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah sebagaimana yang ditetapkan.

Tabel. 3.90
Pendapatan Retribusi Daerah

No	Jenis Pajak	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
1.	Retribusi Jasa Umum	14.713.217.126,00	17.945.739.000,00	121,97
2.	Retribusi Jasa Usaha	8.737.525.675,00	4.919.871.889,00	56,31
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	4.464.968.225,00	1.827.200.932,00	40,92
Jumlah		27.915.711.026,00	24.692.811.821,00	88,45

Sumber : BPKAD Kab. Banggai 2025

Tabel 3.91
Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No.	Jenis Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	5.714.244.284,00	7.865.079.064,00	137,64

Sumber : BPKAD Kab. Banggai 2025

Tabel. 3.92
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0	0	0
2	Penerimaan Jasa Giro	5.865.972.000,00	9.736.357.512,00	165,98
3	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	68.353.000,00	11.000.000,00	16,09
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	8.567.134.000,00	8.210.837.305,6	95,84
5	Pendapatan Denda Pajak	0	111.867.175,17	

	Daerah			
6	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0	0	0
7	Pendapatan dari Pengembalian	4.730.304.000,00	2.762.479.667,55	58,40
8	Pendapatan BLUD	102.523.995.125,00	115.944.774.421,94	113,09
9	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1.000.000.000,00	55.000.000,00	5,50
Jumlah		122.755.758.125,00	136.832.316.082,26	111,47

Sumber : BPKAD Kab. Banggai 2025

Dana Transfer merupakan akun untuk menampung penerimaan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan dan transfer dana lainnya, transfer dari Pemerintah Provinsi, serta bantuan keuangan. Berikut ini merupakan rincian dari pendapatan transfer.

Tabel. 3.93
Pendapatan Transfer

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.510.706.542.000,00	2.284.125.484.163,00	90,98
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	112.194.389.201,00	74.953.593.578,37	66,81

Sumber : BPKAD Kab. Banggai 2025

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel. 3.94
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
1	Dana Perimbangan	0	0	
2	Dana Bagi Hasil (DBH)	1.133.302.981.000,00	922.601.133.440,00	81,41
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	918.990.879.000,00	931.771.026.560,00	101,39
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	239.329.672.000,00	228.447.264.083,00	95,45
5	Dana Desa	219.083.010.000,00	201306.060.080,00	91,89

Sumber : BPKAD Kab. Banggai 2025

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel. 3.95
Pendapatan Transfer Antar Daerah

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
1	Pendapatan Bagi Hasil	112.094.389.201,00	74.853.593.578,37	66,78
2	Bantuan Keuangan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00

Sumber : BPKAD Kab. Banggai 2025

Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Secara ideal Belanja Daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Adapun komponen Belanja Daerah meliputi:

Tabel 3.96
Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%
BELANJA DAERAH	3.316.105.440.115,00	3.049.552.476.412,03	91,96
BELANJA OPERASI	2.253.972.344.304,58	2.040.790.402.625,03	90,54
Belanja Pegawai	1.141.011.759.235,39	1.020.829.861.778,77	89,47
Belanja Barang dan Jasa	1.058.959.880.066,99	970.039.995.303,26	91,60
Belanja Subsidi	404.000.000,00	403.884.960,00	99,97
Belanja Hibah	53.566.705.002,20	49.486.660.583,00	92,38
Belanja Bantuan Sosial	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
BELANJA MODAL	645.700.369.720,42	616.496.641.234,00	95,48
Belanja Modal Tanah	10.706.938.926,35	10.177.582.000,00	95,06
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.291.876.222,00	104.747.962.825,00	93,28
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.645.566.281,21	190.102.843.107,00	94,75
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	321.030.847.290,86	310.467.508.302,00	96,71
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	565.141.000,00	563.328.000,00	99,68
Belanja Modal Aset Lainnya	460.000.000,00	437.417.000,00	95,09
BELANJA TIDAK TERDUGA	6.430.343.600,00	40.000.000,00	0,62
Belanja Tidak Terduga	6.430.343.600,00	40.000.000,00	0,62

BELANJA TRANSFER	410.002.382.490,00	392.225.432.553,00	95,66
Belanja Bagi Hasil	16.603.389.990,00	16.603.389.968,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan	393.398.992.500,00	375.622.042.585,00	95,48
SURPLUS / DEFISIT	-373.855.724.427,00	-360.609.062.466,43	96,46

Sumber : BPKAD Kab. Banggai 2025

Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD Pemerintah Kabupaten Banggai yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode TA 2025 yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Banggai. Dari tabel tersebut bahwa belanja kabupaten banggai dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.97
Belanja Pegawai

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	731.484.903.202,39	632.002.291.690,00	86,40
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	388.065.390.198,00	352.808.018.942,77	90,91
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	0,00	0,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	19.962.940.197,00	19.327.152.341,00	96,82
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	287.045.638,00	183.349.787,00	63,87
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	912.480.000,00	901.950.000,00	98,85
7	Belanja Pegawai BLUD	299.000.000,00	15.607.099.018,00	5.219,77
Jumlah		1.141.011.759.235,39	1.020.829.861.778,77	89,47

Sumber : BPKAD Kab. Banggai 2025

Tabel 3.98
Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
1	Belanja Barang	333.007.445.025,91	304.875.267.316,26	91,55
2	Belanja Jasa	380.389.130.972,08	342.733.756.339,00	90,10
3	Belanja Pemeliharaan	18.431.568.377,00	14.250.283.065,00	77,31
4	Belanja Perjalanan Dinas	150.233.507.903,00	129.106.230.195,00	85,94
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.216.650.000,00	6.808.315.000,00	94,34
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	-	0,00	0,00

7	Belanja Barang dan Jasa BOSP	51.350.592.054,00	45.035.073.296,00	87,70
8	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	29.050.019.000,00	27.432.131.932,00	94,43
9	Belanja Barang dan Jasa BLUD	89.280.966.735,00	99.798.938.160,00	111,78
Jumlah		1.058.959.880.066,99	970.039.995.303,26	91,60

Sumber : BPKAD Kab. Banggai 2025

Tabel 3.99
Belanja Subsidi

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
1	Belanja Subsidi kepada BUMD	404.000.000,00	403.884.960,00	99,97
Jumlah		404.000.000,00	403.884.960,00	99,97

Sumber : BPKAD Kab. Banggai 2025

Tabel 3.100
Belanja Hibah

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	5.707.478.000,00	4.752.977.155,00	83,28
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	47.060.530.202,20	43.934.986.628,00	93,36
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	798.696.800,00	798.696.800,00	100,00

Sumber : BPKAD Kab. Banggai 2025

Tabel 3.101
Belanja Bantuan Sosial

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	-	0,00	0,00

Sumber : BPKAD Kab. Banggai 2025

Tabel 3.102
Belanja Modal

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
1	Belanja Modal Tanah	10.706.938.926,35	10.177.582.000,00	95,06
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.291.876.222,00	104.747.962.825,00	93,28
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.645.566.281,21	190.102.843.107,00	94,75
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	321.030.847.290,86	310.467.508.302,00	96,71
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	565.141.000,00	563.328.000,00	99,68
6	Belanja Modal Aset Lainnya	460.000.000,00	437.417.000,00	95,09

Sumber : BPKAD Kab. Banggai 2025

Tabel 3.103
Belanja Tidak Terduga

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
1	Belanja Tidak Terduga	6.430.343.600,00	40.000.000,00	0,62
Jumlah		6.430.343.600,00	40.000.000,00	0,62

Sumber : BPKAD Kab. Banggai 2025

Tabel 3.104
Belanja Transfer

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
1	Belanja Bagi Hasil	6.603.389.990,00	16.603.389.968,00	100,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	393.398.992.500,00	375.622.042.585,00	95,48

Sumber : BPKAD Kab. Banggai 2025

Tabel 3.105
Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
PEMBIAYAAN DAERAH	373.855.724.427,00	375.990.093.591,02	100,57
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	373.855.724.427,00	375.990.093.591,02	100,57
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	377.655.724.427,00	379.790.093.591,02	100,57
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	14.406.240.000,00	14.406.240.000,00	100,00
Penghematan Belanja	359.970.413.626,00	362.104.782.788,96	100,59
Sisa Belanja Lainnya	3.279.070.801,00	3.279.070.802,06	100,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	0,00	0,00

Kepada Pemerintah Pusat			
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	100,00
Penyertaan Modal Daerah	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	100,00

Sumber : BPKAD Kab. Banggai 2025

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penerapan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Banggai kepada publik dalam mencapai capaian kinerja tahun 2025 yang diukur dari indikator yang dapat menggambarkan sasaran target. Pelaporan kinerja tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Banggai merupakan masa pelaporan tahun ketiga pada periode RPJMD 2021-2026.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap Misi yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai terhadap 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama, dengan rincian sebagai berikut :

1. Target dengan capaian realisasi diatas 100% sebanyak 4 target;
2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 3 target ; dan
3. Target dengan capaian realisasi dibawah 100% sebanyak 10 target.

Meskipun terdapat beberapa indikator masih belum berhasil, namun secara umum target indikator kinerja pada Tahun 2025 dari 10 (sepuluh) Sasaran Strategis menunjukkan rata-rata capaian kinerja sebesar 89,84% atau dengan kategori “Memuaskan”.

Sebagai upaya untuk memaksimalkan pencapaian target sasaran kinerja di masa yang akan datang, maka dilakukan upaya-upaya antara lain :

1. Membangun koordinasi dan peningkatan Kerjasama dengan unit kerja/instansi terkait dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan unit kerja/instansi terkait.
2. Melakukan pengukuran secara periodik terhadap hasil capaian kinerja sebagai bahan pengendali pencapaian kinerja pada akhir tahun anggaran agar upaya pencapaian target kinerja dapat optimal.
3. Membangun dan mengintegrasikan sistem pengelolaan dalam komponen SAKIP dengan sistem untuk melaksanakan evaluasi AKIP internal agar temuan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal lebih detail dan akurat.

4. Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2025 yang menunjang pencapaian 10 (sepuluh) sasaran strategis didukung dengan anggaran belanja daerah sebesar Rp. 3.316.105.440.115,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.049.552.476.412,03 atau 91,96%. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan Keputusan dan pembentukan kebijakan kedepannya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banggai yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap sasaran dan indikator pada Tahun 2025 dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Banggai.

**“LAMPIRAN PENGHARGAAN
PEMERINTAH KABUPATEN
BANGGAI TAHUN 2025”**

Penghargaan Kabupaten Terinovatif dalam pengendalian DBD dengan Inovasi " Si Batik Maleo " (Siswa Basmi Jentik dan Memantau Lingkungan Sekolah)



Bupati Banggai Amirudin Terima Piala dan Penghargaan Perai Predikat Kabupaten Sangat Inovatif pada IGA 2025 Satu-Satunya dari Sulteng



Penghargaan GM-DTGI 2025 DKISP BANGGAI - Pemerintah Kabupaten Banggai meraih penghargaan Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index(GM-DGTI) Tahun 2025 sebagai Pemerintah Daerah Terbaik Tingkat Kabupaten Kota



Riset air dan pangan membawa Kabupaten Banggai mendapat penghargaan Brida Optimal dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).



Bupati Banggai, Amirudin saat menerima penghargaan dari BRIN di Jakarta, Senin (27/10/2025). (HANDOVER)

Kabupaten Banggai berhasil meraih prestasi nasional dengan menerima penghargaan atas capaian *Opini Tanpa Maladministrasi* dari Ombudsman Republik Indonesia untuk Tahun Penilaian 2025



Banggai Torehkan WTP ke-13 Kali Berturut-turut



Cakupan Peserta JKN 99,83 Persen, Bupati Banggai Raih UHC Awards Kategori Madya

Cakupan Peserta JKN 99,83 Persen, Bupati Banggai Raih UHC Awards Kategori Madya



Jajad 4 Min Baca
Januari 29, 2026

Informasi Kabupaten Banggai



Keunggulan Digitalisasi Banggai Terbukti, Pemkab Banggai Kembali Pimpin SPBE
2024 Raih Nilai Tertinggi Se_Sulawesi Tengah

